



JOURNAL OF
POLITICAL ISSUES

JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	E-ISSN
1	1	JULI 2019	1-73	2685-7766

HULU-HILIR PENANGGULANGAN *STUNTING* DI INDONESIA

(Rini Archda dan Jeki Tumangger)

KERJASAMA PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN PEMERINTAH KOTA BEIJING CHINA DALAM SKEMA SISTER CITY

(Henike Primawanti, Windy Dermawan dan Widiya Ardianti)

STRATEGI KAMPANYE SUDRAJAT-SYAIKHU MENDAPAT DUKUNGAN MASA POPULISME ISLAM DALAM PILGUB JAWA BARAT 2018

(Yusa Djuyandi, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, dan Diki Drajat)

DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG

(Rendy, Dini Wulansari, dan Berlian Zarina)

MENDORONG REFORMASI PARLEMEN MELALUI KEKUATAN CIVIL SOCIETY DI INDONESIA

(Sandy Pratama, Arief Hidayat, dan Putri Aisyah)

PERAN PEMILIH PEMULA DALAM PENGAWASAN PEMILU PARTISIPATIF

(Agam Primadi, David Efendi, dan Sahirin)

**JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

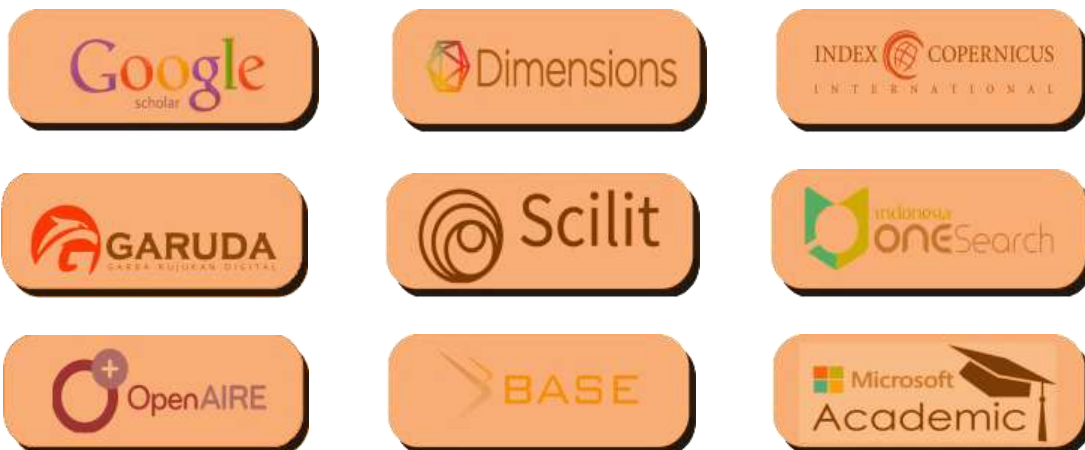
CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian maupun pemikiran kritis mengenai isu-isu dalam lingkup bidang politik yang orisinal dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tunggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 3.000-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Keamanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

JPI SUDAH TERINDEKS DI:



Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

Pengarah:

Kepala Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):

Ranto, M.A.

Redaktur (*Managing Editor*):

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

Penyunting (*Section Editor*):

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La ode Muhamad Muliawan, M.A.

Amir Syamsuadi, M.Si.

Copy Editing & Lay Out Editor:

Agun Sutrisno, A.md.

Mitra Bestari (*Reviewer*):

Dr. Ibrahim, M.Si., Universitas Bangka Belitung

Dr. Ratnia Solihah, M.Si., Universitas Padjajaran

Prof. Dr. Syarif Hidayat, M.Si., Universitas Nasional

Luthfi Makhasin, Ph. D., Universitas Jendral Soedirman

Alamat:

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung, Kode Pos: 33172 Indonesia

Email: editor@jpi.ubb.ac.id

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

e-ISSN: 2685-7766

Daftar Isi

Hulu-Hilir Penanggulangan Stunting di Indonesia (Rini Archda Saputri dan Jekki Tumangger)	1-9
Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City (Henike Primawanti, Windy Dermawan, dan Widya Ardianti)	10-22
Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Massa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018 (Yusa Djuyandi, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, dan Diki Drajat)	23-34
Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang (Rendy, Dini Wulansari, dan Berlian Zarina)	35-49
Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society di Indonesia (Sandy Pratama, Arief Hidayat, dan Putri Aisyah)	50-62
Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif (Agam Primadi, David Efendi, dan Sahirin)	63-73

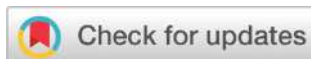
Salam Redaksi

Salam Hangatt. . .

Dinamika politik kontemporer dominan beririsan dengan isu kesejahteraan. Dalam konteks Indonesia hari ini, isu politik lebih banyak terkonsentrasi pada fenomena polarisasi sosial politik sebagai derivasi dari politik elektoral pemilu 2019. Isu disintegrasi dan degradasi konsolidasi demokrasi menjadi keresahan para pengkaji ilmu politik. Alih-alih concern pada upaya memperkuat demokrasi sebagai basis fundamental bagi terciptanya kemakmuran, politik Indonesia harus berhadapan dengan konflik dan set back stabilitas kelembagaan demokrasi pasca orde baru.

Journal of Political Issues terbitan perdana ini mencoba sejenak lepas dari kungkungan kondisi, lalu berupaya mengangkat kajian nilai yang lebih komprehensif sebagai bahan pengingat bagi para akademisi dan pengkaji politik kontemporer. Sajian perdana ini memuat beberapa buah pikiran dan hasil penelitian berbagai cendekiawan yang disusun secara apik dengan harapan dapat membangun perspektif pembaca secara lebih luas. Tulisan pertama mengambil topik tentang penanggulangan stunting di Indonesia. Mengambil lokus Bangka Belitung, Rini Archda Saputri dan kawan-kawan mengalirkan telaah tentang proses penanggulangan stunting, mulai dari kebijakan sampai pada evaluasi implementasi. Henike Primawanti dan kawan-kawan mencoba menampilkan sebuah konsep pemerintahan dalam bahasan tentang sister city dengan mengambil contoh kasus kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Beijing China. Terkait kajian pemenangan pemilu, Yusa Djuyandi dan kawan-kawan menyajikan hasil riset dengan studi kasus Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Massa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018. Melanjutkan isu kesejahteraan dan kependudukan, Rendy dan kawan-kawan menyampaikan hasil risetnya dalam paper keempat yang berjudul Demografi Politik Kewargaan Daerah Pinggiran Kota Pangkalpinang. Melengkapi kajian mengenai konsolidasi demokrasi, sebuah konsep menarik mengenai upaya mendorong reformasi Parlemen melalui kekuatan Civil Society di Indonesia turut ditulis oleh Sandy Pratama dan kawan-kawan. Sebagai penutup, Agam Primadi dan kawan-kawan menulis tentang evaluasi atas signifikansi Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif. Demikian jurnal ini diterbitkan dengan harapan mampu memperkaya khasanah dan perspektif kajian ilmu politik. Selamat membaca.

Selamat membaca,
Salam Publikasi!



Hulu-hilir Penanggulangan *Stunting* di Indonesia

Rini Archda Saputri¹; Jeki Tumangger¹

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

Email: riniardhasaputri@gmail.com

Abstrak

Stunting menjadi isu yang mendesak untuk diselesaikan karena berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan. Sumber daya manusia adalah faktor utama penentu kesuksesan sebuah negara. Studi ini bertujuan melihat hulu-hilir upaya penanggulangan *stunting* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisa deskriptif. Sumber data berupa analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, di hulu (level kebijakan) telah banyak sekali kebijakan pemerintah yang dilahirkan sebagai upaya percepatan penanggulangan *stunting*, namun pada kenyataannya angka penurunan *stunting* masih jauh dari yang ditargetkan. Di hilir, masih terdapat banyak masyarakat maupun implementer program di level akar rumput yang belum memiliki penguasaan pengetahuan yang memadai terkait *stunting* itu sendiri, baik dampaknya, faktor penyebabnya, hingga cara penanggulangannya. Kebijakan penanggulangan *stunting* terkesan masih berada pada tataran menara gading, sementara pada tataran akar rumput sendiri yang merupakan ujung tombak upaya percepatan penanggulangan *stunting*, isu *stunting* seolah masih terdengar asing. Oleh karena itu, masih sangat diperlukan sosialisasi secara massif terkait *stunting*, dampak yang ditimbulkan, urgensi penanggulangannya, dan upaya penanggulangan *stunting* pada tataran akar rumput, sebagai bentuk upaya preventif individual tanpa bergantung pada program pemerintah saja, sebab penanggulangan *stunting* adalah masalah mendesak yang mesti ditangani oleh semua pihak dengan segera tanpa menunggu apapun.

Kata Kunci: *Stunting*; Penanggulangan *Stunting*; Intervensi *Stunting*.

Abstract

Stunting is an urgent issue to be resolved because it impacts on the quality of Indonesia's human resources in the future. Human resources are the main factor determining the success of a country. This study aims to look at the upstream-downstream efforts to overcome stunting in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with descriptive analysis. Source of data in the form of policy document analysis. The results of the study show that, in the upstream (policy level) there have been a lot of government policies that were born as an effort to accelerate control stunting, but in reality the reduction rate is stunting still far from the target. In the downstream area, there are still many communities and the implementation of programs at the grassroots level that do not have sufficient mastery of knowledge related to stunting itself, both the impact, the causes, and how to overcome them. prevention policies Stunting seem to still be at the ivory tower level, while at the grassroots level itself is the spearhead of efforts to accelerate prevention stunting, the issue of stunting seems to still sound strange. Therefore, there is still a need for massive socialization related to stunting, the impact, the urgency of overcoming it, and efforts to overcome stunting at the grassroots level, as a form of individual preventive efforts without relying on government programs, because stunting is an urgent problem that must be addressed by all parties immediately without waiting for anything.

Keywords: *Stunting*; *Stunting Prevention*; *Stunting Intervention*

Info Artikel:

Dikirim: Jul 23, 2019

Diterima: Jul 24, 2019

Dipublikasi: Jul 31, 2019

PENDAHULUAN

Kejadian balita pendek atau biasa disebut dengan *stunting* merupakan salah satu masalah gizi yang dialami oleh balita di dunia saat ini. Pada tahun 2017, 22,2% atau sekitar 150,8 juta balita di dunia mengalami *stunting*. Pada tahun 2017, lebih dari setengah balita *stunting* di dunia berasal dari Asia (55%) sedangkan lebih dari sepertiganya (39%) tinggal di Afrika. Dari 83,6 juta balita *stunting* di Asia, proporsi terbanyak berasal dari Asia Selatan (58,7%) dan proporsi paling sedikit di Asia Tengah (0,9%). Data Prevalensi balita *stunting* yang dikumpulkan World Health Organization (WHO) menunjukkan bahwa Indonesia termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di regional Asia Tenggara/South-East Asia Regional (SEAR). Rata-rata prevalensi balita *stunting* di Indonesia tahun 2005-2017 adalah 36,4% (Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018).

Di Indonesia, *stunting* merupakan masalah serius dan juga merupakan masalah gizi utama yang sedang dihadapi (Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018). Bila masalah ini bersifat kronis, maka akan memengaruhi fungsi kognitif yakni tingkat kecerdasan yang rendah dan berdampak pada kualitas sumberdaya manusia. Masalah *stunting* memiliki dampak yang cukup serius; antara lain, jangka pendek terkait dengan morbiditas dan mortalitas pada bayi/balita, jangka menengah terkait dengan inteletualitas dan kemampuan kognitif yang rendah, dan jangka panjang terkait dengan kualitas sumberdaya manusia dan masalah penyakit degeneratif di usia dewasa (Aryastami, 2017).

Sementara itu, anak merupakan aset bangsa di masa depan. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi sumber daya manusia Indonesia di masa mendatang jika saat ini banyak anak Indonesia yang menderita *stunting*. Bangsa ini akan tidak mampu bersaing

dengan bangsa lain dalam menghadapi tantangan global. Maka, untuk mencegah hal tersebut permasalahan *stunting* mesti segera diatasi secara serius.

Pengalaman dan bukti Internasional menunjukkan bahwa *stunting* dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan produktivitas pasar kerja, sehingga mengakibatkan hilangnya 11% GDP (*Gross Domestic Products*) serta mengurangi pendapatan pekerja dewasa hingga 20%. Selain itu, *stunting* juga dapat berkontribusi pada melebarnya kesenjangan/ *inequality*, sehingga mengurangi 10% dari total pendapatan seumur hidup dan juga menyebabkan kemiskinan antar-generasi (10 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting), 2017).

Generasi yang tumbuh optimal alias tidak *stunting* memiliki tingkat kecerdasan yang lebih baik, akan memberikan daya saing yang baik dibidang pembangunan dan ekonomi. Disamping itu, pertumbuhan optimal dapat mengurangi beban terhadap risiko penyakit degeneratif sebagai dampak sisa yang terbawa dari dalam kandungan. Penyakit degeneratif seperti diabetes, hipertensi, jantung, ginjal, merupakan penyakit yang membutuhkan biaya pengobatan yang tinggi. Dengan demikian, bila pertumbuhan *stunting* dapat dicegah, maka diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa lebih baik, tanpa dibebani oleh biaya-biaya pengobatan terhadap penyakit degeneratif (Aryastami, 2017).

Sebenarnya, telah banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menurunkan angka *stunting* di Indonesia. Hal ini terlihat dari turunnya prevalensi Balita *stunting* dari 37,2% pada tahun 2013 menjadi 30,8% pada tahun 2018. Prevalensi Balita *stunting* juga mengalami penurunan dari 32,8% pada tahun 2013 menjadi 29,9% pada tahun 2018 (Satriawan, 2018). Namun meski



demikian, penurunan angka tersebut masih jauh dari yang ditargetkan. Penurunan angka *stunting* hanya mencapai 4% antara tahun 1992 hingga 2013 (Aryastami, 2017).

Ironisnya, di hilir (level implementer program dan masyarakat), persoalan *stunting* seolah masih terdengar asing. Masih terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui perihal *stunting*, baik dari definisi, penyebab, dampak yang ditimbulkan hingga penanggulangan yang dapat dilakukan. Hal ini terlihat kontras sekali dengan kondisi di hulu, dimana pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan dan menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk program penanggulangan *stunting* yang tentu saja semestinya sampai dan dirasakan oleh masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji tentang hulu-hilir upaya penanggulangan *stunting* untuk kemudian dapat melihat *gap* antara keduanya, sehingga diharapkan dapat menemukan akar masalah yang menyebabkan upaya penanggulangan *stunting* yang diupayakan selama ini masih jauh dari yang ditargetkan.

KERANGKA TEORITIK

Stunting

Stunting merupakan salah satu target *Sustainable Development Goal* (SDGs) yang termasuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan ke-2 yaitu menghilangkan kelaparan dan segala bentuk malnutrisi pada tahun 2030 serta mencapai ketahanan pangan. Target yang ditetapkan adalah menurunkan angka *stunting* hingga 40% pada tahun 2025. Upaya penurunan *stunting* baik secara global maupun nasional, bukan tanpa alasan. Hal ini karena persoalan *stunting* erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dimasa mendatang.

Adapun dampak yang ditimbulkan *stunting* dapat dibagi menjadi dampak jangka pendek dan jangka panjang.

Dampak jangka pendek; peningkatan kejadian kesakitan dan kematian, perkembangan kognitif, motorik, dan verbal pada anak tidak optimal, peningkatan biaya kesehatan. Sedangkan dampak jangka panjang; postur tubuh yang tidak optimal saat dewasa (lebih pendek dibandingkan pada umumnya), meningkatnya resiko obesitas dan penyakit lainnya, menurunnya kesehatan reproduksi, kapasitas belajar dan performa yang kurang optimal saat masa sekolah, dan produktivitas dan kapasitas kerja yang tidak optimal (Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018).

Stunting disebabkan oleh faktor multi dimensi dan tidak hanya disebabkan oleh faktor gizi buruk yang dialami oleh ibu hamil maupun anak balita. Intervensi yang paling menentukan untuk dapat mengurangi prevalensi *stunting* oleh karenanya perlu dilakukan pada 1000 Hari Pertama kehidupan (HPK) dari anak balita. Beberapa faktor yang menjadi penyebab *stunting* adalah:

- 1) Praktek pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan.
- 2) Masih terbatasnya layanan kesehatan termasuk layanan ANC-Ante Natal Care (pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan) Post Natal Care dan pembelajaran dini yang berkualitas.
- 3) Masih kurangnya akses rumah tangga/keluarga ke makanan bergizi.
- 4) Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. (Kemiskinan, 2017)

Selain itu, faktor penyebab *stunting* lainnya; kondisi kesehatan dan gizi ibu sebelum dan saat kehamilan serta setelah persalinan, postur tubuh ibu (pendek), jarak kehamilan yang terlalu dekat, ibu yang terlalu muda, terlalu tua,

terlalu sering melahirkan, serta asupan nutrisi yang kurang pada saat kehamilan, tidak terlaksananya inisiasi menyusui dini (IMD), gagalnya pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, dan proses penyapihan dini, kuantitas, kualitas, dan keamanan pangan MPASI yang diberikan dapat menjadi salah satu faktor terjadinya *stunting* (Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018).

Kondisi sosial ekonomi dan sanitasi tempat tinggal juga berkaitan dengan terjadinya *stunting*. Kondisi ekonomi erat kaitannya dengan kemampuan dalam memenuhi asupan yang bergizi dan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan balita. Sedangkan sanitasi dan keamanan pangan dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit infeksi. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh *hygiene* dan sanitasi yang buruk (misalnya diare dan kecacingan) dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika Kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan maka dapat mengakibatkan *stunting* (Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018).

Namun demikian, anak kerdil yang terjadi di Indonesia sebenarnya tidak hanya dialami oleh rumah tangga/keluarga yang miskin dan kurang mampu saja, karena *stunting* juga dialami oleh rumah tangga/keluarga yang tidak miskin/yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi (10 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting), 2017).

Asupan zat gizi pada balita sangat penting dalam mendukung pertumbuhan sesuai dengan grafik pertumbuhannya agar tidak terjadi gagal tumbuh (*growth faltering*) yang dapat menyebabkan *stunting*. Untuk memenuhi kecukupan gizi

pada balita, telah ditetapkan program pemberian makan tambahan (PMT) khususnya untuk balita kurus berupa PMT lokal maupun PMT pabrikan yaitu biskuit MT balita. Jika berat badan telah sesuai dengan perhitungan berat badan menurut tinggi badan, maka MT balita kurus dapat dihentikan dan dilanjutkan dengan makanan keluarga gizi seimbang (Situasi Balita Pendek (Stunting) di Indonesia, 2018).

Kerangka Intervensi *Stunting* di Indonesia

Pada tahun 2012, Indonesia bergabung dalam sebuah gerakan yang dikenal dengan *scaling-up Nutrition* (SUN). SUN merupakan sebuah gerakan global yang diluncurkan dengan prinsip dasar bahwa semua penduduk berhak untuk memperoleh akses ke makanan yang cukup dan bergizi. Pemerintah Indonesia bergabung dalam gerakan tersebut melalui perancangan dua kerangka besar Intervensi *Stunting*. Di Indonesia, kebijakan *Scaling up Nutrition* telah diterjemahkan kedalam Gerakan Nasional Seribu Hari Pertama Kehidupan. Kerangka Intervensi *Stunting* tersebut kemudian diterjemahkan menjadi berbagai macam program yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga (K/L) terkait.

Kerangka Intervensi *Stunting* yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Intervensi Gizi Spesifik dan Intervensi Gizi Sensitif. Kerangka pertama adalah Intervensi Gizi Spesifik. Ini merupakan intervensi yang ditujukan kepada anak dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) dan berkontribusi pada 30% penurunan *stunting*. Kerangka kegiatan intervensi gizi spesifik umumnya dilakukan pada sektor kesehatan. Intervensi ini juga bersifat jangka pendek dimana hasilnya dapat dicatat dalam waktu relatif pendek. Kegiatan yang idealnya dilakukan untuk melaksanakan Intervensi Gizi Spesifik



dapat dibagi menjadi beberapa intervensi utama yang dimulai dari masa kehamilan ibu hingga melahirkan balita:

1. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Hamil.

Intervensi ini meliputi kegiatan memberikan makanan tambahan (PMT) pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi dan protein kronis, mengatasi kekurangan zat besi dan asam folat, mengatasi kekurangan iodium, menanggulangi kecacingan pada ibu hamil serta melindungi ibu hamil dari Malaria.

2. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 0-6 Bulan.

Intervensi ini dilakukan melalui beberapa kegiatan yang mendorong inisiasi menyusui dini/IMD terutama melalui pemberian ASI jolong/coloctrum serta mendorong pemberian ASI Eksklusif.

3. Intervensi Gizi Spesifik dengan sasaran Ibu Menyusui dan Anak Usia 7-23 bulan.

Intervensi ini meliputi kegiatan untuk mendorong penerusan pemberian ASI hingga anak/bayi berusia 23 bulan. Kemudian, setelah bayi berusia diatas 6 bulan didampingi oleh pemberian MP-ASI, menyediakan obat cacing, menyediakan suplemen zink, melakukan fortifikasi zat besi ke dalam makanan, memberikan perlindungan terhadap malaria, memberikan imunisasi lengkap, serta melakukan pencegahan dan pengobatan diare.

Kerangka Intervensi *Stunting* yang direncanakan oleh Pemerintah yang kedua adalah Intervensi Gizi Sensitif. Kerangka ini idealnya dilakukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dan berkontribusi pada 70% Intervensi *Stunting*. Sasaran dari intervensi gizi sensitif adalah masyarakat secara umum dan tidak khusus ibu hamil dan balita pada 1000 Hari Pertama Kehidupan/HPK. Kegiatan terkait Intervensi Gizi Sensitif dapat dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yang umumnya makro dan dilakukan secara lintas Kementerian dan Lembaga. Ada 12 kegiatan yang dapat berkontribusi pada penurunan *stunting* melalui Intervensi Gizi Sensitif sebagai berikut:

- 1) Menyediakan dan memastikan akses terhadap air bersih melalui program PAMSIMAS (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi berbasis Masyarakat). Menyediakan dan memastikan akses terhadap sanitasi melalui kebijakan
- 2) Melakukan fortifikasi bahan pangan
- 3) Menyediakan akses kepada layanan kesehatan dan Keluarga Berencana (KB)
- 4) Menyediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
- 5) Menyediakan Jaminan Persalinan Universal (Jampersal)
- 6) Memberikan pendidikan pengasuhan pada orang tua
- 7) Memberikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Universal
- 8) Memberikan pendidikan gizi masyarakat
- 9) Memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja

- 10) Menyediakan banyuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin
- 11) Meningkatkan ketahanan pangan dan gizi.

Kedua kerangka Intervensi *Stunting* diatas sudah direncanakan dan dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya nasional untuk mencegah dan mengurangi prevalensi *stunting*.

Kebijakan dan Program Terkait Intervensi *Stunting*

Terkait upaya untuk mengurangi serta menangani prevalensi *stunting*. Pemerintah di tingkat nasional telah mengeluarkan berbagai kebijakan serta regulasi yang diharapkan dapat berkontribusi pada pengurangan prevalensi *stunting*, termasuk diantaranya:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Pemerintah melalui program pembangunan nasional ‘Akses Universal Air Minum dan Sanitasi Tahun 2019’, menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang layak bagi 100% rakyat Indonesia).
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 (target penurunan prevalensi *stunting* menjadi 28% pada 2019).
- 3) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi 2011-2015, Bappenas, 2011
- 4) Undang-Undang (UU) No. 36/2009 tentang Kesehatan
- 5) Peraturan Pemerintah (PP) No. 33/2012 tentang Air Susu Ibu Eksklusif
- 6) Peraturan Presiden (Perpres) No. 42/2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi
- 7) Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) No. 450/Menkes/SK/IV/2004 tentang

- Pemberian Air Susu Ibu (ASI) Secara Eksklusif Pada Bayi di Indonesia
- 8) Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 15/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah Air Susu Ibu.
- 9) Permenkes No.3/2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- 10) Permenkes No.23/2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi
- 11) Kerangka Kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Gizi Dalam Rangka Seribu Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013.
- 12) Hari Pertama Kehidupan (Gerakan 1000 HPK), 2013

Selain mengeluarkan paket kebijakan dan regulasi. Kementerian/Lembaga (K/L) juga sebenarnya telah memiliki program baik terkait intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, yang potensial untuk menurunkan *stunting*. Intervensi Program Gizi Spesifik dilakukan oleh kementerian Kesehatan (Kemenkes) melalui Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) melalui Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) (10 Kabupaten/Koota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*), 2017).

Selain itu beberapa program lainnya adalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Balita Gizi Kurang Oleh Kementerian Kesehatan/Kemenkes melalui Puskesmas dan Posyandu. Program terkait meliputi pembinaan Posyandu dan penyuluhan serta penyediaan makanan pendukung gizi untuk balita kurang gizi usia 6-59 bulan berbasis pangan lokal (misalnya melalui Hari Makan Anak/HMA). Anggaran program berasal dari Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) -Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp.



200.000.000,- per tahun per Puskesmas di daerahnya masing-masing (10 Kabupaten/Koota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (Stunting), 2017).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen kebijakan dan arsip, wawancara mendalam dan diskusi kelompok terpumpun yang melibatkan para pemangku kepentingan di daerah, hingga implementer program di tingkat masyarakat. Analisis data dilakukan melalui analisis deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Upaya Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah

Saat ini, pemerintah telah mencanangkan program intervensi pencegahan stunting terintegrasi yang melibatkan lintas kementerian dan lembaga. Pada tahun 2018, ditetapkan 100 kabupaten di 34 provinsi sebagai lokasi penurunan stunting. Dengan adanya kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat menekan angka stunting di Indonesia sehingga dapat tercapai target *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2025 yaitu penurunan angka stunting hingga 40%.

Studi mengenai keberhasilan implementasi kebijakan penurunan masalah gizi melalui berbagai metode (*sistematik review*, kuantitatif riset, semi kualitatif *interview*, analisis pohon masalah) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penurunan masalah gizi secara global tidak mudah. Setidaknya terdapat delapan kelemahan variabel yang masih menjadi kendala, antara lain: masalah koordinasi yang sulit, strategi yang tidak cukup kuat, minat yang kurang dari *stakeholders*, jaringan antar *stakeholders* yang tidak kuat, masih

lemahnya *power* dalam merikat kebijakan, struktur dalam kolaborasi yang tidak sama, sumberdaya manusia yang terbatas, tidak terjaminnya ketersediaan anggaran (Morris SS, 2008).

Variabel yang teridentifikasi tersebut terkonfirmasi di lapangan, bahwa memang pada kenyataannya hal tersebut menjadi kendala dalam upaya percepatan penurunan *stunting* di daerah. Meskipun pemerintah telah banyak menerbitkan kebijakan-kebijakan terkait dengan upaya percepatan penurunan *stunting*, tetapi di level daerah ataupun masyarakat, hal tersebut seolah masih jauh panggang dari api. Kebijakan pada tataran hulu belum sepenuhnya terimplementasi pada tataran hilir, bahkan masih banyak ditemui implementer program di tingkat bawah yang masih belum paham mengenai *stunting* itu sendiri.

Salah satu program yang dijalankan dalam upaya percepatan penurunan stunting adalah Program Makanan Tambahan (PMT) untuk Balita dan Ibu Hamil. PMT balita diberikan pada kegiatan posyandu yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Biskuit PMT balita dibagikan secara rata kepada balita-balita yang hadir di Posyandu tanpa melihat status gizi yang dialami balita. Namun yang dirasa kurang efektif adalah partisipasi masyarakat pada kegiatan posyandu cukup rendah, terdapat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan posyandu berkisar

Percepatan penurunan stunting ke depan antara lain dapat dilakukan dengan mengatasi masalah berikut:

- a. Ibu hamil dan Balita yang belum mendapatkan Program Makanan Tambahan (PMT) masih cukup tinggi, masing-masing sekitar 74,8% dan 59%
- b. Proporsi anemia pada Ibu Hamil mengalami kenaikan dari 37,1% pada tahun 2013 menjadi 48,9% pada tahun 2018

Berbagai Kendala yang Dihadapi dalam Upaya Penurunan *Stunting*

Kendala Penyelenggaraan Percepatan Pencegahan *Stunting*:

- 1) Belum efektifnya program-program pencegahan
- 2) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi gizi spesifik dan sensitif di semua tingkatan, terkait dengan perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan, dan pemantauan dan evaluasi
- 3) Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana
- 4) Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program
- 5) Masih minimnya advokasi, kampanye, dan diseminasi terkait *stunting*, dan berbagai upaya pencegahannya.
- 6) Sumber daya manusia pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) yang kurang kreatif dan inovatif dalam membuat program-program terkait penanggulangan masalah *stunting* sehingga anggaran yang ada tidak terserap secara optimal. Hal ini berkaitan dengan kurangnya SDM pada Dinas Kesehatan dan tingginya beban kerja dan volume kerja sehingga SDM hanya berkuat pada pekerjaan-pekerjaan utamanya saja.

Masalah yang ditemukan di lapangan

1. Masih banyak masyarakat, terutama kaum ibu yang tidak paham mengenai *stunting*. Hal ini berkaitan dengan masih minimnya sosialisasi (secara massif) yang diberikan kepada ibu-ibu dan rumah tangga tentang *stunting*, faktor penyebabnya, dampak yang ditimbulkan, dan bagaimana penanggulangannya
2. Masih terdapat banyak stakeholder dan tenaga kesehatan yang belum

- memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting*
3. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan posyandu
 4. Pemberian PMT yang terkadang tidak tepat sasaran
 5. Jenis biskuit PMT bumil yang rasanya tidak disenangi bumil sehingga tidak termanfaatkan dengan baik
 6. Tablet Tambah Darah (TTD) menimbulkan mual sehingga tidak optimal dalam pemanfaatannya
 7. Tidak ada pengukuran tinggi badan di posyandu yang menyebabkan anak-anak *stunting* tidak terdeteksi sehingga tidak segera mendapatkan penanganan
 8. Percepatan penanggulangan permasalahan *stunting* tidak dapat hanya ditangani oleh pihak dinas kesehatan saja, sebab perlu kerjasama lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan *stunting* ini. Kerjasama lintas sektor masih dinilai kurang.
 9. Persepsi masyarakat bahwa *stunting* merupakan faktor keturunan dan dianggap sebagai hal yang biasa saja merupakan sebuah kendala tersendiri dalam upaya percepatan penanggulangan *stunting*

SIMPULAN

Persoalan *stunting* adalah isu yang sangat mendesak untuk segera ditangani secara serius karena menyangkut kualitas sumber daya manusia Indonesia di masa depan dan sangat memengaruhi eksistensi negara. Di level kebijakan, pemerintah telah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan program-program terkait upaya percepatan penanggulangan *stunting* dan disertai dengan anggaran yang cukup besar. Namun disatu sisi, di level masyarakat upaya percepatan penurunan *stunting* yang digadang-gadang



tersebut belum dirasakan manfaatnya secara optimal. Bahkan, masih ditemukan implementer program di tingkat masyarakat yang belum memiliki pemahaman yang baik tentang *stunting* itu sendiri. Terlebih lagi di masyarakat, masih banyak sekali masyarakat yang asing mendengar istilah *stunting*. Hal ini menjadi persoalan tersendiri sebab anak *stunting* menjadi sulit terdeteksi karena tidak disadari. Maka, salah satu strategi utama yang perlu dilakukan adalah dengan mengkampanyekan isu *stunting* secara komprehensif dan massif, baik melalui media masa, maupun melalui komunikasi dan sosialisasi kepada keluarga, terutama kaum perempuan (ibu dan calon ibu), serta melakukan advokasi secara berkelanjutan.

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia, Edisi 1 Semester 1 Tahun 2018 (Buletin Jendela Data dan Informasi Kesehatan 2018).

DAFTAR PUSTAKA

10 Kabupaten/Koota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*) (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan 2017).

Aryastami, N. K. (2017). Kajian Kebijakan dan Penanggulangan Masalah Gizi *Stunting* di Indonesia. *Buletin Penelitian Kesehatan* 45 (4), 233-240.

Kemiskinan, T. N. (2017). *100 Kabupaten/Kota Prioritas untuk Intervensi Anak Kerdil (stunting)*. Jakarta: TNP2K.

Morris SS, C. B. (2008, January 17). Effective International Action Against Undernutrition: Why Has it Proven So Difficult and What Can Be Done to Accerate Progress. *Maternal and Child. The Lancet*.

Satriawan, E. (2018). *Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Stunting 2018-2024*. Jakarta: Tim Nasional





Kerjasama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dengan Pemerintah Kota Beijing China Dalam Skema Sister City

Henike Primawanti¹; Windy Dermawan²; Widiya Ardiyanti²

¹Program Studi Hubungan Internasional Universitas Al-Ghifari, Bandung.

²Program Studi Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Bandung.

Email: henikeprimawanti22@gmail.com.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan hubungan luar negeri melalui kerjasama transgovernmental dalam skema sister city, khususnya antara pemerintah provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah Kota Beijing Cina. Untuk mencapai tujuan tersebut, peneliti mengangkat kasus kerjasama di bidang pendidikan diantara kedua organisasi pemerintah tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan dan teknik studi dokumentasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kerjasama transgovernmental dalam kerangka sister city. Penelitian ini menemukan bahwa kerjasama luar negeri oleh pemerintah daerah menjadi peluang besar dalam upaya pembangunan daerah. Melalui skema sister city, pemerintah provinsi DKI Jakarta dan pemerintah Kota Beijing mendapatkan manfaat yang besar bagi pembangunan daerah dan hubungan bilateral yang baik diantara kedua aktor tersebut, bahkan membawa manfaat bagi hubungan bilateral antara Indonesia dan Republik Rakyat Cina pasca era reformasi. Sister City menjadi instrumen bagi pemerintah DKI Jakarta untuk mencapai kepentingandaerahnya yang tentu sejalan dengan kepentingan nasional.

Kata Kunci: Transgovernmental; Pemerintah Daerah; Sister city; Pembangunan daerah.

Abstract

This study aims to analyze the opportunities and challenges of foreign relations through transgovernmental cooperation in the sister city scheme, especially between the DKI Jakarta provincial government and the Beijing City Government of China. To achieve this goal, the researcher raised the case of cooperation in the field of education among the two government organizations. The research method used in this study is a qualitative method by collecting data through interviewing a number of relevant informants and documentation study techniques. The approach used in this research is transgovernmental cooperation within the framework of sister city. This study found that foreign cooperation by local governments became a great opportunity in regional development efforts. Through the sister city scheme, the provincial government of DKI Jakarta and the city of Beijing get great benefits for regional development and good bilateral relations between the two actors, even bringing benefits to bilateral relations between Indonesia and the People's Republic of China after the reformation era. Sister City is an instrument for the DKI Jakarta government to achieve its regional interests which is certainly in line with national interests.

Keywords: *Transgovernmental; local government; sister city; local development.*

Info Artikel

Dikirim: Jul 23, 2019

Diterima: Jul 24, 2019

Dipublikasi: Jul 31, 2019

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri secara tradisional merupakan domain dari pemerintah pusat dari sebuah negara, tetapi seiring dengan berlangsungnya era globalisasi tidak mungkin jika hanya ada satu pihak saja yang memegang kewenangan dalam menjalankan politik luar negeri (Duchachek, 1985). Kompleksitas hubungan internasional menghendaki pergeseran ini, karena pemerintah pusat tidak lagi cukup memiliki kapasitas untuk mengatasinya. Meskipun demikian kaum Realis masih bersikukuh bahwa negara adalah satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, sementara varian-varian Realisme lainnya meskipun melihat kemungkinan keterlibatan aktor nonnegara, namun hal itu masih dalam koridor kepentingan aktor negara.

Meningkatnya arus globalisasi yang disertai dengan meningkatnya interaksi dan kerjasama antarnegara, secara langsung telah meningkatkan pula aktivitas kegiatan kerjasama luar negeri pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Di era globalisasi yang kerap mengondisikan seluruh negara terus bergerak maju, dan menuntut pada peningkatan segmentasi yang cepat diberbagai bidang, telah mendorong suatu negara mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Namun, dalam praktiknya, kerjasama yang terjadi adalah salah satu bentuk nyata dari sebuah diplomasi antarnegara (Bappenas, 2006)

Pemerintah Indonesia seyogianya dapat mengarahkan perhatiannya yang lebih besar terhadap kerjasama yang dijalin melalui *sister city/province* di Indonesia, dengan memperkuat aspek yuridis formal dan menciptakan suasana kondusif melalui bimbingan agar kegiatan tersebut benar-benar bermanfaat dalam upaya mendorong percepatan pembangunan daerah di Indonesia (Jakarta, 2012)

Konsep dan praktek *sister province* atau di tingkat kabupaten/kota disebut sebagai *sister city* di beberapa negara yang bercorak sistem pemerintahan federal telah lama dikenal dan dilaksanakan. Sistem federal memberi keleluasaan kepada *subnational governments* (di Indonesia dapat disetarakan dengan pemerintah daerah) untuk melaksanakan aktifitas hubungan internasional atau hubungan luar negeri (*foreign relations*). Sedangkan di Indonesia praktek serupa baru mengemuka setelah era otonomi daerah berlaku, yang dimulai dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada umumnya praktek kerjasama antara pemerintah daerah di Indonesia dengan mitranya di luar negeri ditujukan dalam kerangka otonomi daerah yang memicu daerah untuk mengembangkan kapasitasnya secara mandiri. Tentu hal ini menjadi ironis jika disandingkan dengan kenyataan bahwa urusan luar negeri, bersama lima urusan lainnya masih merupakan domain dari pemerintah pusat. Apakah fenomena ini justru tidak berseberangan dengan kepentingan nasional Republik Indonesia yang secara kelembagaan *leading sector*-nya adalah Kementerian Luar Negeri. Pertanyaan ini menarik minat peneliti untuk meneliti tentang praktek kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia dengan mitranya di luar negeri dalam kerangka diplomasi dan kepentingan nasional Republik Indonesia.

Indonesia memiliki hubungan kerjasama internasional yang cukup baik dengan Republik Rakyat Tiongkok, meskipun Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok memiliki sejarah konflik antara minoritas Cina dan Muslim mayoritas. Pada masa pemerintahan Suharto (1965-



1998), eksistensi kebudayaan Cina, mencakup sekolah-sekolah Cina, buku-buku dan bahkan perayaan Tahun Baru Cina dilarang. Bahkan etnis Tionghoa sangat dianjurkan untuk mengadopsi nama Indonesia. Namun, pada saat ini banyaknya anak muda Indonesia yang meninggalkan perselisihan etnis tersebut dan belajar Bahasa Mandarin untuk mengambil segala keuntungan dari *booming* ekonomi China (Tsai, 2010).

Hubungan kerjasama *Sister City* DKI Jakarta-Beijing telah terjalin sejak ditandatanganinya MoU tahun 1992. Sejak ditandatanganinya MoU antara kedua kota Jakarta-Beijing, sejumlah bidang yang disepakati dalam melakukan kerjasama meliputi bidang ekonomi, pendidikan, olahraga, manajemen pemerintahan, kepemudaan, budaya dan seni. Dalam pelaksanaannya dapat dilihat bahwa kerjasama antara kedua kota tersebut berjalan dengan aktif terbukti hingga pada saat ini sejumlah program yang berjalan setiap tahunnya dari beberapa bidang yang telah disepakati oleh Jakarta-Beijing.

Praktek kerjasama telah terlaksana antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah provinsi negara lain. Fenomena ini didukung oleh pelaksanaan otonomi daerah dimana kewenangan daerah semakin luas. Bahkan ada kecenderungan menguatnya otonomi daerah di satu pihak pada saat yang sama menurunkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hingga saat ini, urusan pemerintah yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah diantaranya adalah masalah luar negeri atau politik luar negeri dan ekonomi makro, sehingga fenomena ini menarik untuk dikaji.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan hasil penelitian ilmiah yang menggunakan

pendekatan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terhadap sejumlah informan yang relevan, diantaranya yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan akademisi yang hirau terhadap isu ini. Selain itu, pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengumpulkan dokumen resmi pemerintah, artikel jurnal, buku, dan sebagainya. Triangulasi data dilakukan agar mendapatkan data yang valid sehingga dapat menunjang dalam proses penulisan laporan dan penarikan simpulan.

PEMBAHASAN

Pendekatan Penelitian

Tulisan ini menggunakan pendekatan tiga teori/konsep, diantaranya yaitu Liberalisme, kerjasama transgovernmental, dan *sister city*. Ketiga teori/konsep tersebut dijelaskan berikut ini. Liberalisme sebagai salah satu teori besar dalam hubungan internasional, dimana liberalisme mempunyai dua prinsip utama dalam pelaksanaannya yaitu individualisme dan kebebasan.

Pertama, liberalisme menempatkan individu di jantung masyarakat dan liberalisme ini menanamkan bahwa nilai tertinggi dari tatanan sosial adalah salah satu yang dibangun pada individu. Kedua, tujuan masyarakat adalah untuk memungkinkan individu dalam mencapai potensi penuh mereka, dimana cara terbaik dalam hal tersebut adalah dengan memberikan hak-hak kepada tiap individu dengan kebebasan (Chau, 2009)

.Asumsi dasar dari teori liberalisme yaitu suatu pandangan positif mengenai sifat dasar manusia yang cenderung baik dan bersifat kooperatif di dalam mencapai tujuan. Ketika teori liberalisme diaktualisasikan dalam konteks negara, maka sifat tersebut melekat karena dipengaruhi oleh manusia



sebagai salah satu unsur pembentuk negara (MacDonald, 2013)

Liberalisme menyatakan mengenai keterlibatan aktor selain negara dalam kerjasama dan interaksi dalam hubungan internasional, seperti aktor transnasional bagaimana suatu aktor transnasional menjadi suatu entitas penting dalam politik dunia, organisasi internasional, perusahaan multinasional (MNC) dan kelompok-kelompok lingkungan lainnya yang dapat menjadi peran penting dalam politik dunia (Viotti, 2012). Selain itu liberalisme menjelaskan bentuk ekonomi atau bidang lainnya saling memiliki ketergantungan antara aktor negara maupun non-negara namun tidak hanya dari hubungan ekonomi, tetapi juga sosial, budaya, dan politik atau transnasional, literatur tentang saling ketergantungan mengalir ke diskusi tentang proses globalisasi.

Liberalisme juga menjelaskan agenda politik internasional yang cukup luas dan dimana liberalisme menolak gagasan bahwa agenda politik internasional hanya didominasi oleh isu-isu militer - keamanan. Karena pada dasarnya tidak ada perbedaan antara *high politics* dan *low politics* dan dapat dikatakan bahwa isu-isu ekonomi, sosial, dan lingkungan juga penting dalam hubungan internasional dengan keterlibatan berbagai isu dalam hubungan internasional menjadikan banyak manfaat yang didapat oleh negara dengan kata lain bahwa kerjasama atau interaksi yang dilakukan oleh negara adalah suatu interaksi saling membutuhkan dengan tujuan untuk kepentingan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama (Viotti, 2012).

Teori hubungan internasional memiliki fokus yang cukup luas dimana berfokus pada negara sebagai unit utama dalam analisis. Negara adalah aktor kesatuan yang menghadapi dunia luar sebagai unit terpadu dan berbicara dengan

satu suara dalam interaksinya dengan negara lainnya. Dalam kerjasama internasional pada saat ini bukan lagi dilakukan hanya aktor negara saja melainkan adanya kontribusi dari aktor-aktor lain dalam negara, salah satunya adalah bentuk kerjasama *Transgovernmental*.

Kerjasama *transgovernmental* dapat dikatakan sebagai suatu kerjasama yang melibatkan aktor-aktor *sub-state* dalam suatu negara. Bentuk kerjasama *transgovernmental* ditandai oleh hubungan yang teratur antara unit pemerintah daerah/ kota/ provinsi yang bekerja melintasi perbatasan yang membagi negara dari satu sama lain. Begitupun pengaruh dari globalisasi dalam pendekatan *transgovernmental*, dimana dunia telah membentuk tatanan dunia baru yang begitu kompleks. Dimana suatu tren dalam politik dunia dengan meningkatnya suatu peran dari aktor non-negara (Milner, 2009).

Ada beberapa alasan yang menyebabkan pemerintah lokal atau pemerintah daerah terlibat dalam hubungan Internasional (Keating, 1999), antara lain sebagai berikut: perubahan dalam sistem internasional yang mengubah level negara sebagai bukan satu-satunya aktor dalam hubungan internasional, perubahan dalam pembangunan ekonomi dan politik dalam kawasan. Merujuk kepada pendapat Keating, munculnya globalisasi dan rejim-rejim transnasional menyebabkan perbedaan antara masalah-masalah luar negeri dengan domestik menjadi sulit dikenali. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan dalam distribusi tanggung jawab diantara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan urusan-urusan luar negeri.

Keterlibatan pemerintah daerah sebagai bagian dari *transgovernmental relations*, untuk menunjukkan interaksi langsung antara lembaga/subunit



pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dari pemerintah/negara yang berbeda di mana badan-badan bertindak relatif otonom dari kontrol pemerintah pusat. Sementara pola *transnational relations* menunjukkan interaksi yang melintasi batas-batas negara dengan setidaknya melibatkan sebuah aktor non-negara.

Sister City dapat didefinisikan sebagai suatu kerjasama yang strategis dalam kurun waktu tertentu yang panjang antara masyarakat dan pemerintah lokal dari dua negara berbeda yang dapat menciptakan suatu pemahaman internasional dan perdamaian di tingkat lokal (O'Toole, 2001, 55 (3)). *Sister city* juga merupakan suatu konsep dimana penggandengan antara dua kota yang berbeda lokasi dan administrasi namun memiliki beberapa kesamaan yang tujuannya menjalin hubungan kerjasama baik dalam bidang budaya, sosial, ekonomi, pendidikan maupun dalam bidang lainnya.

Sister city juga dapat dikatakan sebagai suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara pemerintah kabupaten/kota dengan pemerintah kabupaten/kota atau yang setingkat di luar negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan bersama. Kerjasama *sister city* berfungsi untuk mengatasi berbagai masalah dengan meningkatkan hubungan bilateral maupun multilateral dengan memanfaatkan percepatan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi maupun informasi (International, 2014).

Hubungan dalam kerjasama *sister city* merupakan hubungan dalam program *sister city* yang kuat tidak hanya untuk sebagai mesin diplomasi dan pembangunan perdamaian, tetapi juga pembangunan ekonomi dan investasi. *Sister city* juga merupakan suatu hubungan mengenai masyarakat kemitraan termasuk pertukaran mahasiswa, pariwisata, pertukaran kota,

dan pengembangan bisnis tradisional dan perdagangan karena hubungan yang mendalam dan abadi dibangun karena kemitraan *sister city* (International, 2014).

Di Indonesia terdapat beberapa pemerintah provinsi yang telah menandatangani perjanjian kerjasama dengan pemerintah provinsi dari negara lain yang dinamai sebagai *Sister province*. Pembentukan *sister province* atau *sister city* diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 tahun 2008, khususnya pada pasal 5. Dalam pasal ini disebutkan bahwa jika ada daerah yang hendak mengadakan kerjasama *sister city/province* dengan daerah lain baik internal maupun lintas negara, maka harus memperhatikan lima hal yaitu:

- a. Kesetaraan Status Administrasi
- b. Kesamaan Karakteristik
- c. Kesamaan Permasalahan
- d. Upaya Saling Melengkapi; dan
- e. Peningkatan Hubungan Kerjasama

Selain itu, dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 03 Tahun 2008 diberikan penegasan bahwa sebelum menjalin sebuah kerjasama *sister city/province*, pemerintah daerah setempat harus memenuhi berbagai persyaratan:

- a. Hubungan Diplomatik. Daerah yang diajak kerjasama harus memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia.
- b. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pertemuan antar perwakilan daerah tidak bersifat diplomatik tetapi hanya berupa pendelegasian.
- c. Merupakan Urusan Pemerintah Daerah. Segala permasalahan dan perjanjian yang dilakukan selama program *sister city/province* menjadi tanggung jawab setiap pemerintah daerah yang terlibat.
- d. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri.



e. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Kerjasama *sister city/province* tidak boleh dilaksanakan secara insidental.

Batasan Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

Hubungan atau kerjasama luar negeri dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri¹ adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kerjasama yang dibangun harus didasarkan pada rencana kerjasama yang jelas sebelum kerjasama tersebut dilakukan. Rencana Kerjasama adalah usulan tertulis yang memuat rencana program/proyek/kegiatan yang akan dikerjakasikan oleh Pemda dengan Pihak Luar Negeri.

Pihak Luar Negeri yang dapat dijadikan mitra oleh Pemda untuk melakukan kerjasama dalam perspektif Kementerian Dalam Negeri adalah aktor-aktor yang meliputi Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/ Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga swadaya masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan pihak-pihak swasta di luar negeri.

Sebelum melakukan kerjasama, Pemda dan Pihak Luar Negeri harus membangun *Memorandum of Understanding* (MoU) terlebih dahulu yang mana MoU tersebut kemudian menjadi dasar atau landasan-landasan aktivitas yang dilaksanakan selama proses

kerjasama berlangsung. Dalam MoU harus ditentukan bentuk kerjasama yang akan diselenggarakannya apa dan diberi nama tertentu.

MoU ditandatangani oleh Pemda dan Pihak Luar Negeri pelaksana hubungan atau kerjasama luar negeri. Isi dari MoU atau perjanjian tersebut meliputi kedudukan Pemda dan Pihak Luar Negeri dalam proses kerjasama, obyek kerjasama, tanggungjawab para pihak dalam kerjasama, penyelesaian sengketa kerjasama, serta hak dan kewajiban hukum para pihak yang bekerja sama. MoU yang dipergunakan oleh Pemda dan Pihak Luar Negeri tersebut tergolong ke dalam Perjanjian Internasional yang diakui keabsahannya oleh Kementerian Dalam Negeri.

Kementerian Dalam Negeri sangat mendorong bahkan mendukung setiap kerjasama Pemda dengan Pihak Luar Negeri. Namun, Kerjasama tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan perekonomian, menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan keberlanjutan lingkungan, mendukung pengarusutamaan gender; dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan..

Diberlakukannya aturan-aturan yang mengatur mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri, maka dapat dikatakan bahwa pemerintah pusat pun membutuhkan peran dari pemerintah daerah. Terkait hal tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Pemda dalam melakukan hubungan atau kerjasama luar negeri, yakni:

1. Kerjasama yang dilakukan merupakan kegiatan pelengkap dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam arti, bukan bidang

¹Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri.



yang utama bahkan krusial sebagai satu-satunya pendapatan Pemda tersebut. Misalnya, investasi asing dalam bidang pertambangan seperti pengelolaan blok panas bumi, harus dipertimbangkan proporsi investor asing dalam pengelolaannya. Meskipun investor asing memiliki modal serta teknologi yang mendukung mereka untuk mengelola atau memiliki saham, tetapi diusahakan proporsi mereka tidak terlalu besar. Hanya saja, banyak investasi sector krusial seperti pertambangan, justru pengelolaan atau sahamnya dimiliki oleh investor asing dengan proporsi yang besar.

2. Dilakukan dengan pihak luar negeri (baik pemerintah negara maupun non negara) yang sudah mempunyai hubungan diplomatik dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut untuk meminimaisir permasalahan atau sengketa dalam perjanjian karena masih dalam cakupan hubungan bilateral antar negara. Hubungan atau kerjasama luar negeri dibangun berdasarkan kesepakatan antara Pemda dengan Pihak Luar Negeri.
3. Hubungan kerjasama daerah dengan pihak luar negeri bukan urusan lima bidang khusus. Bidang yang diperkenankan yaitu penanaman modal investasi asing, kerjasama pendidikan (seperti pertukaran pelajar, dosen, seminar bersama, dan lainnya), kerjasama budaya (pameran seni, pagelaran budaya, dan lainnya), kerjasama pembangunan infrastruktur publik, kerjasama pengembangan sumber daya manusia (seperti pelatihan-pelatihan, kerjasama pemberian beasiswa, dan lainnya).
4. Tidak membuka kantor perwakilan di luar negeri. Pemda tidak diperkenankan membuka kantor perwakilan sendiri di luar negeri yang ditujukan untuk kepentingan

administratif sekali pun. Karena Pemda merupakan aktor bagian dari pemerintah Indonesia dan akan dipandang sebagai aktor manunggal ketika melakukan aktivitas di luar negeri. Sehingga kebijakan atau aktivitas Pemda akan dianggap sebagai aktivitas seluruh bangsa Indonesia. Ketika Pemda membuka kantor di luar resmi, misalnya seperti membuka kantor cabang dalam urusan bisnis tertentu atau pusat budaya tertentu, maka hal itu dapat dipandang sebagai kantor perwakilan resmi Indonesia.

5. Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri. Kedaulatan NKRI merupakan hal utama yang harus diperhatikan oleh Pemda dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri. Dalam arti, Pemda sekali-kali tidak membuka peluang bekerja sama dengan pihak yang akan merongrong wilayah NKRI serta harus menyadari aktivitas-aktivitas laten yang memungkinkan ke arah ancaman terhadap kedaulatan NKRI. Misalnya, kegiatan-kegiatan LSM internasional atau pergerakan buruh internasional, atau kegiatan jual beli senjata, atau kegiatan media yang mempunyai indikasi atau mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri Indonesia dengan aktivitas di daerah.
6. Sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan. Diutamakan sektor-sektor yang akan dikembangkan oleh Pemda dalam kerjasama luar negeri merupakan sektor-sektor yang menjadi konsern pemerintah pusat dan sesuai dengan kebijakan dan rencana pembangunan pemerintah pusat. Misalnya, pengembangan pariwisata, investasi yang mampu membuka lapangan kerja yang besar untuk warga setempat, dan tidak



dalam aspek politik, keamanan dan pertahanan.

7. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dialihkan. Kemendagri sangat mendukung kerjasama dengan pihak luar negeri dalam bidang yang mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia penduduk Indonesia. Yakni diupayakan kerjasama yang mampu melakukan transfer atau alih teknologi. Sehingga penduduk Indonesia mampu menjadi cerdas dan terampil dengan adanya kerjasama luar negeri dan tidak hanya dieksploitasi saja tenaganya dalam bentuk kerja dengan waktu kerja yang panjang.

Bentuk-bentuk kerjasama Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan oleh Pemda adalah kerjasama provinsi dan kabupaten/kota “kembar”, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penyertaan modal; dan kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk Kerjasama *sister city* atau *kota kembar* yang diadakan Pemda Provinsi dan/atau Kabupaten/ Kota “kembar”, selain persyaratan yang telah dikemukakan di atas, terdapat beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh Pemda, yakni kesetaraan status administrasi; kesamaan karakteristik; kesamaan permasalahan; upaya saling melengkapi; dan peningkatan hubungan antar masyarakat.

Sementara untuk kerjasama yang bersifat teknis, seperti bantuan kemanusiaan, selain persyaratan umum seperti yang telah dikemukakan di atas, maka Pemda harus pula memperhatikan persyaratan-persyaratan lain, seperti peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kemampuan keuangan daerah, prioritas

produksi dalam negeri dan kemandirian daerah.

Kerjasama Bilateral Indonesia-Cina

Hubungan diplomatik sejak tanggal 13 April 1950, hubungan antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok sempat renggang ketika dilakukan pembekuan hubungan diplomatic Republik Indonesia – Republik Rakyat Tiongkok tahun 1965, setelah terjadinya Peristiwa G30S/PKI yang diduga melibatkan Partai Komunis Tiongkok. Hubungan bilateral antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok mulai mereda pada tahun 1980.

Setelah itu pada tanggal 8 Agustus, Menteri Luar Negeri Tiongkok dan Indonesia atas nama pemerintah masing-masing, menandatangani *Memorandum of Understanding* pada Kembalinya hubungan kerjasama diplomatik. Kedua belah pihak menyatakan dimulainya kembali hubungan formal dari hubungan diplomatik antara Tiongkok dan Indonesia (Embassy, 2004).

Hubungan bilateral berkembang terus sejak dimulainya kembali hubungan diplomatik kedua negara. Dimulainya kembali hubungan diplomatik kedua negara memberikan dukungan untuk menghilangkan pembatasan yang sebelumnya menghambat hubungan antara kedua negara.

Dua Kementerian Luar Negeri mendirikan mekanisme konsultasi dan telah diadakan 5 putaran konsultasi dari tahun 1999. Beberapa tahun terakhir terdapat pendalaman konstan kerjasama ekonomi dan perdagangan dan peningkatan volume perdagangan pertahun. Selain itu kerjasama dibidang lainpun sedang berlangsung. Indonesia dan Tiongkok telah mempertahankan koordinasi yang baik dan kerjasama dalam urusan internasional dan regional (Sriyanto, 2015)



Kemudian, selain dalam bidang politik dan ekonomi, Indonesia dan Tiongkok juga menjalin kerjasama dalam bidang budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, kesehatan, urusan militer, agama, pariwisata, komunikasi, pertanian dan kehutanan antara Tiongkok dan Indonesia telah dikembangkan lebih lanjut setelah pembukaan kembali hubungan diplomatik mereka. Kedua belah pihak menandatangani serangkaian dokumen untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama di bidang tersebut (NN, 2016).

Pada tahun 2013, hubungan bilateral antara Republik Rakyat Cina dan Republik Indonesia terus mempertahankan momentum suara pengembangan dengan hasil positif yang dicapai dalam kerja sama praktis di berbagai bidang. Indonesia dan Tiongkok memiliki pertukaran tingkat tinggi yang cukup sering. Pada bulan Oktober, Presiden Xi Jinping mengadakan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Kedua negara mengeluarkan Arah Masa Depan Tiongkok-Indonesia Comprehensive Partnership Strategis. Presiden Xi Jinping dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama-sama mengumumkan keputusan mereka untuk meningkatkan hubungan bilateral kemitraan strategis yang komprehensif dan menyepakati penandatanganan dokumen kerjasama di bidang ekonomi, perdagangan, keuangan, perikanan, ruang dan pariwisata bidang serta memperluas dalam bidang pertahanan, kerjasama maritim (Embassy, 2004)

Pada tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok membicarakan mengenai peningkatan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut dengan menekankan pentingnya mengembangkan ekonomi kelautan dengan mengembangkan visi hubungan tidak hanya terjalin antara kedua negara tetapi

juga melengkapi satu sama lain yang tercermin melalui kegiatan bisnis ditingkatkan dan *people to people contact* antara kedua negara.

Dengan latar belakang tersebut, Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Guangzhou akan mengadakan simposium, bertema, "Refleksi 2016 dan Proyeksi 2017: Hubungan Bilateral Indonesia-Tiongkok (Fujian, Guangdong, Guangxi dan Hainan) di Cina Hotel, Guangzhou, Guangdong pada tanggal 20 Januari 2017. Simposium tersebut berisikan mengenai hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok. Simposium tersebut dihadiri beberapa pihak perwakilan dari kementerian luar negeri Indonesia dan Tiongkok.

Simposium ini dirancang untuk memetakan, mengidentifikasi dan mengevaluasi prestasi dari hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok (Fujian, Guangdong, Guangxi dan Hainan) pada tahun 2016, khususnya di sektor sosial, budaya, dan ekonomi. Forum ini juga dirancang untuk menghasilkan rekomendasi praktis dalam meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Tiongkok di masa depan.

Sister City sebagai Kerangka Kerjasama DKI Jakarta-Kota Beijing Cina

Kerjasama *sister city* Jakarta-Beijing telah terjalin sejak tanggal 4 Agustus 1992 melalui penandatanganan *momerandum of understanding* di Jakarta. Dalam penandatanganannya, bidang-bidang kerjasama yang disepakati antara Jakarta dan Beijing sebagaimana tercantum dalam *momerandum of understanding* adalah administrasi kota, olahraga, kebudayaan, manajemen pariwisata, kesehatan umum serta industri skala kecil dan menengah.

Sebagai implementasi dari penandatanganan *momerandum of understanding* tersebut kedua kota telah



banyak melakukan program pertukaran diantaranya pengiriman pohon persahabatan dari Beijing ke Jakarta yang ditanam di kawasan Monas, bantuan obat-obatan kepada korban banjir di Jakarta, partisipasi Beijing dalam *JakartaSister City Basketball Tournament*, pengiriman atlet dari Jakarta ke Beijing cabang olahraga senam, tenis meja, bola basket, tukar menukar pengalaman bidang manajemen kepegawaian, pengelolaan lingkungan dan pertukaran kunjungan DPRD kedua kota.

Kerjasama *Sister City* Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing yang berlangsung sejak ditandatanganinya MoU telah memberikan manfaat yang konkrit bagi masyarakat dan aparatur pemerintah kedua kota. Bahkan, kerjasamasister city antara DKI Jakarta – Beijing turut menyumbang kontribusi yang positif dalam rangka mengisi hubungan bilateral Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok.

Sesuai dengan masa berlakunya *momerandum of understanding* kerjasama *sister city* DKI Jakarta – Beijing perjanjian akan diperbaharui setiap tiga tahun dan akan diperpanjang dengan bagaimana kesepakatan antara kedua negara dalam melakukan kerjasama. Sejak tahun 1995, telah dilakukan perpanjangan kerjasama melalui nota diplomatik dan kesepakatan kedua pemimpin kota.

Hubungan kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Beijing dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat dikatakan sebagai suatu bentuk nyata dari kerjasama *transgovernmental*. Hubungan kerjasama *sister city* antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing adalah suatu pola dari hubungan yang teratur antara unit pemerintah daerah/kota/provinsi yang bekerja melintasi perbatasan yang membagi negara dari satu sama lain. DKI Jakarta

sebagai Pemerintah Provinsi Ibukota Negara mengimplementasikan segala upaya pemanfaatan potensi dan sumber kekayaan negara sebagai penunjang keberlanjutan perkembangan.

Adanya suatu koordinasi yang terfokus pada pelaksanaan negara dan komponen masyarakat menjadikan DKI Jakarta sebagai peran serta fungsi Pemerintah Provinsi Ibukota Negara. Salah satu upaya yang dilakukan dalam pemerataan disegala bidang yaitu mampu mendayagunakan sumber alam dan partisipasi dalam pelaksanaan kerjasama dengan berbagai pihak di luar negeri guna untuk memanfaatkan suatu program bantuan yang mana termasuk program peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Hubungan kerjasama *sister city* yang terjalin antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing berjalan begitu aktif. Berbagai program yang dilakukan oleh kedua kota tersebut terlaksana. Selain itu manfaat yang didapat dalam kerjasama kedua kota tersebut juga dapat dilihat dengan jelas. Dalam buku Viotti & Kauppi yang berjudul *International Relations Theory* juga dijelaskan bahwa pada dasarnya dalam hubungan internasional dengan keterlibatan berbagai isu dan berbagai aktor menjadikan banyak manfaat yang didapat oleh negara. kerjasama atau interaksi yang dilakukan oleh negara adalah suatu interaksi saling membutuhkan dengan tujuan untuk kepentingan kedua belah pihak yang melakukan kerjasama. Keanekaragaman sejarah dan budaya yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta membuat ketertarikan sendiri untuk Pemerintah Kota Beijing dalam memilih Provinsi DKI Jakarta sebagai mitra hubungan kerjasama *sister city*.



Sister City DKI Jakarta-Beijing di Bidang Pendidikan

Salah satu program kerjasama *Sister City* Jakarta – Beijing dalam bidang pendidikan dan pelatihan yang mana kegiatan tersebut diwujudkan dalam sebuah kegiatan yaitu “*Beijing’s Training Workshop for International Chinese-Language Teachers*”. Program tersebut merupakan acara tahunan yang diselenggarakan sebagai bentuk kerjasama kemitraan yang bersifat kontinuitas. Acara pelatihan tersebut yang diikuti oleh *International Relations Officer* dimana kegiatan tersebut juga ditujukan untuk pelatihan bagi Guru Bahasa Mandarin dengan tenaga ahli dari *Sister City* Beijing. Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta turut serta mendukung acara tersebut dimana Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta ikut mengirimkan perwakilan dalam acara tersebut mengingat permasalahan yang ada pada saat ini dalam kurangnya guru Bahasa Mandarin dan kurangnya kualitas Guru Bahasa Mandarin.

Manfaat yang didapat oleh DKI Jakarta, jika dilihat dari sisi Pemerintah Kota Beijing yaitu program pelatihan untuk guru bahasa mandarin Pemerintah Kota Beijing memperluas *soft power* yang di miliki Beijing dengan menyebar luas kan mengenai budaya yang ada di Tiongkok ke mitra kerjasama *sister city*.

Kerjasama bidang pendidikan, memang belum sepenuhnya sesuai yang diharapkan. Sebagai gambaran, DKI Jakarta lebih banyak belajar bahasa dan budaya Tiongkok, dibandingkan Beijing ke DKI Jakarta untuk belajar bahasa dan budaya Indonesia. Namun, dengan diadakannya program pelatihan untuk guru bahasa Mandarin merupakan suatu peluang dalam meningkatkan kualitas tenaga pengajar karena dalam pelatihan tersebut tidak hanya mempelajari bahasanya saja namun mempelajari budayanya juga. Adapula pelatihan-

pelatihan sistem pengajaran bahasa Mandarin, yang mana pelatihan tersebut dapat menambah wawasan untuk tenaga pengajar yang nantinya dapat di ajarkan kepada siswa dan siswi dengan metode-metode pengajaran yang berbeda dan beragam.

Selain itu program pelatihan yang ditujukan untuk guru Bahasa Mandarin dalam bidang akademik dibekali ilmu mengenai tata bahasa serta teknik pengajaran cara bahasa Mandarin pada sekolah dasar dan sekolah menengah di Beijing beserta simulasinya. Cara pengajaran Hanyu Pinyin dan pelafalannya. Sejarah kerjasama dengan beberapa Universitas di Tiongkok yang hingga saat ini masih terjalin. Cara mengukur – mensurvey – menganalisa soal ujian percakapan dan parameter pemberian nilai, kecepatan cara berpikir. Pemantauan cara pengajaran guru di Beijing. Pola bahasa Mandarin di dalam kelas, teknik bermain alat musik tradisional Cina, pembelajaran Microsoft Office dengan menggunakan bentuk huruf Hanzi, konsep dan pola pengajaran bahasa Mandarin serta pengajaran kebudayaan Tiongkok di dalam kelas (Ardhita, 2011).

SIMPULAN

Hubungan kerjasama *sister city* yang terjalin antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Beijing menjadikan ajang bagi kedua kota tersebut untuk saling bertukar pengalaman dalam berbagai bidang. *Pertama*, Bidang pendidikan menjadi salah satu bidang yang disepakati. *Kedua*, Pemerintah Kota Beijing juga mendapatkan kesempatan berbagi pengalaman melalui program-program yang dilakukan oleh DKI Jakarta dan Beijing. *Ketiga* kerjasama yang dilakukan oleh kedua kota tersebut memberikan kesempatan untuk mempromosikan budaya masing-masing kota.



Peneliti juga menyadari bahwa sumber dari peneliti terkait dengan objek penelitian masih sangat kurang, maka dari itu peneliti menyarankan untuk peneliti selanjutnya agar menambah sumber terkait pembahasan yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardhita, R. H. (2011). *Laporan Perjalanan Dinas*. Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Bank, W. (2017). Dipetik 2019, dari The World Bank: <http://worldbank.org/en/country/china/overview>
- Bappenas. (2006). *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luarnegeri oleh Pemerintah Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Chau, R. (2009). Dipetik Maret 2019, dari Political Philosophy: <http://www.mannkal.org/download/scholars/liberalism.pdf>
- Duchachek, I. D. (1985). *Perforated Sovereignties: Towards a Typology of New Actors in International Relations*. Oxford: Clarendon Press.
- Embassy, C. (2004). Dipetik Maret 2019, dari Embassy of the People's Republic of China in the Republic of Indonesia: <http://id.china-embassy.org/indo/zgyyn/sbgxgk/>
- International, S. C. (2014). Dipetik Maret 2019, dari Measure That Matter: <http://sistercities.org/sites/default/files/Measures%20that%20Matter.pdf>
- Jakarta, P. P. (2012). *Dokumentasi Pelaksanaan Kerjasama Luar Negeri/Sister City Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2010-2011*. Jakarta: Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- Keating, M. (1999). 1999. Dalam F. A. Keating, *Paradiplomacy in Action: The Foreign Relations of Subnational Government*. London: Frank Cass Publishers.
- MacDonald, D. (2013). Dipetik Maret 2019, dari American Conservative: <http://www.theamericanconservative.com/repository/isaiah-berlins-two-concepts-of-liberty/>
- Milner, A. d. (2009). *Power, Interdependence, and Nonstate Actors in World Politics*. United Kingdom: Princeton University Press.
- O'Toole, K. (2001, 55 (3)). Kokusaika and Internationalisation: Australian and Japanese Sister City Type Relationships. *Australian Journal of International Affairs*, 403-419.
- Sriyanto, N. (2015). *65 Years of Bilateral Relations Between Indonesia and China: Strengthening and Building Constructive Relations through People-to-people Relations*. Dipetik Maret 2019, dari Pusat Penelitian Politik: <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-1/politik-internasional/1035-65-years-of-bilateral-relations-between-indonesia-and-china-strengthening-and-building-constructive-relations-through-people-to-people-relations-volume-2>
- Tsai, M. (2010, Mei 20). Dipetik Februari 2019, dari Foreign Policy: <http://foreignpolicy.com/2010/05/20/indonesia-learns-chinese>



Viotti, P. R. (2012). *International
Relation Theory 5th ed.* Longman:
Pearson Education inc.



*Henike Primawati, Windy Dermawan dan Widiya Ardiyanti: Kerjasama
Provinsi DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Beijing China dalam
Skema Sister City*



Strategi Kampanye Sudrajat-Syaikhu Mendapat Dukungan Masa Populisme Islam Dalam Pilgub Jawa Barat 2018

Yusa Djuyandi^{1*}; Bagus Riadi¹; Muhammad Zia Ulhaq¹; Diki Drajat¹

¹Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

Abstrak

Populisme Islam telah menjadi diskusi hangat di Indonesia pasca munculnya Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Pada waktu itu, masa populisme Islam yang kecewa terhadap sistem karena telah melahirkan kesenjangan melampiaskan kekecewaannya pada serangkaian Aksi Bela Islam I, II, dan III. Fenomena gerakan populisme Islam tidak hanya terjadi di Jakarta, diskusi populisme Islam juga berkembang dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Salah satu pasangan calon yang disinyalir memanfaatkan gelombang populisme Islam ini adalah Sudrajat dan Ahmad Syaikhu (Asyik). Pasangan yang diusung oleh Gerindra dan PKS ini diuntungkan untuk mendapat suara masa populisme Islam karena partai pengusung pasangan Asyik adalah partai yang mendapat citra sebagai partai pro umat Islam. Namun sayangnya keuntungan ini belum terkonsolidasi secara masif. Ujaran tagar 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh pasangan Asyik dalam debat kedua Pilgub Jabar diyakini sebagai salah satu upaya untuk mengkonsolidasikan dukungan masa populisme Islam. Pada tulisan ini akan dianalisis bagaimana strategi pasangan Asyik untuk mengkonsolidasikan dukungan dari masa populisme Islam yang sebelumnya dalam kasus Pilkada DKI Jakarta, masa populisme Islam berada dalam barisan Gerindra dan PKS sebagai oposisi penguasa.

Kata Kunci: Populisme Islam; Pilgub Jabar; Asyik.

Abstract

Islamic Populism has become a hot discussion in Indonesia after the emergence of the Ahok Phenomenon in the DKI Jakarta Election 2017. At that time, the period of Islamic populism which was disappointed with the system because it had created inequality vented his disappointment in a series of Islamic Defending I, II and III. The phenomenon of Islamic populism movements does not only occur in Jakarta, discussions of Islamic populism also develop in the constellation of the 2018 West Java Governor Election. One of the pairs of candidates who allegedly used the wave of Islamic populism was Sudrajat and Ahmad Syaikhu (Asyik). The pair carried by Gerindra and PKS benefited from getting a vote of Islamic populism because the Asyik bearer party was a party that got the image as a pro-Muslim party. But unfortunately this advantage has not been consolidated massively. 2019 hashtag presidential test taken by the Asyik pair in the second debate in the West Java Pilgub is believed to be one of the efforts to consolidate support for Islamic populism. In this paper, we will analyze how the strategy of the Fun couple to consolidate support from the previous period of Islamic populism in the case of the DKI Jakarta Pilkada, the period of Islamic populism in the ranks of Gerindra and PKS as the ruling opposition.

Keywords: *Populisme Islam; Pilgub Jabar; Asyik.*

Info Artikel:

Dikirim: Jul 23, 2019

Diterima: Jul 24, 2019

Dipublikasi: Jul 31, 2019

PENDAHULUAN

Praktik kolonialisme yang memunculkan ketimpangan antar kelas sosial menjadi awal gerakan populisme Islam. Dari keadaan yang terpinggirkan dalam sistem tersebut muncul angan-angan umat Islam untuk membangun sebuah negara modern yang berbasis pada hukum Islam. Inilah fase awal terbentuknya populisme Islam, dimana aliansi antar kelas mulai terbentuk secara perlahan dibawah panji-panji Islam. Sehingga Islam menjadi entitas persatuan dalam melawan sekelompok yang dianggap sebagai musuh, baik secara ideologis maupun secara politis (Gardian, 2017).

Populisme Islam yang muncul di Indonesia belakangan ini telah membuka jalan bagi kemenangan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uni. Kekalahan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat melalui mobilisasi kekuatan muslim konservatif dan retorika politik yang rasialis (Mudhoffir, 2017).

Banyak pengamat yang menilai bahwa kekalahan petahana tersebut menjadi indikasi menguatnya populisme Islam di Indonesia. Said menilai bahwa gejala populisme muncul karena sumber daya alam dikuasai oleh korporasi dengan melakukan pendekatan kepada pusat pengambil keputusan terkait dengan kebijakan publik (Erdianto, 2017). Sehingga kebijakan yang diambil oleh pemerintah terkesan mementingkan pihak pemodal dan merugikan kepentingan nasional.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata juga menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia. Kesenjangan tersebut memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis (Erdianto, 2017). Hal tersebut kemudian menjadi dasar bagi para tokoh-tokoh populis mendapatkan legitimasi yang kuat bagi masyarakat populis yang kecewa

dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang tak kunjung menguntungkan rakyat.

Maraknya gerakan populisme Islam dalam kontestasi pemilihan umum terkadang ditunggangi oleh kelompok politik maupun kelompok agama yang ingin berkuasa. Kebangkitan populisme Islam di Indonesia turut ditandai dengan adanya kebangkitan radikalisme Islam yang mendorong sentimen anti-China dan nasionalisme ekonomi (Juono, 2017).

Hal ini dapat dilihat pada fenomena Ahok di Pilkada DKI Jakarta 2017 dimana sentimen anti-China menguat selain karena adanya kasus penistaan agama. Melainkan juga karena sebagian besar aktivitas ekonomi dikuasai oleh China sehingga muncul kembali adanya sentimen antara pribumi dan etnis China. Pada fenomena yang terjadi di Pilkada DKI, Front Pembela Islam (FPI) memegang peranan penting dalam gerakan populisme Islam. Pengaruh FPI sukses menjatuhkan Ahok dari kursi Gubernur DKI Jakarta. Namun dalam politik nasional, gerakan Islam populis-radikal belum mampu mendapatkan ruang yang signifikan (Juono, 2017).

Ketidakkampuan populisme Islam mendapatkan ruang di arena politik nasional tersebut seperti yang diungkapkan oleh Mudhoffir bahwa meskipun telah berhasil mengantarkan Anies-Sandi menjadi pemenang Pilkada Jakarta, namun trajektori politik Islam bisa diramalkan tidak akan memiliki prospek. Mereka hanya bermakna dalam kompetisi elektoral, namun tidak menjadi subjek politik penting dalam formulasi dan pengambilan kebijakan publik (Mudhoffir, 2017).

Sehingga Pilkada Jakarta 2017 menjadi contoh bagaimana populisme Islam melayani kepentingan elit predatoris ketimbang mendorong agenda politik untuk membangun tatanan ekonomi-politik yang menyejahterakan umat. Hal ini menyebabkan kebangkitan populisme Islam hanya dijadikan sebagai kekuatan



politik bagi golongan tertentu. Hal ini juga disebabkan oleh absennya gerakan politik progresif yang dapat dijadikan wadah bagi kekecewaan masyarakat terhadap keadaan ekonomi, sosial, dan politik untuk mengartikulasikan kekecewaannya tersebut. *Yusa Djuyandi, Bagus Riadi, Muhammad Zia Ulhaq, dan Diki Drajat*

Pada kondisi demikian mengakibatkan satu-satunya wadah yang dianggap dapat memenuhi kepentingan tersebut adalah Islam, oleh karenanya populisme Islam tidak memiliki basis gerakan yang kuat. Sehingga adanya populisme Islam cenderung digunakan untuk menggalang suara dalam kontestasi elektoral.

Tidak adanya partai politik Islam sebagai saluran politik yang representatif mengakibatkan umat Islam tidak terorganisir dan tidak memiliki saluran politik yang otonom. Masa populis Islam menyediakan basis mobilisasi bagi para politisi sekuler yang oportunistis dengan mengklaim bahwa ia dapat merepresentasikan kepentingan politik umat. Hal ini menyebabkan Prabowo yang sebenarnya bukan representasi tokoh muslim dengan partai Gerindra dapat menjadi elemen utama aliansi Islam (Mudhoffir, 2017).

Associate Director Akar Rumpur Strategic Consulting (ARCSC), Airlangga Pribadi seperti dikutip dalam Tempo.com mengatakan bahwa isu populisme Islam akan kembali mencuat di pemilihan Kepada Daerah 2018 dan pemilihan Presiden 2019. Namun, populisme Islam yang belakangan digelorakan di Indonesia menurutnya juga belum menjadi kekuasaan politik yang otentik (Nurita, 2017).

Munculnya populisme Islam pada Pilkada Jawa Barat juga kemungkinan tidak dapat dihindari. Mengingat pada Aksi Bela Islam 411 maupun 212, banya juga masa yang datang ke Jakarta berasal

dari Jawa Barat. Hal ini memungkinkan adanya *trigger* dari alumni Aksi Bela Islam tersebut dalam kontestasi Pilkada di Jawa Barat. Seiring berjalannya Pilgub Jabar, dapat dilihat bahwa strategi dari setiap pasang calon tidak dapat terlepas dari *platform* Islam. Tentunya sentimen politik identitas atas nama Islam tidak dapat dipisahkan di Jawa Barat.

Mengingat Jawa Barat mempunyai tradisi keislaman yang kuat dan beraneka ragam baik Islam tradisional ataupun Islam moderat. Hal ini kemudian yang akan dikaji, bagaimana strategi pasangan calon untuk mengambil suara dari masa populisme Islam di Jawa Barat.

Pasangan calon nomor urut 3, Sudrajat dan Ahmad Syaikh (Asyik) yang sedang ramai diperbincangkan karena *closing statement*nya dalam debat publik pilgub Jabar yang dianggap menimbulkan kericuhan karena membawa isu 2019 Ganti. Pasangan Asyik yang diusung oleh PKS dan Gerindra juga sejak awal optimis bahwa pemilih muslim di Jawa Barat akan menjadi modal yang kuat baginya untuk maju dalam pemilihan Gubernur Jawa Barat (Viva, 2018).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data primer diperoleh dengan melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara kepada DPC Partai Gerindra Kota Bandung dan DPC PKS Kota Bandung sebagai koalisi partai pendukung Sudrajat-Syaikh dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat 2018. Observasi juga dilakukan dengan mengamati perkembangan yang terjadi di dunia maya dengan memanfaatkan media sosial *instagram* dan *twitter*. Data sekunder diperoleh dari studi literatur baik dari media cetak maupun media elektronik. Untuk dapat menghasilkan data yang valid digunakan metode triangulasi untuk memvalidasi. Data yang telah divalidasi



kemudian dianalisis dengan teori komunikasi politik dengan populisme Islam sebagai landasan analisis untuk menciptakan deskripsi yang holistik dan mendalam.

PEMBAHASAN

Identifikasi Populisme Islam Di Jawa Barat

Istilah populisme hadir dari kebebasan berpendapat. Berbagai pandangan politik dijamin sepenuhnya oleh demokrasi liberal. Oleh sebab itu, populisme muncul sebagai akibat dari dinamika politik yang dihasilkan oleh berbagai pertentangan pandangan politik di tengah masyarakat. Hal tersebut tercermin dari pandangan yang diberikan oleh Ernesto Laclau mengenai kemunculan sebuah gerakan politik emansipatif dari berbagai kalangan yang termarjinalkan oleh demokrasi liberal. Demokrasi liberal yang bertumpu pada *rule of law* digunakan sebagai sarana untuk ‘menumbangkan’ *status quo* dari kelompok penguasa yang mereka (kelompok populis) anggap despotik (Mudde, 2017)

Populisme diartikan sebagai mobilisasi massa yang menuntut kemunculan figur yang memimpin kelompok populis. Pergerakan massa bersifat anti-pluralis dan mendaku sebagai kelompok yang mewakili suara dari seluruh rakyat. Massa populis menisbahkan pergerakan mereka kedalam satu identitas yang memberi penegasan bahwa kelompok tersebut merupakan oposisi dari berbagai kelompok diluar mereka sehingga polarisasi politik tak lagi terhindarkan (Müller, 2016).

Populisme sering muncul sebagai upaya dari kelompok dengan identitas tertentu untuk menentang kelompok dengan identitas lain yang mereka anggap sebagai lawan politik (Müller, 2016). Corak gerakan populisme dapat membenteng dari identitas bangsa, strata sosial, hingga agama.

Pada umumnya, gerakan populisme menentang adanya kekuasaan yang bertentangan dengan kehendak umum rakyat. Kelompok populis seringkali diidentikkan dengan gerakan kiri (sosialis maupun komunis) untuk menentang kekuasaan elit yang memarjinalkan kelompok populis tersebut. Namun dalam kasus Indonesia, mayoritas dari masyarakat di negara tersebut menolak keras kemunculan baik gerakan, maupun pemikiran kiri, hal ini tidak terlepas dari trauma masa lalu masyarakat Indonesia akan peristiwa Gerakan 30 September yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (Mudhoffir, 2017).

Serangkaian aksi populisme Islam tersebut kemudian memunculkan berbagai dinamika politik baru yang merupakan imbas dari ‘perang identitas’ antara kelompok Islam dengan kelompok pendukung Ahok yang tersebar dari kalangan non-muslim. Pendukung Jokowi-Ahok pada pilkada DKI Jakarta 2014, hingga partai PDI-Perjuangan yang dikenal sebagai partai politik pengawal kepentingan konglomerat *taipan* Tionghoa (Serujambi, 2017), yang mengusung Ahok untuk maju sebagai calon gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Fenomena ini menimbulkan apa yang oleh beberapa pengamat politik disebut dengan ‘*Ahok effect*’. Kebencian terhadap Ahok kemudian meluas kepada persekusi berbagai kalangan yang berusaha meringankan penderitaan Ahok akibat jerat kasus dugaan penistaan agama (Manurung, 2016).

Dampak dari ‘*Ahok effect*’ akhir-akhir ini menguatkan kembali sentimen pergesekan politik yang pernah terjadi pada pemilihan presiden tahun 2014 yang dinilai berdampak terhadap preferensi masyarakat jelang diselenggarakannya berbagai ajang pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia. Hal ini menemukan relevansinya ketika masyarakat yang masih tenggelam dalam konflik horizontal sebagai dampak dari fraksi pada



pemilihan presiden 2014 memunculkan sentimen terhadap identitas Jokowi sebagai politisi anggota PDI-P, non-muslim, hingga kerap kali dituding sebagai keturunan etnis Tionghoa (Kimura, 2017).

Senada dengan Ahok yang juga memiliki latar belakang yang sama (anggota PDI-P sekaligus non-muslim keturunan Tionghoa). Hal tersebut menjadikan diskursus yang berkembang pada seluruh ajang pemilihan umum, baik pilkada maupun pilpres. Fokus narasi pesta demokrasi penuh dengan sentimen terhadap PDI-P beserta lima partai pendukung Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 (Nasdem, Golkar, Hanura, PPP, dan PKB) dan etnis Tionghoa ketimbang kinerja dan visi-misi dari figur kandidat pemimpin.

Hal tersebut menjadikan preferensi dukungan dari calon pemilih yang terdampak oleh serangkaian demonstrasi ‘Aksi Bela Islam’, memiliki kesempatan untuk meraih elektabilitas tinggi pada ajang pilkada serentak 2018. Provinsi Jawa Barat yang digadang-gadang memiliki basis massa simpatisan Aksi Bela Islam dengan jumlah besar (Rizky, 2016)

Kuatnya dukungan masyarakat terhadap figur pasangan calon maupun partai politik dengan nuansa Islami berkaitan dengan karakteristik masyarakat Jawa Barat yang kuat memegang teguh tradisi Sunda. Islam sepenuhnya mengalami internalisasi dengan budaya Sunda dan membentuk jati diri kesundaan masyarakat yang terintegralkan secara natural dalam perilaku keseharian sekaligus menjadi identitas permanen orang Sunda (Sumpena, 2012).

Faktor identitas yang menjadi preferensi utama masyarakat Jawa Barat dalam memilih pemimpin menyebabkan rendahnya elektabilitas pasangan calon yang memiliki latar belakang identitas dengan oposisi umat Muslim pada Pilkada

DKI Jakarta 2017 seperti isu SARA, dominasi ekonomi *taipan* Tionghoa, dan ‘partai politik pendukung penista agama’. Faktor inilah yang kemudian menjadikan figur dari setiap pasangan calon mengidentifikasi diri mereka dengan identitas pemimpin yang dekat dengan Islam (Purnomo, 2017).

Membaca arus gerakan populisme di Jawa Barat tidak dapat sepenuhnya diidentifikasi dengan fenomena populisme keagamaan yang terjadi pada kasus DKI Jakarta, meskipun banyak dari simpatisan ‘Aksi Bela Islam’ berasal dari masyarakat Jawa Barat. Hal tersebut berkaitan dengan absennya *common enemy* contohnya mantan gubernur Ahok

Namun narasi populisme Islam yang berkembang di Jawa Barat lebih condong kepada rasa waspada akan munculnya figur pemimpin yang berkarakteristik sama, baik dalam segi identitas (SARA dan latar belakang partai politik pendukung) maupun figuritas dari pasangan calon dengan mantan gubernur DKI Jakarta tersebut. (Arief, 2017)

Tema Kampanye Pasangan Sudrajat-Syaikhu

Populisme merupakan sebuah gerakan massa yang mengaku sebagai kelompok yang merepresentasikan suara rakyat, yang mana mereka menisbahkan pergerakannya kedalam satu identitas. Gerakan ini pernah terjadi pada saat pilkada DKI Jakarta, munculnya gerakan-gerakan populisme islam karena beberapa hal yang membuat masa populis Islam ini terusik. Dari apa yang terjadi di Jakarta itu memberikan dampak kepada daerah-daerah yang lain di Indonesia khususnya Jawa Barat yang posisinya dekat dengan Jakarta.

Pada Pilgub Jabar kali ini memunculkan beberapa calon yang dimana salah satu calon tersebut dilatar belakangi oleh pasangan dan partai yang agamis. Pasangan tersebut ialah Sudrajat-



Syaikhu atau yang dikenal dengan pasangan “Asyik”. Asyik merupakan sebuah tema yang di usung oleh pasangan yang Sudrajat-Syaikhu. Tema ini mereka ambil merangkul anak muda Jawa Barat dan mengusung demokrasi yang jujur, sehat, dan segar.

Selain daripada itu, untuk memanfaatkan masa populis Islam, kedua pasangan ini didukung oleh partai yang memiliki basis Islam yang cukup kuat yaitu PKS dan partai nasionalis yaitu Gerindra. Hal ini bisa dilihat ketika kegiatan kampanye 12 Mei 2018 di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat. Dengan menyemarakkan temanya “Asyik” melalui musik dan simbol simbol lainnya yang mudah dihafal dan diterima oleh masyarakat. Pasangan ini menegaskan akan menjunjung tinggi visi misi Jawa Barat yang bertaqwa dan sejahtera.

Media Kampanye Yang Digunakan Oleh Pasangan Sudrajat-Syaikhu

Seperti yang kita ketahui bahwasannya ketika terjadinya pesta demokrasi pada saat menjelang pemilihan umum maka para pasangan calon pemimpin akan melakukan kampanye sebagai bentuk promosi dan memperkenalkan diri mereka kepada rakyat. Pasangan calon akan menggunakan berbagai macam media untuk berkampanye.

Di era globalisasi seperti ini pesatnya kemajuan teknologi maka tidak sulit untuk kita menemukan media kampanye. Media kampanye saat ini dapat berupa media elektronik seperti televise, radio, media online, media massa dan lain-lain.

Media kampanye yang saat ini sering digunakan karena dianggap dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh khalayak orang banyak ialah media online. Banyak sekali para calon wakil rakyat yang berkampanye melalui media online seperti instagram, facebook, twitter dan bekerjasama dengan pihak media

online yang sering memposting berita terkini.

Seperti halnya disini kita akan membahas mengenai media - media yang digunakan oleh pasangan calon gubernur jawa barat nomor urut 3 yakni sudrajat dan Akhmad Syaikhu yang diusung oleh partai keadilan sejahtera (PKS) dan partai Gerindra. Mereka menggunakan beberapa media untuk mempromosikan diri mereka.

Beberapa media yang mereka gunakan untuk melakukan kampanye ialah media online, media massa, media elektronik. Mereka juga melakukan kampanye dengan cara tatap wajah langsung. Tulisan ini akan menjelaskan lebih detail kembali bagaimana penggunaan media tersebut dan pemanfaatan media tersebut yang dilakukan oleh pasangan calon gubernur jawa barat nomor urut 3.

Pertama media online kita ketahui bahwasanya media online merupakan hal yang sangat berpengaruh pada era sekarang ini karena telah banyaknya masyarakat yang mempunyai media sosial online. Pasangan nomor urut 3 ini menggunakan media online dengan cara membuat akun media sosial seperti di instagram, facebook dan twitter.

Media tersebut dikelola oleh pihak pendukung mereka sebagai relawan dan tim suksesnya. Dalam akun media sosial tersebut pasangan calon ini mengekspos dan memposting segala hal kegiatan sehari - hari mereka dalam berkampanye dan terjun langsung di masyarakat.

Melalui akun media sosial tersebut mereka mengajak masyarakat dengan memposting visi misi mereka agar masyarakat dapat mengetahui program kerja apa yang akan mereka lakukan apabila terpilih nanti. Nama media sosial yang mereka gunakan ialah Jabar Asyik. Media lain yang mereka gunakan ialah instagram yang bernama Jabar Asyik.

Lalu terdapat media massa yang mereka gunakan juga dalam melakukan kampanye. Media massa dimana mereka



melakukan kerjasama dengan beberapa pihak media cetak yakni melalui pemberitaan di koran agar dapat memberitakan kegiatan mereka ketika melakukan kampanye dan mengunjungi masyarakat. Selain itu pihak media massa tersebut juga memposting hal - hal positif yang berkaitan dengan paslon agar dapat menimbulkan rasa ketertarikan bagi masyarakat yang melihat berita tersebut.

Meida kampanye juga berupa baliho terkait visi misi mereka agar dapat dilihat oleh masyarakat. Media kampanye berikutnya yaitu radio. Kegiatan yang dilakukan melalui radio bertajuk talkshow. Selain itu mereka juga melakukan kampanye secara langsung dengan bertatap muka mengunjungi masyarakat. Cara yang digunakan yaitu buka bersama dan mengikuti acara tausiyah di setiap kecamatan ataupun kabupaten.

Pengaruh Partai Politik Dan Kelompok Masyarakat Yang Dimanfaatkan Oleh Pasangan Sudrajat-Syaikhu

Pasangan yang diusung oleh Gerindra adalah Sudrajat-Syaikhu. Prabowo menunjukkan dukungan dengan cara langsung turun gunung. Prabowo terlibat langsung dalam penuksesan Sudrajat-Syaikhu dengan cara mengunjungi banyak kabupaten kota Jawa Barat di Jawa Barat. Langkah ini sebagai strategi kampanye memenangkan pasangan calon Sudrajat-Ahmad Syaikhu di pemilihan gubernur Jawa Barat.

Prabowo menyatakan bahwa dia sangat mendukung paslon ini dikarenakan dirinya juga berstatus sebagai penduduk Jawa Barat. Sudrajat dan Syaikhu juga terlihat sangat mendukung Prabowo dalam konstelasi politik pilpres. Bahkan di debat pertama beberapa waktu lalu, Sudrajat menunjukkan satu baju yang bertulis “2018 menang, 2019 ganti Presiden”. Hal ini tentu memacu kontroversi dari banyak pihak, ada yang mendukung sikap paslon

ini dan ada yang justru tidak suka dan mengancam perbuatannya.

Tidak hanya diusung oleh Gerindra, Sudrajat dan Syaikhu juga diusung oleh dua partai lainnya yaitu PAN dan PKS. PAN dan PKS merupakan dua partai yang terlihat jelas bercorak ke-Islaman. Paslon ini merupakan paslon yang sangat menunjukkan nilai – nilai ke-Islaman dari awal kampanye.

Presiden PKS Sohibul Iman menyatakan bahwa dia yakin jika Sudrajat-Syaikhu memiliki potensi yang bisa ditingkatkan. Sohibul optimistis keduanya mampu mendapatkan elektabilitas di atas 40% dalam Pilgub. Sudrajat dan Syaikhu juga terlihat sangat mendekati diri pada organisasi dan partai politik bertema ke-Islaman.

Dukungan awal yang dicari oleh Sudrajat adalah dukungan dari kelompok bercorak islam. Dalam debat Calon Gubernur pertama Pasangan ketiga Sudrajat-Syaikhu terang-terangan menyebut akan "melindungi Ulama dari serangan orang gila". Berdasarkan program kerja yang ditawarkan Sudrajat-Syaikhu visi-misi yang diajukan, didominasi oleh nasionalis-Islami, seperti yang kita ketahui Jawa Barat didominasi oleh etnis Sunda yang beragama Islam.

Seperti yang telah dijelaskan calon (Paslon) Cagub-Cawagub Jabar Sudrajat-Ahmad Syaikhu memang berusaha menarik dukungan organisasi bercorak agama Islam, dan terlihat juga salah satu organisasi Islam yang cukup berpengaruh di Indonesia memberikan dukungannya kepada Paslon. Hal ini terlihat dari video berdurasi 03.49 menit yang tersebar via WhatsApp dimana menggambarkan pertemuan antara paslon Asyik dengan Rizieq.

Pertemuan antara Sudrajat-Syaikhu dengan Rizieq dikatakan sebagai rangkaian ibadah umrah yang tengah dijalani keduanya. Dalam umrah, paslon yang diusung partai Gerindra, PKS dan



PAN itu melakukan pertemuan dengan Rizieq di Makkah. Mendapat dukungan dari Habib Rizieq Syihab sebagai tokoh Front Pembela Islam (FPI) tentunya mengukuhkan dukungan FPI terhadap Paslon ini. Habieb Rizieq memberikan pesan kepada paslon ini untuk menjaga ulama dan kyai, menjaga umat Islam dan menjaga keadilan.

Sudrajat-Syaikhu juga mendapat dukungan dari mahasiswa. Namun ada kontrak politik yang harus dipenuhi Sudrajat yang disodorkan mahasiswa. Ada kurang lebih 14 kewajiban yang diajukan oleh mahasiswa muslim Jawa Barat sebagai kontrak politik. Beberapa hal tersebut diantara lain, untuk terus berlalu adil dan jujur, melakukan pembangunan menyeluruh di wilayah Jawa Barat, dan beberapa hal lainnya.

Menurut pengamat politik dari Universitas Parahyangan Bandung, Prof Asep Warlan Yusuf mengatakan, dalam memilih seorang pemimpin ada beberapa tahapan yang dilakukan orang Sunda. Pertama wawuh atau kenal. Setelah mengenalnya, kemudian wanoh atau akrab. Baru setelah akrab disukai dan dipilih. Konstelasi politik di Jawa Barat dapat dikatakan sangat dinamis. Dengan jumlah pemilih terbanyak di seluruh Indonesia, yakni sekitar 35 juta pemilih.

pemilihan gubernur provinsi ini dinilai menjadi faktor penentu dalam pemilihan presiden tahun depan. Namun, pengamat politik dari Universitas Padjajaran Firman Manan memandang karakter pemilih yang religius dan merupakan pemilih tradisional yang memilih figur dengan popularitas tinggi. Dapat disimpulkan sekali lagi bahwa corak islamis dalam suatu organisasi atau partai politik merupakan yang sangat mempengaruhi elektabilitas Paslon no 3.

Analisis Isu 2019 Ganti Presiden Yang Dibawa Pasangan Sudrajat-Syaikhu

Beberapa waktu lalu debat kedua Pilgub Jabar memanas diakibatkan aksi

pasangan Asyik yang mengeluarkan ujaran “2018 Asyik Menang, 2019 Ganti Presiden” pada saat *closing statement*. Aksi tersebut memunculkan reaksi keras dari pendukung pasangan Hasanudin-Anton Charliyan yang didukung oleh PDI-P. Reaksi ini datang dari masa pro Jokowi yang menginginkan Jokowi terpilih kembali pada Pilpres 2019 mendatang (Nugraheny, 2018). Konflik antara pendukung Jokowi dengan masa yang mem-viralkan *hashtag* #2019GantiPresiden sebelumnya sudah lama terjadi di dunia maya.

Gerakan 2019 ganti Presiden pada awalnya adalah pecobaan politik yang dilakukan oleh PKS. Gerakan tersebut meluas dan menjadi viral karena adanya relasi dengan kekecewaan rakyat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi. Meluasnya wacana tersebut megakibatkan tagar #2019GantiPresiden bukan lagi milik PKS, tetapi sudah menjadi milik publik yang gusar akan keadaan yang terjadi saat ini.

Percobaan PKS tersebut tampaknya telah berhasil membentuk opini publik sehingga dapat memberikan wadah ekspresi ketidakpuasan rakyat terhadap rezim Jokowi. Adanya wadah ekspresi tersebut kemudian memunculkan tokoh Prabowo sebagai *signified* dari tagar #2019GantiPresiden. Opini publik kemudian mengerucut menimbulkan suatu asumsi bahwa apabila tidak puas dengan Jokowi, maka 2019 harus ada pergantian Presiden, dengan penggantinya adalah Prabowo.

Meluasnya tagar tersebut juga kemudian dimanfaatkan oleh pasangan Sudrajat-Syaikhu dalam kontestasi Pilgub Jabar. Strategi untuk melakukan aksi “2019 Ganti Presiden” dalam panggung debat Pilgub Jabar merupakan sesuatu yang telah dipersiapkan secara matang, bukan suatu kejadian yang tiba-tiba. Aksi tersebut dilakukan untuk mendapat dukungan dari masa yang tidak akan memilih Jokowi pada Pilpres 2019



mendatang. Hal ini diyakini sebagai upaya konsolidasi pasangan Asyik sehingga rakyat yang menginginkan pergantian Presiden akan memilih pasangan Asyik ketimbang pasangan lain.

Selain itu, aksi tersebut juga dianggap sebagai suatu bentuk *soft pitching* untuk memancing reaksi dari khalayak utamanya PDI-P sebagai basis masa pendukung Jokowi di depan publik. Sehingga publik dapat menilai perilaku buruk dari masa PDI-P yang terkesan temperamen. Namun, secara etika komunikasi politik, aksi yang dilakukan oleh pasangan Asyik tentu tidak dapat dibenarkan karena tidak pada konteksnya.

Di panggung Pilgub Jabar belum saatnya untuk membicarakan Pemilihan Presiden yang masih akan dilaksanakan satu tahun lagi. Terlebih yang dilakukan oleh pasangan Asyik menyimpang jauh dari tema debat yang diangkat. Meskipun aksi tersebut adalah sebagai upaya untuk menaikkan elektabilitas, namun signifikansinya tidak dapat dipastikan sebelum dilakukan survei pasca debat kedua Pilgub Jabar (Gazali, 2018).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Insrat, pesan 2019 ganti Presiden yang disampaikan oleh pasangan Asyik pada debat Pilgub Jabar tidak akan berpengaruh terhadap perolehan suara pada saat pemilihan. Hal ini dikarenakan tidak ada korelasi antara pemilih pada Pilgub Jabar 2018 dan Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Pada saat dilakukan *cross-tab* data survei pemilih Presiden (Jokowi-Prabowo) dengan pemilih di Pilgub Jabar, hasilnya hanya 11 persen dari 47,6 persen pemilih Prabowo yang akan memilih pasangan Asyik dalam Pilgub Jabar. Sedangkan *cross-tab* data dengan pemilih Jokowi memperlihatkan bahwa 4,2 persen dari 40,8 persen pemilih Jokowi yang akan memilih pasangan Asyik (Insitute, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, didapat temuan baru bahwa Pilgub Jabar

lebih berfokus pada figur tokoh ketimbang partai pengusung atau pengaruh kedekatan dengan tokoh penting (Jokowi Prabowo).

Hasil survei tersebut menunjukkan bahwa usaha Asyik untuk mengidentifikasi dirinya berada dalam barisan Prabowo tidak serta merta dapat mendapat simpati dari simpatisan Prabowo di Jawa Barat. Padahal berdasarkan hasil survei dan rekapitulasi Pemilu 2014 lalu, Jawa Barat adalah lumbung suara bagi Prabowo (Kuswandi, 2014). Hal menarik lainnya adalah ternyata ada 4,2 persen dari 40,8 persen pendukung Jokowi yang akan memilih Asyik dalam Pilgub Jabar mendatang. Hal ini semakin menguatkan argumen bahwa hadirnya figur nasional dalam Pilgub Jabar tidak serta merta dapat membantu menaikkan elektabilitas pasangan calon yang bertarung dalam Pilgub Jabar.

Ujaran 2019 ganti Presiden yang dibawa oleh Asyik dalam debat Pilgub Jabar juga dapat dilihat sebagai upaya untuk mendapat simpati dari masa populisme Islam. Populisme Islam di arena kontestasi politik mulai terlihat pasca Fenomena Ahok dalam Pilkada DKI Jakarta. Masa yang kecewa dengan kesenjangan dan keterpurukan moral yang terjadi memanfaatkan Islam sebagai ekspresi ketidakpuasan rakyat. Hal ini tentunya berdampak kepada daerah-daerah lain diluar Jakarta, termasuk Jawa Barat.

Serangkaian aksi bela Islam yang pernah terjadi di Jakarta juga melibatkan banyak warga Jawa Barat yang ikut dalam aksi tersebut (Okezone, 2017). Oleh karenanya, sangat mungkin jika isu populisme Islam juga berkembang dalam Pilgub Jabar. Terlebih, partaipolitik pengusung Sudrajat-Syaikhu adalah partai politik yang di identifikasikan sebagai partai yang pro Islam. Koalisi partai Gerindra-PKS yang sebelumnya dapat menumbangkan Ahok di Pilkada Jakarta kembali mengkonsolidasikan dirinya di



Pilgub Jabar. Meskipun menurut Mudhoffir, partai-partai tersebut hanya memanfaatkan populisme Islam sebagai kendaraan menuju kuasa dengan mengidentifikasikan diri sebagai *signified* dari masa populisme Islam (Mudhoffir, 2017).

Pasangan Asyik mencoba memanfaatkan basis partai yang sudah mendapat pengakuan dari masyarakat sebagai partai pro Islam untuk mendapat dukungan dari umat Islam yang kecewa dengan partai-partai pengusung kandidat lain di Pilgub Jabar. Sehingga ujaran “2018 Asyik Menang 2019 Ganti Presiden” yang diikuti dengan tindakan memamerkan kaus bertuliskan ujaran tersebut adalah sebuah usaha untuk menciptakan diskursus dalam ruang berpikir masyarakat bahwa pasangan Asyik berada dalam barisan partai-partai yang pro umat Islam. Hal ini dilakukan untuk lebih menguatkan popularitas pasangan Sudrajat-Syaikhu di mata masyarakat yang belum terlalu mengenal pasangan Asyik.

Pasangan Asyik memanfaatkan basis pendukungnya yang merupakan partai-partai pro Islam untuk dapat menaikkan popularitasnya. Meski demikian, tindakan yang dilakukan pasangan Asyik dalam debat Pilgub kedua belum dapat memperlihatkan signifikansinya untuk menaikkan elektabilitas pasangan Asyik pasca debat (Liputan6, 2018). Namun selain sebagai usaha menaikkan elektabilitas dan popularitas pasangan Asyik, tindakan tersebut juga dapat dilihat sebagai upaya untuk membesarkan figur Prabowo di Jawa Barat.

Seperti diketahui, Jawa Barat adalah lumbung suara bagi Prabowo, selain itu Pilgub Jabar juga dapat dikatakan sebagai salah satu fokus politik nasional saat ini. Meskipun perolehan suara pada Pilgub Jabar tidak dapat serta merta mempengaruhi peta politik nasional. Namun, membesarkan figur

Prabowo di Jawa Barat merupakan hal yang akan menjadi sorotan di arena nasional, hal ini karena Jawa Barat adalah salah satu sentral pembangunan nasional.

Sehingga usaha tersebut perlu dilakukan oleh kubu koalisi Gerindra-PKS agar tidak kehilangan konstituennya di Jawa Barat dengan membawa isu 2019 ganti Presiden ke Jawa Barat. Tujuannya adalah menanamkan *signified* nama Prabowo dari *signifier* tagar #2019GantiPresiden dalam ruang pikir masyarakat Jawa Barat.

SIMPULAN

Pasangan Sudrajat-Syaikhu hendak menjadikan populisme Islam sebagai jalan menuju kuasa seperti yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di DKI Jakarta. Salah satu usaha konsolidasi yang dilakukan pasangan Asyik adalah dengan membawa isu 2019 Ganti Presiden dalam arena pertarungan di Jawa Barat. Isu 2019 Ganti Presiden yang dibawa oleh pasangan Sudrajat-Syaikhu berhasil menanamkan nama Prabowo sebagai *signified* dari *signifier* tagar #2019GantiPresiden. Hal ini diindikasikan sebagai usaha kubu Prabowo untuk tidak kehilangan konstituen di Jawa Barat karena Jabar adalah lumbung suara yang penting bagi Prabowo.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, H. (2017, Mei 18). *Manimbang Ahok Effect dalam Pilkada Jawa Barat 2018*. Dipetik Januari 2019, dari Kumpran.com: <https://kumpran.com/hersubeno-arief/menimbang-ahok-effect-pada-pilkada-jabar-2018>.
- Erdianto, K. (2017, Januari 16). *Populisme, Kesenjangan dan Ancaman terhadap Demokrasi*. Dipetik 2019, dari Kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2017/01/16/07444731/populisme.kesenjangan.danancaman.terhadap.demokrasi>



- Gardian, E. A. (2017). Membaca Populisme Islam Model Baru. *Studia Islamika*, 379-393. [d/3540461/survei-pilkada-jabar-elektabilitas-pasangan-asyik-tertinggal-jauh](https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.4)
- Gazali, E. (2018, Mei 15). Soal Pernyataan Penutup Duet Asyuk di Debat Pilgub Jabar. (Y. Yulius, Pewawancara)
- Goodwyn, L. (2017). Democratic Promise: The Populist Movement in America. Dalam C. M. Kaltwasser, *Populism: A Very Short Introduction* (hal. 24). New York: Oxford University Press.
- Istintute, I. S. (2018). *Survei Perspesi Publik Jelang Pemilihan Gubernur*. Bandung: Insrat.
- Juono, U. (2017, September 24). *Mengapa Populisme Islam Semakin Marak di Indonesia*. Dipetik Januari 2019, dari matamatapolitik.com: <https://www.matamatapolitik.com/mengapa->
- Kimura, E. (2017, Juli 12). *Populist Politics in Indonesia*. Dipetik Januari 2019, dari Huffington Post: https://www.huffingtonpost.com/entry/populist-politics-in-indonesia_us_5a298131e4b006a26fb3d127
- Kuswandi, R. (2014, Juli 18). *Cuma Menang di 4 Kabupaten, Jokowi Keok di Jawa Barat*. Dipetik Januari 2019, dari Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2014/07/18/18544391/Cuma.Menang.di.4.Kabupaten.Jokowi.Keok.di.Jawa.Barat>
- Liputan6. (2018, Mei 27). *Survei Pilkada Jabar: Elektabilitas Pasangan Asyik Tertinggal Jauh*. Dipetik Februari 2019, dari Liputan6.com: <https://m.liputan6.com/pilkada/rea>
- Manurung, H. (2016). The Effect of Basuki "Ahok" Tjahaya Purnama Leadership Style on Indonesia Democracy 2012-2106. *Preceeding The 1st International Conference on Social Sciences and Humanities* (hal. 803). Jakarta: LIPI.
- Mudde, C. d. (2017). *Populism: A Very Short Introduction*. New York: Oxford University Press.
- Mudhoffir, A. M. (2017). Populisme Islam da Tantangan Demokrasi di Indonesia. *Prisma* 36 (3), 48-60.
- Müller, J.-W. (2016). *What is Populism?* Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
- Nugraheny, S. E. (2018, Mei 15). *Buntut Ricuh Debat Pilgub Jabar, KPU Sanksi Pasangan Asyik*. Dipetik Februari 2019, dari Republika.co.id: <http://republika.co.id/berita/nasiona1/pilkada/18/05/15/p8rr27409-buntut-ricuh-debat-pilgub-jabar-kpu-snksi-pasangan-asyik>
- Nurita, D. (2017, Desember 30). *Pengamat: Populisme Islam Bisa Kembali Mencuat di Pilkada 2018*. Dipetik Januari 2019, dari Tempo.com: <https://nasional.tempo.co/read/1046150/pengamat-populisme-islam-bisa-kembali-mencuat-di-pilkada-2018>
- Okezone. (2017, Maret 31). *Ratusan Warga Jawa Barat ke Jakarta Ikut Aksi*. Dipetik Januari 2019, dari Sundonews.com: <https://metro.sindonews.com/read/>



1193076/170/ratusan-warga-jawa-
barat-ke-jakarta-ikut-aksi-313-
1490940594

Purnomo, N. R. (2017, Desember 05).

*Suvei: Faktor Agama Paling
berpengaruh di Pilkada Jawa*

Barat. Dipetik Januari 2019, dari
Tribunnews.com:

[http://www.tribunnews.com/nasion
al/2017/12/05/survei-faktor-
agama-paling-berpengaruh-di-
pilkada-jawa-barat](http://www.tribunnews.com/nasional/2017/12/05/survei-faktor-agama-paling-berpengaruh-di-pilkada-jawa-barat).

Rizky, F. (2016, November 09). *Din*

*Syamsudin: 5 Juta Muslim Jabar
Siap Turun untuk 25 November*

2016. Dipetik Januari 2019, dari
Okezone News:

[https://news.okezone.com/read/20
16/11/09/337/1536960/din-
syamsudin-5-juta-muslim-jabar-
siap-turun-untuk-25-november-
2016](https://news.okezone.com/read/2016/11/09/337/1536960/din-syamsudin-5-juta-muslim-jabar-siap-turun-untuk-25-november-2016).

Serujambi. (2017, November 10).

*Solidaritas Aksi Bela Islam
Menjadi Ancaman Serius PDIP di
Pilgub Jabar, Jateng dan Jatim*.

Dipetik Februari 2019, dari
Serujambi.com:

[https://www.serujambi.com/2017/s
olidaritas-aksi-bela-islam-menjadi-
ancaman-serius-pdip-di-pilgub-
jabar-jateng-dan-jatim](https://www.serujambi.com/2017/solidaritas-aksi-bela-islam-menjadi-ancaman-serius-pdip-di-pilgub-jabar-jateng-dan-jatim)

Sumpena, D. (2012). Islam dan Budaya.

Hurnal Ilmu Dakwah, 107-111.

Viva. (2018, Januari 10). *Pemilih Muslim*

*di Jabar Jadi Saham Besar Cagub
Sudrajat*. Dipetik Januari 2019,

dari Viva.co.id:

[https://www.viva.co.id/berita/politi
k/995413-pemilih-muslim-di-
jabar-jadi-saham-besar-cagub-
sudrajat](https://www.viva.co.id/berita/politik/995413-pemilih-muslim-di-jabar-jadi-saham-besar-cagub-sudrajat)





DEMOGRAFI POLITIK KEWARGAAN DAERAH PINGGIRAN KOTA PANGKALPINANG

Rendy^{1*}; Dini Wulansari²; Berlian Zarina¹

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

²Jurusan Sastra Inggris, Universitas Bangka Belitung

Email: rendy@ubb.ac.id

Abstrak

Kota Pangkalpinang terus bertransformasi menjadi sebuah kota kecil yang modern, dan tentunya menghadapi berbagai dinamika persoalan dan tantangan kewargaan yang semakin kompleks. Kompleksitas kewargaan perkotaannya tentu memiliki konteks kerumitan yang begitu beragam, sesuai dengan demografi politik kewargaan kawasan pinggiran perkotaan. Kajian ini mengkomparasikan lanskap sosial politik dan dinamika tantangan yang dihadapi masyarakat di tiga lokasi penelitian, yang tercermin pada struktur politik kewargaan sehari-hari. Pendekatan yang digunakan yaitu studi kualitatif dengan teknik pengumpulan data; observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Adapun lokasi yang dipilih merupakan kawasan- pinggiran perkotaan. Studi ini menghasilkan beberapa temuan yaitu adanya disparitas perubahan konteks lanskap sosial-politik daerah pinggiran yang berbeda dalam bentuk dan model intervensinya sehingga menyebabkan warganya semakin individualis dan kapitalis dan semangat komunalitas warganya semakin tergerus, terdapat konteks masyarakat yang ‘terbelah’ pada wilayah Beluluk dan Kace Timur dalam konteks semangat kewargaan daerah pinggiran yang menjadi arena transit ekonomi warga dan semangat kolektif warga. Selain itu, eksistensi modal sosial warga dan aktivasi politik warga di tiga kampung-kota tersebut terlihat perbedaan mencolok dalam hal resiliensi terhadap berbagai aspek identitas lokal masing-masing daerah seperti tradisi budaya lokal, pergeseran makna, dan modal sosial warganya.

Kata Kunci: Demografi Politik; Lanskap; Kewargaan; Kampung-Kota; Pangkalpinang

Abstract

Pangkalpinang continues to transform into a modern small town and certainly faces various dynamics of problems and complex challenges in citizenship. The complexity of urban citizenship has a diverse context, in accordance with the political demographics of suburban citizenship. This study compares the socio-political landscape and the dynamics of the challenges in the three research locations: Tuatunu, Kace Timur, and Beluluk, which are reflected in the daily political structure of citizenship. It uses qualitative approach based on observation, depth interview, and documentation. The findings reveal that the disparity of form and model of intervention in the changing context of the peripheral socio-political landscape causes the citizens being individualistic and capitalist and their spirit of communality increasingly eroded, there is a split community in Beluluk and Kace Timur in the context of the spirit of peripheral citizenship as the economic transit for citizens and the challenge of building a collective spirit of citizens. Furthermore, the social capital and political activity of citizens in the three villages shows a sharply difference in terms of resilience to various aspects of the local identity of each region such as the local cultural traditions or a shift of meaning and citizens' social capital.

Keywords: Political Demograph;, Lanscap;, Kewargaan;, Kampung-Kota; Pangkalpinang.

Info Artikel:

Dikirim: Jul 23, 2019

Diterima: Jul 24, 2019

Dipublikasi: Jul 31, 2019

PENDAHULUAN

Kemajuan sebuah negara ataupun daerah pada dasarnya sangat ditentukan oleh konteks kemajuan kampung, pinggiran (*pheriphery*) atau desa yang menjadi episentrum penting, sekaligus strategis dalam rangka penguatan berbagai aspek potensial yang ada. Salah satu konteks penting dan sangat strategis berkaitan dengan eksistensi ‘kampung kota’ ataupun desa yaitu berkaitan dengan bagaimana realitas pembibitan ruang-ruang politik demokrasi dan demokratisasi mampu dikelola, direspon, dan dikontekstualisasi secara optimal dalam rangka menggarap berbagai potensi sumberdaya daya desa, baik potensi fisik maupun nir-fisik. Konteks tersebut, tentu pada gilirannya sangat berpengaruh signifikan terhadap penguatan kesadaran masyarakat secara diskursif dan demokratis (Rendy, 2017), khususnya dalam rangka menopang berbagai program dan agenda pemerintah daerah guna menciptakan keberdayaan serta keteraturan sosial politik masyarakat kampung, sekaligus guna mengakselerasi ruang kesejahteraan secara demokratis, adil dan merata.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tentu posisi kampung menjadi semakin strategis dan kuat. Berbeda halnya ketika posisi politik desa masih berbasis pada regulasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Kini posisi politik desa atau ‘kampung’ telah memiliki regulasi tersendiri sehingga memiliki fokus dan perhatian yang lebih kuat jika dibandingkan dengan rentang waktu lebih dari satu dasawarsa terakhir. Terlebih dengan terus meningkatnya potensi anggaran pembangunan yang dilakukan, baik di tingkat desa maupun kelurahan setiap tahunnya. Itu artinya ada begitu banyak ruang dan potensi bagi pemerintahan di level yang paling dekat masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas dan mutu tata kelola sumberdaya

yang ada agar benar-benar mampu memberikan ruang ‘keberdayaan’ dan kemanfaatan yang begitu luas dan merata bagi kesejahteraan masyarakat lokal di desa ataupun kampung. Konteks keberdayaan dan kesejahteraan yang dimaksud tentu tidak sekedar pada konteks ekonomi dan materi semata, karena bagaimanapun juga terdapat ruang keterlibatan atau partisipasi masyarakat yang terefleksi dalam praktik politik keseharian warganya dalam merespon setiap isu, masalah, dan wacana yang berkembang di lingkungan pemerintahan dan masyarakatnya.

Demografi politik daerah pinggiran merupakan salah satu diskursus penting untuk memetakan sekaligus membaca realitas lanskap (Gerry Van Klinken, 2014), dan juga potensi politik ‘kewargaan’ masyarakat di lingkungan kampung, desa, atau konteks ‘kampung-kota’ yaitu posisi masyarakat yang memiliki posisi dan karakteristik wilayah pinggiran atau posisinya sosial politiknya tidak terlalu berjarak dengan ruang-ruang perkotaan. Kajian ini tentu ini juga melakukan perbandingan tentang model lanskap sosial politik daerah pinggiran, khususnya konteks ‘kampung-kota’ (Sugiato, 2006), yang mana sedang dan terus menghadapi dinamika perubahan konteks perkotaan dari berbagai dimensi arsitektur, aksesibilitas, struktur sosial, budaya, sikap politik dan lokalitas masyarakatnya.

Studi ini mengkaji juga tentang bagaimana realitas lanskap dan format sosial politik yang menjadi basis keseharian warga di lingkungan pinggiran kota. Sejauhmana kemudian perbedaan dimensi ruang interaksi sosial politik keseharian warga mempengaruhi basis kewargaan mereka. Realitas ini juga sangat penting untuk menjadi dasar pijakan bagi upaya perbaikan dan penguatan praktik demokrasi, dan demokratisasi di lingkungan pinggiran, khususnya yang memiliki karakteristik



‘kampung-kota’. Demikian halnya dengan konteks Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk sebagai bagian dari konteks kewilayahan yang memang memiliki karakteristik pinggiran kota karena dari sisi jarak ketiga daerah ini memiliki basis posisi yang sangat berdekatan dengan ruang-ruang perkotaan. Pun demikian, jika ditinjau dari aspek administratif pemerintahan, tentu tiga wilayah ini merupakan wilayah dari tiga kabupaten/kota yang berbeda. Tuatunu sendiri merupakan bagian dari Kota Pangkalpinang. Kemudian, Kace Timur sendiri merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Bangka, sementara untuk Beluluk sendiri merupakan bagian administratif dari Kabupaten Bangka Tengah.

Ketiga wilayah tersebut memiliki karakteristik ‘kampung-kota’ karena memiliki struktur dan karakteristik wilayah yang bersinggungan kuat dengan konteks perkotaan Kota Pangkalpinang. Bagaimanapun juga, Pangkalpinang sendiri merupakan episentrum sebagai pusat ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Posisi tiga ‘kampung-kota’; Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk sendiri di satu sisi memang merupakan bagian dari arena perkampungan yang konektivitas sosial politik, dan ekonominya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari entitas Kota Pangkalpinang sebagai ibu kota sekaligus pusat kekuasaan pemerintah. Tentu ada berbagai aspek yang bertumpu disana, mulai dari daya tarik ekonomi pasarnya, sosial, budaya, dan berbagai infrastruktur publik yang relatif banyak terkonsentrasi disana.

Posisi Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk sendiri merupakan daerah yang dikategorisasi sebagai daerah pinggiran (*pheriphery*). Termasuk juga realitas struktur politik pada lingkungan masyarakat di ketiga wilayah tersebut yang terus mengalami dinamika tantangan dan perubahan yang perlu direspon atau

disikapi secara responsif dan akuntabel. Selain itu, di tengah modernitas kemajuan berkota yang terus digeliatkan oleh pemerintah daerah, tentu terus tumbuh dan berkembang berbagai dinamika tantangan dan kompleksitas yang dihadapi oleh ketiga daerah tersebut. Studi ini tentu diarahkan mampu menjadi basis dan dasar pijakan ilmiah, agar konteks politik tata kelola dan perlakuan terhadap konteks demografi sehari-hari warga ‘kampung-kota’, khususnya yang berdiam pada wilayah pinggiran bisa sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip yang lebih demokratis, partisipatif, humanis dan berkeadilan.

Oleh karena itu, tentu studi komparasi ini menjadi perlu dan menarik untuk dilakukan karena untuk melakukan rangkaian analisis mendalam atas berbagai realitas lanskap sosial politik kewargaan masyarakat di tiga arena tersebut. Ini tentu pada gilirannya diarahkan mampu dalam membangun konsep dan praksis pembangunan yang lebih sensitif terhadap berbagai disparitas perbedaan sosial politik dalam rangka penguatan basis demokrasi dan demokratisasi yang berlangsung dalam praksis sosial politik keseharian warga di lingkungan masyarakat ketiga daerah tersebut. Kajian ini juga menjadi bahan reflektif-kritis bagi pembacaan realitas politik demografi ‘kampung-kota’ dengan berbagai bentuk representasi politik dan model demokrasi sehari-hari warganya, baik daerah yang terus bertumbuh-kembang, ataupun daerah yang mengalami berbagai problem patologi sosial. Jadi, berangkat dari latar belakang masalah di atas, maka kajian penelitian ini dirumuskan pada beberapa rumusan masalah mendasar, diantaranya:

1. Bagaimana perbandingan lanskap sosial politik demografi ‘kampung-kota’ pada daerah pinggiran Tuatunu, Kace Timur, dan Beluluk?
2. Sejauhmana kemudian perbedaan konteks lanskap sosial politik



tersebut disikapi dan disiasati oleh masyarakat dan para pengambil kebijakan?

Studi ini tentu pada gilirannya juga melakukan elaborasi mendalam guna melakukan upaya komparasi atas realitas lanskap sosial politik yang mampu menghadirkan ruang-ruang politik yang memudahkan dan memungkinkan (*enable*) tumbuh-kembangnya ruang deliberatif, akses dan politik kewargaan pada tiga daerah pinggiran tersebut, atau sebaliknya justru membatasi akses dan ruang ekspresif warga untuk aktif-kontributif dalam masyarakat dan pemerintahan. Fokusnya yaitu melihat bagaimana lanskap sosial politik pada daerah pinggiran ‘kampung-kota’, lalu sejauhmana kemudian posisi masyarakat atau elit itu sendiri, seberapa aktif mereka dalam merespon realitas tersebut? Dalam konteks ini, bagaimana basis lanskap sosial politik tersebut bisa berkaitan kuat dengan konteks penguatan kesadaran kolektif warga dalam praksis demokrasi dan demokratisasi. Studi ini tentu sangat kontributif dalam memenuhi beberapa tulisan teoritis maupun praktis terkait diskursus politik demografi daerah pinggiran yang menjadi salah satu kajian yang penting dan perlu mendapatkan banyak perhatian.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam studi ini yaitu menggunakan kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Selain itu, untuk melengkapi rangkaian kajian ini, maka penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi literatur. Adapun yang menjadi fokus utama kajian ini yaitu berkenaan dengan demografi politik dan politik demografi ‘kampung-kota’ yang berada pada kawasan pinggiran Kota Pangkalpinang dengan mengambil tiga lokus penelitian, yakni Kawasan Desa Tua Tunu, Beluluk, dan Kace Timur. adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan teknik observasi

secara langsung, kemudian wawancara secara mendalam (*in dept interview*), dan pendekatan *purposive sampling*; yang dalam hal ini pemilihan dan penentuan para informan didasari pertimbangan bahwa para informan tersebut memiliki berbagai informasi dan data sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini (Moleong, 2002); (Kriyantno, 2006); (Ibrahim, 2016)) Adapun yang menjadi kriteria yaitu mereka para perangkat desa/kelurahan, para muda-mudi desa yang memiliki mobilitas keaktifan dalam berbagai organisasi di tingkat desa, serta para tokoh agama dan masyarakat yang ada di tingkat desa.

PEMBAHASAN

Perspektif ‘Kampung-Kota’

Terkait kajian penelitian tentang politik pedesaan, politik kampung atau politik ‘kampung-kota’ memang bisa dikatakan relatif masih tergolong sangat jarang. Walaupun sudah ada, itupun masih terbatas pada kajian yang mempersoalkan tentang dinamika konflik, dan konteks patologi kemiskinan yang menjadi salah problem dalam kehidupan masyarakat pinggiran perkotaan ataupun pada lingkungan pedesaan. Demografi politik ‘kampung-kota’ menjadi diskursus menarik terkait realitas sosial politik yang saling bermunculan. Realitas demografi politik masyarakat menjadi arena pertarungan kekuasaan di tingkat lokal, baik dalam konteks elektoral maupun *daily politics*.

Istilah kampung-kota tentu memiliki banyak definisi dan pengertian. Setidaknya kampung-kota menggambarkan kondisi kampung yang berada di wilayah pinggiran perkotaan ataupun yang berada di wilayah pertengahan kota. Pun demikian, konteks kampung-kota tentu tidak lepas dari konteks historiografi perkampungan yang sudah terkenal sejak zaman Belanda yang memiliki fungsi sebagai tempat atau arena permukiman para penduduk pribumisasi.



Bahkan beberapa definisi justru mengkonsepsikan kampung sebagai tempat tinggal orang-orang *kolot*, *udik*, dan terpinggirkan, pun begitu, dalam konteks kampung, di dalamnya tersimpan sikap dan ruang kebersahajaan, kesederhanaan, dan keluguan. Dalam konteks ‘kampung-kota’, Tuatunu menjadi ruang sekaligus episentrum penting yang kehadirannya tidak lepas dari wilayah administratif Kota Pangkalpinang. Diskursus kampung kota, tentu juga berkaitan dengan tumbuh-kembang ‘kampung-kota’ yang seakan kian terjerat dan tidak bisa lepas dari perkembangan dan modernisasi kota.

Beberapa kajian penelitian terkait politik warga kampung Sosrokusuman dan kampung Sari Mulyo di Jogjakarta (Budiawan, 2006) yang berhasil membaca bagaimana persinggungan warga Kampung Sarimulyo dan Sosrokusuman yang mencoba untuk terus menghadirkan nuansa lokalitas daur hidup, khususnya melalui tradisi *Selapanan* atau semacam tradisi selamatan di tengah masa krisis yang mereka hadapi. Yang menarik tentu yaitu tradisi *Selapanani* bisa menjadi salah satu media penguat tradisi lokal di tengah dinamika perubahan yang semakin moderen dan terglobalisasi. Hasil kajian tersebut berhasil menjelaskan betapa kemudian nilai-nilai lokal atau yang bernuansa kampung dan desa masih tetap mampu lestari dan eksis di tengah geliat perubahan dan gaya hidup masyarakat perkotaan yang sudah semakin gaul, moderen dan glamor. Jadi tetap ada konteks mata rantai yang tidak terputus dengan proses kemajuan kotanya. Pun demikian, tentu tetap saja ada begitu banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi masyarakat yang bergulat pada pelestarian dan pertahanan tradisi lokalitas. Inilah kemudian yang berhasil dikonseptualisasikan menjadi konteks glocalitas *Selapanan*.

Konteks ini relevan dengan konseptualisasi demokrasi (Santoso, 2013) yang menekankan betapa pentingnya demokrasi dan demokratisasi yang tak hanya sekedar isu-isu politik semata, akan tetapi bagaimanapun juga politik harus perhatian terhadap isu-isu budaya. Lebih lanjut, dimensi budaya dan politik haruslah dikemukakan dan diekspresikan. Ini artinya bahwa demokrasi dipahami sebagai perilaku kolektif dalam dimensi institusionalisme, oleh karenanya, demokrasi merupakan konstruksi ideal yang harus berlangsung dalam level kelembagaan yang menghendaki adanya kontekstualitas (Santoso dalam Ibrahim, 2016). Demikian halnya dalam konteks demografi warga pada arena ‘kampung-kota’ yang memiliki karakteristik yang sangat beranekaragam.

Lanskap Sosial Politik Demografi

Lanskap sendiri merupakan realitas tata ruang dalam sebuah arena ruang atau model tata ruang yang membentang dan merepresentasi konteks visualnya. Konteks lanskap menjadi konteks yang bisa dirasakan. Lanskap juga bisa dianggap sebagai potret pemetaan atas gejala sosial dan berbagai aspek kehidupan sosial lainnya yang tentunya memiliki konteks keteraturan antara yang satu dengan yang lainnya. Politik demografi sendiri merupakan salah kajian politik kependudukan yang berdimensi sosial politik. Struktur sosial politik dikerangkai dengan menggunakan politik demografi agar kajian analisis terhadap fenomena kependudukan tidak lagi terbatas pada nilai-nilai angka statistik. Oleh karena itu, kemudian, hadirilah politik demografi sebagai alternatif untuk menggali penjelasan-penjelasan atas realitas sosial melalui perspektif politik kritis analitis.

Konteks demografi dalam *Landskap* politik di Indonesia sendiri tentu bukanlah sebatas berwajah teknokratis semata



(Ibrahim, 2016), akan tetapi juga dipengaruhi dan dideterminasi oleh konteks kekuasaan. Realitas sosial politik yang dimaksud tentu tidak sekedar hanya dalam ruang pertarungan politik elektoral semata, akan tetapi juga menyebar dan meluas kepada konteks kewargaan atau konteks politik keseharian warga dalam mensikapi dan merespon setiap ruang perubahan yang terjadi di lingkungan mereka. Lanskap sosial politik demografi juga dimaknai sebagai bagian dari ruang 'politik demografi' (Ibrahim, 2016) yang justru menjadikan basis demografi sebagai sasaran dalam rangka mencapai atau meraih suatu tujuan. Lebih lanjut, politik demografi erat kaitannya dengan konteks kehidupan sosial dengan berbagai problem patologi sosial kependudukannya yang sangat berkaitan erat dengan struktur sosial, tradisi budaya, identitas dan konteks perekonomian masyarakatnya. Bagaimanapun juga konteks tersebut saling berkaitan satusama lain.

Lanskap sosial politik demografi juga dimaknai sebagai bagian dari ruang 'politik demografi' (Ibrahim, 2016) yang justru menjadikan basis demografi sebagai sasaran dalam rangka mencapai atau meraih suatu tujuan. Lebih lanjut, politik demografi erat kaitannya dengan konteks kehidupan sosial dengan berbagai problem patologi sosial kependudukannya yang sangat berkaitan erat dengan struktur sosial, tradisi budaya, identitas dan konteks perekonomian masyarakatnya. Bagaimanapun juga konteks tersebut saling berkaitan satusama lain. Dalam demografi, lanskap sosial politik dapat dilacak melalui realitas warga dalam mencapai konsensus. Hal ini juga berkaitan dengan ikhtiar antar warga: sudah sejauhmana misalnya ruang yang memungkinkan antar warga untuk saling mengekspresikan semangat kebersamaan dan juga semangat untuk membicarakan dan mengusahakan nasib bersama. Dalam konteks ini, derajat konsensus sangat dipengaruhi oleh perilaku warganya yang

sangat kolektif dan tidak individualis. Spirit kolektif menjadi salah satu prasarat penting dari upaya untuk mencapai konsensus. Semakin rumit proses warga untuk memperoleh konsensus semakin besar potensi konflik antar warga dalam upaya mencapai tujuan bersama.

Konsep dan Konstruksi Daerah Pinggiran (*Periphery Area*)

Terkait konsep dan konstruksi daerah pinggiran merupakan sebuah konsep yang pertama-tama pernah dikemukakan oleh Pelbrisch pada tahun 1949. Konsep pinggiran menjadi salah satu kajian penting dalam konteks analisis pembangunan sosial di masyarakat. Bahkan John Friedman pernah menjelaskan terkait analisisnya pada keterkaitan dan adanya konteks saling mempengaruhi antara pembangunan kota (*core*) dan pembangunan desa atau kampung (*periphery*).

Konteks daerah pinggiran, atau dalam kawasan perkotaan terdapat kampung yang memiliki karakteristik yang bermacam model dan karakteristik. Oleh karena itulah, realitas dan dinamika perubahan pada daerah pinggiran selalu menghadapi situasi sosial politik yang sangat dinamis dan tidak jarang justru memunculkan kondisi yang begitu kompleks. Kompleksitas yang diharapkan warga tentu juga memerlukan semangat kolektif warga bersama para pengambil kebijakan dalam menuntaskan berbagai persoalan yang terdapat di 'kampung-kota'. Di satu sisi ada warga yang tetap ingin menjadi bagian kesatuan dari wilayah perkotaan, namun di sisi lain juga ada yang begitu berharap setidaknya tetap menjadi bagian yang tidak terlalu 'penuh', masuk pada bagian kesatuan dari sebuah kota. Tantangan perubahan berikutnya juga besar yaitu seiring dengan jumlah pertambahan penduduk yang sangat tinggi setiap tahunnya, yang dianggap justru bisa menjadi penjasar betapa kemudian kompleksitas persoalan yang dihadapi di

daerah pinggiran terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktunya.

Realitas Lanskap Sosial-Politik pada 3 Arena Studi

Adapun gambaran umum terkait daerah atau arena yang menjadi lokus dari penelitian ini diantaranya yaitu terdapat 3 (tiga), diantaranya yaitu Kampung Tuatunu (Kelurahan Tuatunu), Kampung Kace Timur (Desa Katim), dan Kampung Beluluk (Desa Beluluk). Secara geografis, posisi ketiga wilayah dari tiga konteks kampung ini sama-sama berada pada arus pinggiran (*periphery*) atau berada pada lintasan pinggiran pada struktur wilayah perkotaan Kota Pangkalpinang. Inilah yang menjadi salah satu basis argumentasi mengapa kemudian ketiga wilayah tersebut, jika ditinjau dari posisi dan karakteristik demografi sosial-politiknya bisa disebut sebagai bagian dari konteks ‘kampung-kota’ yang memiliki fungsi dan struktur masyarakat yang sangat khas dan unik satu sama lain.

Dalam konteks realitas sosial-politik kehidupan masyarakat di Kelurahan Tuatunu, Desa Kace Timur dan Desa Beluluk, pada dasarnya memiliki ruang dan mobilitas partisipasi masyarakat yang memiliki warna serta karakteristik yang berbeda-beda. Partisipasi aktif dan semangat kolektif warganya dalam konteks masyarakat Tuatunu yang begitu aktif dan partisipatif menjadi penjabar betapa logika komunalitas warga menjadi sangat penting sebagai salah satu modal sosial bagi pihak pemerintahan lokal dalam mengelola tertib sosial keseharian warganya.

Selain itu, hampir setiap program pembinaan, program pembangunan, dan program pengambilan keputusan selalu terbuka ruang yang leluasa bagi publik warganya untuk terlibat secara aktif sehingga *sense of belonging* terhadap nasib kemajuan dan kelestarian adat budaya lokal menjadi sangat kuat. Dalam

hal ini ada model kemitraan yang begitu terawat kuat dalam keseharian publik warganya. Ini tentu menjadi modal penting dalam memperkuat tujuan bersama, baik dalam konteks sosial, budaya, agama dan kesejahteraan ekonomi.

Posisi dari tiga kampung tersebut berada pada wilayah administratif pemerintahan yang berbeda-beda. Tuatunu misalnya merupakan bagian kewilayahan administratif Kota Pangkalpinang. Sementara itu, Desa Kace Timur merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka, dan Desa Beluluk merupakan bagian dari wilayah administratif Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah. Dengan demikian, sangat menarik kemudian untuk menelusuri konteks politik demografi pada tiga arena pinggiran tersebut. Pada bagian ini dijelaskan kilasan gambaran dari kewilayahan ‘kampung-kota’ tersebut secara umum. Berikut gambaran umumnya:

a. Kampung Tuatunu

Jauh sebelum menjadi bagian dari Kelurahan Tuatunu Indah, desa ini pada awalnya merupakan bagian dari wilayah administratif Kabupaten Bangka. Jika ditinjau lagi tentang asal muasal administratif Tuatunu, sebelumnya Tuatunu merupakan desa yang menjadi bagian wilayah administratif Kabupaten Bangka. Kemudian seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya dimulai ketika adanya Peraturan Daerah (Perda) No.7 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan yang mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 1984 yang terdiri dari 4 Kecamatan, 55 kelurahan, dan 3 desa, yang kemudian digabung menjadi 35 kelurahan. Tuatunu menjadi salah satu desa yang otomatis berubah statusnya menjadi salah satu kelurahan di Kota Pangkalpinang (Elvian,



2010) 'Kampung Tuatunu' atau Kelurahan Tuatunu Indah merupakan salah satu kelurahan dari 36 kelurahan yang ada di Kota Pangkalpinang. Adapun batas-batas administratif wilayah Tuatunu diantaranya:

- 1) Sebelah Utara Tuatunu berbatasan dengan Desa Balunijuk Kabupaten Bangka,
- 2) Sebelah Selatan Tuatunu berbatasan dengan Desa Kace Kabupaten Bangka,
- 3) Sebelah Barat Tuatunu berbatasan dengan Desa Air Duren Kabupaten Bangka,
- 4) Sebelah Timur Tuatunu berbatasan dengan tiga kelurahan; yaitu Kelurahan Bukit Merapin, Kelurahan Kacang Pedang, dan Kelurahan Air Salemba.

Sementara itu, jika ditinjau dari sudut historiografi kewilayahan, tepatnya pada fase-fase Inggris dan Belanda berkuasa, Kampung Tuatunu dulunya justru merupakan salah satu bagian dari distrik Pangkalpinang. Ini juga tidak lepas dari konteks politik kekuasaan kolonial yang begitu berkepentingan dengan konteks penguasaan sumberdaya timah dan lada yang menjadi komoditas strategis dan bernilai ekonomi tinggi. Jika mengutip *Kaart van eiland Banka 1819* (Elvian, 2010), Kampung Tuatunu atau *Toutuna* merupakan salah satu bagian kampung yang posisinya berada pada jalan darat yang menghubungkan wilayah barat dan tengah pulau Bangka (dari Muntok hingga ke Tuatunu/ *Toutuna* dan Pangkalpinang).

Demografi Berkampung

Jika ditinjau dari konteks demografi Tuatunu, masyarakatnya mayoritas merupakan orang Melayu yang tentunya juga memiliki struktur dan sistem sosial politik bermasyarakat yang begitu kental dengan unsur-unsur kemelayuan. Bahkan jika diamati dari potret keseharian kehidupan dan mobilitas

kewargaannya, kemudian dari tradisi atau adat-istiadat masyarakatnya yang begitu kental dengan budaya melayu, kemudian yang paling mencolok misalnya terkait dengan model perumahan atau rumah tinggal yang dikembangkan masyarakat lokal Tuatunu. Konteks rumah atau tempat tinggal warganya sebagian besar justru terlihat sekali dengan karakteristik khas masyarakat melayu.

Konteks pemukiman masyarakat Tuatunu juga berkaitan erat dengan semangat komunalitas warganya yang begitu kental dalam berbagai aspek kehidupannya, mulai dari kepentingan pencahariannya di kebun, aktivitas peribadatan warga, sampai dengan struktur perkampungannya yang berbeda dengan kebanyakan masyarakat lainnya yang terdapat di Kota Pangkalpinang. Bahkan konteks bangunan dan susunan pembangunan rumah antar warga yang terlihat sama dan terkesan tersusun rapi memanjang di sepanjang pinggir jalan kampung merupakan model kampung yang sengaja disiasati oleh Pemerintahan Kolonial Belanda pada waktu itu. Bagi pihak kolonial, model pengembangan perumahan yang berjejer memanjang di sisi kiri kanan jalan, dan terkonsentrasi di sepanjang wilayah kampung merupakan siasat dan strategi mereka agar lebih efektif dalam melakukan kontrol dan pengawasan terhadap mobilitas warga, baik untuk kepentingan perlawanan maupun untuk kepentingan kemudahan bagi pihak kolonial Belanda dalam melakukan pemungutan, penertiban, dan juga pendisiplinan terhadap warga yang dianggap membangkang dan memberontak pemerintah pada waktu itu. Pun demikian, kondisi kampung pada waktu itu tetap saja sepi dan tidak terlihat aktivitas mencolok dari penduduk.

Hal tersebut dikarenakan sebagian besar penduduk justru mengindahkan pengaturan yang dilakukan oleh Belanda agar penduduk bisa tinggal dan menetap di kampung. Yang terjadi justru sebagian



besar warga tetap menetap di tengah-tengah hutan atau *ume* (ladang pertanian padi darat), yang mana terdapat pondok-pondok tradisional yang terbuat dari kulit kayu. Pondok ini menjadi tempat beristirahat warga yang sehari-hari berkebun lada atau berbagai tanaman penyela lainnya. Potret ini juga berlangsung dan tersebar hampir di sebagian besar wilayah yang penduduknya mayoritas berkebun lada, khususnya yang berdiam di kampung-kampung yang tersebar di kabupaten/ kota di pelosok Bangka Belitung. Informasi ini disarikan dari beberapa proses wawancara dan diskusi dengan beberapa warga; Bokher (74thn), Saimi 65thn), Rosyidi Taat (68thn). Selain itu, informasi ini juga disarikan dari hasil diskusi panjang peneliti dengan Erwiza Erman, selaku sejarawan yang banyak melakukan kajian penelitian tentang isu historiografi pertambangan di Bangka Belitung.

Berdasarkan penelusuran lapangan, dalam konteks kehidupan masyarakat Tuatunu, terlihat sekali kekentalan budaya dan semangat masyarakat lokal dalam melestarikan adat-istiadat yang menjadi karakteristik khas warga melayu Kampung Tuatunu. Ada beberapa konteks kearifan lokal yang menjadi instrument penting dalam merawat struktur kewargaan, sekaligus dalam rangka menguatkan struktur demografi sosial politik warga Tuatunu yang sangat terbuka, religious, dan memiliki sikap keramahtamahan yang sangat kuat antar sesama warga, baik di dalam maupun warga pendatang.

Di Tuatunu terdapat beberapa konteks kearifan lokal, baik berdimensi sosial, ekonomi maupun politik yang menjadi ciri khas pembeda warga Tuatunu dengan warga lainnya di luar Tuatunu. Misalnya; terdapat tradisi *Nganggung*, tradisi ruwahan, tradisi maulid Nabi, tradisi bekelakar, tradisi dan adat-istiadat Islam yang masih telestasi dengan baik.

Selain itu, mobilitas berkebun warga yang masih sangat tinggi menjadi kearifan tersendiri bagi warga dalam menjaga model ekonomi yang relatif masih tradisional, komunal dan begitu menjunjung tinggi nilai-nilai solidaritas, nilai komunalitas, dan nilai kekeluargaan yang tinggi antar warga.

Pada masyarakat Kampung Tuatunu dikenal sebagai daerah dengan penduduknya yang masih mempertahankan erat tradisi dan budaya melayu, spirit komunalitas warga yang masih terjaga, rumah-rumah bergaya arsitektur melayu tradisional atau bergaya lama menyebar di sudut-sudut kampung, termasuk juga konteks religiusitas warga yang masih mengakar kuat dalam keseharian warganya, tentu menjadi penjabar betapa kemudian lanskap sosial politik pada kehidupan masyarakat Tuatunu begitu kuat dan dinamis sehingga mampu melakukan berbagai penetrasi atas berbagai ‘kemajuan’ dan kemoderenan dalam konteks berkota.

Ruang Publik dan Politik Kewargaan di Tuatunu

Jika ditinjau dari konteks keberadaan ruang publik (*public sphere*) tentu Tuatunu memiliki ruang publik yang relatif masih sangat alami dan tersebar di berbagai penjuru kampung. Ini menjadi arena penting, sekaligus strategis dalam menyambung tali persaudaraan antar warga. Di sini, bisa diartikan juga bahwa interaksi kewargaan menjadi lebih intensif jika dibandingkan wilayah lainnya di Kota Pangkalpinang, karena Tuatunu menjadi satu-satunya kawasan perkotaan yang berkarakteristik kampung, yang sampai saat ini masih menjaga erat konteks kemelayuan yang menampilkan potret demografi sosial politik yang sangat dinamis dan mampu merekatkan ruang deliberatif atau komunikasi serta hubungan emosional antara warga kampung.



Di Tuatunu ada beberapa macam ruang, baik formal maupun informal yang menjadi arena diskursif bagi warga kampung untuk mengelola nasib bersama. Misalnya; dalam setiap tahun ada beberapa momentum yang bisa menjadi ruang bagi khalayak warga, atau perwakilan dari warga untuk terlibat dalam menjaga tertib sosial atau keteraturan sosial. Ini melibatkan pihak pemerintahan desa/ kelurahan, dan juga melibatkan pihak aparat keamanan (khususnya Babinkamtibnas), serta pihak pemuda-pemudi yang tergabung dalam komunitas-komunitas lokal, mulai dari yang berbasis agama, maupun yang berbasis sosial kemasyarakatan.

Jika ditinjau dari aspek partisipasi warga di Tuatunu, partisipasi masyarakatnya dalam konteks pemilihan umum (PEMILU), atau berbagai momentum electoral lokal maupun nasional, masyarakat Tuatunu memiliki kecenderungan partisipasi yang relatif sangat kuat, baik dalam konteks partisipasi politik formal maupun informal. Selain itu, partisipasi pemuda-pemudi kampung dalam berbagai ruang-ruang sosial keagamaan menjadi salah satu penjelaras betapa masyarakatnya memiliki atensi serius dalam merespon setiap ruang politik yang memiliki tujuan untuk kepentingan bersama.

b. Kampung Kace Timur

Kampung Kace Timur sebelumnya merupakan bagian kesatuan dari Desa Kace Kecamatan Mendobarat Kabupaten Bangka. Kace Timur merupakan wilayah yang secara geografis berada pada sisi barat Kota Pangkalpinang. Kace Timur menjadi salah satu desa yang memiliki karakteristik 'kampung-kota' yang sangat unik dari berbagai lanskap sosial politiknya. Tentu ada beberapa konteks yang menghadirkan potensi serta tantangan tersendiri bagi praktik kewargaan yang berlangsung di Kace Timur. Salah satu keunikan yang terdapat

di Desa Kace Timur yaitu status penduduknya yang sebagian besar masih berstatus kependudukan sebagai warga Pangkalpinang. Hal ini dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP) warganya yang justru masih banyak yang ber-KTP Pangkalpinang.

Demografi Berkampung

Jika ditinjau dari konteks demografi Kace Timur, masyarakatnya cukup heterogen. Pun demikian, mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Dari potret keseharian kehidupan dan mobilitas kewargaannya, masyarakat yang berdomisili di Kace Timur begitu terbuka dengan pendatang. Dalam konteks demografi kampung di Kace Timur, ada konteks keterbelahan sosial yang mewarnai dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari. Pun demikian, konteks tersebut tidak mengarah kepada potensi konflik yang serius, baik vertical maupun horizontal. Hal ini dikarenakan praktek kewargaan yang berlangsung dalam keseharian warga di Kace Timur terbilang sangat aktif dan diskursif. Hal ini terlihat dari keaktifan dari warga desa dalam merespon setiap isu pemerintahan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan atau kepentingan warganya. Beberapa isu krusial yang kerap memunculkan partisipasi aktif dan kritis dari warga, misalnya dalam isu aspirasi masyarakat agar Kace Timur bisa lepas dari wilayah administratif Kabupaten Bangka, dan bisa dialihstatuskan menjadi wilayah administratif Kota Pangkalpinang.

Selain itu, dinamika politik dan bekerjanya demokrasi antagonistik juga tampak dalam dinamika sosial politik sehari-hari warga (Diamond, 2003), termasuk misalnya dalam konteks adanya tuntutan masyarakat lokal agar Kepala Desa yang dianggap tidak mampu bekerja, ataupun ditengarai warga melakukan praktik tata kelola pembangunan dan keuangan yang kurang demokratis, maka

muncul tuntutan agar pejabat Kepala Desa Kace Timur bisa mundur. Belum lagi sengketa batas wilayah dan juga rawan konflik juga menjadi arena diskursif bagi warga untuk berpartisipasi secara aktif dan kritis.

Struktur perumahan di Kace Timur relatif beranekaragam, dan sebagian besar terlihat sudah sesuai dengan konteks arsitektur moderen. Jadi, hampir sulit menemukan gaya perumahan atau rumah tempat tinggal yang bergaya arsitektur tua atau lama. Struktur kewargaan yang terjalin di Kace Timur juga juga sangat berlangsung harmonis. Walaupun kemudian ada konteks pengelompokan warga pada prinsip dan praktek keagamaan yang mereka lakukan dalam kehidupan sehari-hari.

Ruang Publik & Politik Kewargaan di Kace Timur

Jika ditinjau dari konteks keberadaan ruang publik (*public sphere*) di Kace Timur, tentu ruang ibadah atau masjid menjadi satu-satunya ruang deliberatif bagi pertemuan warga dari berbagai kelas dan strata sosial. Yang menarik adalah adanya model pengelompokan berdasarkan basis aliran pemahaman dan praktek keagamaan. Di satu sisi ada kelompok warga dari sisi timur yang memposisikan diri sebagai kelompok masyarakat asli kampung yang masih begitu berharap dengan penguatan nilai-nilai lama atau praktek religiusitas yang sangat identik dengan pelestarian adat-istiadat dan budaya lokal. Sementara di sisi lain, ada kelompok warga di sisi timur yang kemudian memposisikan diri sebagai kelompok masyarakat fleksibel dalam menjalankan praktek keagamaan. Pun demikian, posisi tersebut sebetulnya saling menegaskan dalam praktek kehidupan dan aktivitas keagamaan warga sehari-hari. Yang menarik adalah ruang pengajian menjadi arena yang mampu mempersatukan berbagai kelompok

masyarakat yang ‘terbelah’ dalam melakukan praktek keagamaan sehari-hari. Selain itu, kehadiran organisasi PKK di tingkat desa selama ini relatif aktif sehingga hal tersebut juga menjadi ruang bertumbuhnya nilai-nilai demokrasi partisipatif, baik secara formal maupun informal.

Bisa dikatakan, hampir sulit menemukan ruang publik khas atau khusus yang saling berjejaring menjadi arena intensif bertemu dan berinteraksinya antar warga dalam menjalin solidaritas sosial antar satu sama lain (Rahman, 2009). Selain itu, model pencapaian konsensus pada masyarakat Kace Timur juga sangat dinamis. Prinsipnya, ada semacam batas-batas tertentu yang membuat warga begitu solid dan punya semangat kolektif, akan tetapi ada batasan tersendiri yang menjadikan warga pada suatu waktu begitu individualis. Konteks ini relevan dengan pilihan sikap rasional (*rational choice*) yang mampu menimbang kepentingan individu dan kepentingan kolektif warga.

c. Kampung Beluluk

Kampung Beluluk merupakan bagian Kecamatan Pangkalanbaru Kabupaten Bangka Tengah. Kampung Beluluk sebelumnya merupakan bagian kesatuan dari Kampung Dul. Dari luas wilayah, Desa Beluluk memiliki wilayah dengan luas 6,3704 km dengan jumlah penduduk sebesar 5.052 jiwa. Fasilitas pendidikan bisa dikatakan masih sangat terbatas di wilayah ini. Terlihat dari jumlah TK ada 1 buah, SD 1 buah, dan SMK 1 buah. Di Desa Beluluk berkembang beberapa industri skala besar, kecil dan menengah. Terhitung ada 1 industri besar, 1 industri kecil, dan 20 industri rumah tangga (UMKM). Profesi masyarakatnya sangat beragam, mulai tenaga kesehatan, dokter, paramedis, bidan, dan terdapat dukun beranak.



Lebih lanjut, konteks pertambangan juga sempat berlangsung dalam mewarnai perekonomianarganya. Selain itu, ada beberapaarganya yang bergiat dalam budidaya sayur-sayuran untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pasar lokal.

Jika dilihat dari toponim Desa Beluluk, asal nama Beluluk berasal dari sebuah nama pohon yang banyak tumbuh di kawasan ini. Pohon ini biasa dikenal dengan pohon aren yang banyak digunakan penduduk untuk diambil niranya atau air yang biasa digunakan untuk membuat gula merah tradisional. Masyarakat setempat biasa menyebut beluluk dengan istilah Beluluk. Sampai saat ini pohon beluluk masih terdapat di wilayah desa ini.

Desa Beluluk sendiri merupakan wilayah pemekaran dari Kampung Dul, yang memiliki fungsi sebagai wilayah transit berbagai aktivitas barang dan jasa, atau bisa juga disebut semacam ‘*gateway*’; atau gerbang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena keberadaan Bandara Depati Amir secara administratif masuk kedalam wilayah desa ini. Keberadaan Bandara Depati Amir sendiri diharapkan akan magnet bagi pembangunan desa Beluluk dari berbagai sektor.

- 1) Secara administratif Sebelah Utara Kampung Beluluk berbatasan dengan Kelurahan Kampung Dul;
- 2) Sebelah Selatan Kampung Beluluk berbatasan dengan Kampung Jeruk;
- 3) Sebelah Timur Kampung Beluluk berbatasan dengan Desa Padang Baru;
- 4) Sebelah Barat Kampung Beluluk berbatasan juga dengan desa Padang Baru.

Desa Beluluk didiami oleh berbagai etnis yang hidup berdampingan dengan suasana yang penuh persaudaraan, etnis atau suku tersebut adalah Cina, Melayu, Flores, Batak, Madura, Jawa, dan lain-lain dengan mata pencaharian masyarakat desa Beluluk adalah pada sektor perdagangan, jasa, PNS, buruh

harian, wiraswasta, petani, dan lain-lain. Satu hal yang menjadi kekhasan adat istiadat sosial budaya masyarakat desa Beluluk sejak dulu yang tetap terpelihara dengan baik sampai saat ini adalah nganggong dan juga adat istiadat dan budaya tionghoa.

Jika ditinjau dari konteks perekonomian lokalnya, Desa Beluluk bisa perlu mendapatkan perhatian semua *stakeholder*, khususnya berkaitan dengan pengembangan dan penguatan sektor perdagangan yang sangat pesat di kawasan ini. Di Beluluk terdapat Hotel Soll Marina, yang merupakan salah satu hotel berbintang kebanggaan masyarakat Bangka Belitung. Desa Beluluk juga memiliki model topografi yang unik karena terdapat daerah perbukitan yang memiliki panorama dan struktur bentang alam yang sangat menarik dan berpotensi sebagai salah satu atraksi wisata minat khusus berbasis alam. Di desa Beluluk juga terdapat beberapa kawasan perumahan yang mencerminkan bahwa desa ini sudah merupakan wajah sebuah perkotaan. Tidak mengherankan kemudian, sempat juga muncul riak-riak kecil beberapa warga yang menghendaki Beluluk menjadi bagian dari kelurahan di Pangkalpinang (Ibrahim, 2013).

Demografi Berkampung

Jika ditinjau dari konteks demografi Kampung Beluluk, masyarakatnya cukup heterogen. Pun demikian, masyarakatnya kurang lebih sekitar 60% mayoritas penduduk adalah etnis tionghoa. Sementara itu, pada Kampung Beluluk yang dikenal dengan penduduknya yang heterogen. Perkampungan ini terletak di kawasan perbatasan Bangka Tengah dan Kota Pangkalpinang. Pola interaksi yang terjalin pun berbeda. Hubungan sosial antara warga Beluluk Timur dan Barat tidaklah seakrab hubungan warga di bagian bagian Beluluk Timur. Di Beluluk bagian Timur, sekira pukul 9 malam,



masih banyak pintu rumah dan toko-toko usaha warga dibuka, sementara pada sisi timur, justru sebagian besar rumah warga sudah jarang yang terbuka. Situasi tersebut seakan membuka tangan bagi siapa saja yang ingin bertamu dan melakukan interaksi dan komunikasi ke sesama warga kampung. Kontras dengan suasana di Beluluk bagian Timur. Di waktu yang bersamaa, banyak rumah-rumah mendadak senyap dan sepi, seperti tak berpenghuni. Padahal, pagi hingga sore, rumah itu digunakan untuk menjual dan berdagang berbagai keperluan sehari-hari.

Ruang Publik & Politik Kewargaan di Kampung Beluluk

Jika ditinjau dari konteks keberadaan ruang publik (*public sphere*) di Beluluk, tentu ruang ibadah menjadi salah satu bagian yang penting di dalam masyarakat. Demikian juga kehadiran ruang publik pada konteks masyarakat di lingkungan Beluluk relatif sedikit jika dibandingkan dengan dua wilayah lainnya yang menjadi lokus dari penelitian ini. Karakteristik Kampung Beluluk yang memiliki corak semi perkotaan menyebabkan posisinya menjadi arena transit atas berbagai kegiatan bisnis masyarakat perkotaan. Akibatnya tentu relasi sosial masyarakat sangat bergantung dari relasi identitas masing-masing.

Dalam konteks ini, ada basis interaksi sosial yang lebih banyak melibatkan konteks dari basis latar belakang yang sama. Kondisi tersebut juga disebabkan oleh karakteristik perkampungan yang lebih dekat dengan wilayah perkotaan menyebabkan Beluluk relatif lebih banyak mengandalkan interaksi ekonomi dalam ruang sosial kewargaannya sehari-hari dibandingkan dengan konteks hubungan emosional yang terbangun di antara warga lokal.

Selain itu, terdapat juga pengelompokan warga yang lebih

didasari oleh basis identitas sosial keagamaan. Konteks ini menyebabkan kurang ‘cairnya’ relasi sosial kewargaan antar berbagai kelompok etnis, suku dan agama, baik mereka dari masyarakat asli sekitar, ataupun mereka para pendatang dari berbagai wilayah, baik dari Bangka maupun dari luar Bangka.

Jika ditinjau dari aspek partisipasi warga di di Beluluk, berdasarkan hasil wawancara, maka partisipasi masyarakat dalam konteks sosial politik kewargaan sehari-hari, maka masih terkesan kurang dan terbatas hanya pada hanya seremonial agama yang terkesan eksklusif. Konteks ini tentunya perlu diperkuat dan diperluas dalam cakupan partisipasi yang lebih luas dan lebih banyak melibatkan warga dari berbagai unsure etnis, suku dan agama agar terjalin hubungan emosional untuk saling bekerjasama sekaligus membangun semangat kolektivitas dalam berbagai arena sosial, politik, dan ekonomi warga sehari-hari. Sejauh ini, ada konteks partisipasi warga yang begitu pasif, khususnya mereka yang apatis dan jarang terlibat dalam berbagai aktivitas sosial yang menghendaki kehadiran semua warga desa. Selain itu, demografi sosial ekonomi warga di Beluluk juga ditengarai menjadi salah satu faktor rumitnya konteks partisipasi warga, khususnya dalam konteks informal.

SIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa dalam realitas lanskap ‘kampung-kota’ memperlihatkan bahwa terdapat fragmentasi dalam praktik kewargaan pada dua desa, khususnya untuk daerah Desa Beluluk dan Desa Kace Timur. Fragmentasi tersebut terdapat dalam ruang interaksi sosial dan praktik keagamaan warga sehari-hari, misalnya pada aspek religiusitas, tradisi lokalitas & kearifan budaya, namun menjadi mencair jika hubungannya dengan kepentingan politik



kolektif warga, misalnya dalam aspek perjuangan untuk mendapatkan akses dan menyuarakan aspirasi warga terkait wacana pemekaran ataupun perjuangan alih status menjadi warga Kota Pangkalpinang. Konteks fragmentasi yang dimaksud masih terbatas dan tidak sampai menjurus ke konflik yang berarti di antara warga.

Sementara itu, dalam konteks masyarakat Tuatunu, tidak ditemukan adanya fragmentasi. Hal tersebut juga didukung dengan semangat komunalitas warga yang terlihat dalam berbagai ruang dan interaksi sosial kewargaan, baik untuk kepentingan ekonomi, politik, dan tradisi budaya dan bidang keagamaan, nyaris terjalin interaksi yang begitu kuat. Selain itu, lanskap budaya lokal sangat tergambar dalam praktik kewargaan yang menjunjung nilai kerjasama, gotong royong, eksistensi nilai-nilai adat dan budaya lokal melayu yang masih telestari kuat hingga saat ini. Kondisi tersebut juga didukung dengan simbol-simbol kemelayuan yang tampak dalam arsitektur rumah adat dan rumah warga yang masih dengan mudah ditemukan di Tuatunu. Walaupun begitu, konteks Tuatunu memperlihatkan sisi berbeda yang mana semangat komunalitas kewargaan masih bertahan hingga saat ini, walaupun realitas dalam beberapa tahun terakhir terus di gerogoti oleh proyek modernisasi pembangunan dan perluasan komunitas warga kota, baik yang pendatang maupun para penduduk lokal di Bangka yang mulai mendiami perumahan-perumahan moderen.

Studi ini pada gilirannya juga menemukan bahwa masih adanya disparitas kemajuan dan perubahan konteks lanskap sosial-politik pada daerah pinggiran 'Kampung-Kota'. Disparitas tersebut menyebabkan semangat komunalitas warganya semakin tergerus sehingga menjadikan warganya semakin individualis dan kapitalis. Inilah kemudian yang disebut dalam artikel ini sebagai

'*market citizen*'. Sementara, di Kace Timur dan Beluluk, mulai terjadi konteks pergeseran makna dan praktis sosial budaya warga sehari-hari, akibatnya tentu modal sosial kewargaan menjadi lemah dan kian tergerus. Tuatunu memiliki konteks modal sosial yang masih kuat dibandingkan dua wilayah lainnya. Sementara, Kace Timur, ada modal sosial yang masih terawat, namun masih butuh intervensi berlanjut dari pihak pemerintah agar ada perubahan sosial yang lebih relevan untuk melestarikan nilai-nilai komunalitas dan solidaritas warga. Lebih lanjut, terdapat juga konteks kearifan lokal budaya yang menjadikan praktik kewargaan yang cukup efektif dalam mengelola tertib sosial dan tertib politik bersama. Potensi konflik pada tiga wilayah pinggiran pada dasarnya sama-sama terdapat potensi konflik. Namun perbedaannya yaitu pada derajat potensi konflik yang muncul, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada masyarakat Tuatunu, konteks lokalitas menjadi salah satu ruang yang menjadikan kampung ini memiliki karakteristik komunalitas yang masih telestari dengan baik, selain itu konteks religiusitas masyarakat Tuatunu sangat terlihat dalam praktek sosial politik sehari-harinya, termasuk dalam proses pencarian atau pencapaian konsensus, aktivasi lembaga formal maupun informal di Tuatunu relatif berjalan dengan baik, terbukti dengan komunitas anak muda, termasuk juga para muda-mudi penggiat masjid yang begitu aktif dalam mendukung berbagai program yang berbasis pada agenda sosial keagamaan maupun sosial kemasyarakatan.

Lebih dari pada itu, partisipasi politik masyarakat Tuatunu relatif tinggi, khususnya dalam konteks partisipasi politik formal, termasuk juga dalam konteks partisipasi masyarakat dalam ruang sosial politik sehari-hari, masih terdapat semangat komunalitas warga untuk saling memperhatikan dan

mempedulikan satu sama lain, selain itu juga masih kuatnya tradisi gotong royong. Sementara itu, pada konteks masyarakat Kace Timur, temuan sementara yaitu adanya pengelompokan warga dalam praktek keagamaan. Yang menarik justru konteks pengelompokan tersebut tidak berlaku ketika berkaitan dengan urusan pemerintahan desa atau kepentingan publik. Politik kewargaan dalam konteks Kace Timur relatif aktif. Persoalannya adalah selalu saja ada perbedaan persepsi terkait praktek keagamaan, misal satu sama lain justru memiliki beberapa praktek beribadat yang terkesan saling dipersoalkan satu sama lain.

Namun, hal tersebut tidak pernah berlanjut menjadi konflik serius antar warga. Selain itu, menjadi menarik kemudian untuk melihat partisipasi warga yang begitu kuat menjadi harapan tersendiri dalam mendorong penguatan kualitas demokratisasi dalam kehidupan masyarakat kampung yang sudah mulai terjamah dengan modernitas berkota. Tentu konteks kemoderenan selalu menghadirkan konsekuensi yang perlu perhatian serius untuk mengelola. Sama halnya dengan konteks mengelola konflik agar bisa menjadi bernilai bagi proses pendidikan kewargaan untuk saling menghormati, menghargai pendapat, toleran, dan saling mendukung dalam setiap upaya untuk memajukan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiawan, O. (2006). Siasat Kaum Urban di Ranah Tradisi (Studi Kasus Komparasi Selamatan pada Warga Sosrokusuma dan Sari Mulyo. *Jurnal Balairung Edisi 076XX Edisi 10 Tahun XX*.
- Diamond, L. (2003). *Developing Democracy Toward Consolidation*. Yogyakarta: IRE Press Yogyakarta.
- Elvian, d. T. (2010). *Organisasi Sosial Suku Bangka Melayu di Tuatunu*. Pangkal Pinang: Dinas kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Pangkal Pinang.
- Ibrahim. (2013). *Bangka Tengah dalam Hrmoni Kata*. Bangka Tengah: BPMPD Kabupaten Bangka Tengah.
- Ibrahim, d. (2016). *Lobi Politik Berbasis Etnis dan Agama dalam Percaturan Politik Lokal di Kabupaten Belitung Timur*. Kerjasama antara BKKBN Provinsi, PSKK UBB dan PSKK UGM.
- Kriyantno, R. (2006). *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahman, A. (2009). *Politik, Partisipasi, dan Demokrasi dalam Pembangunan*. Malang: Averroes Press.
- Rendy. (2017). Menuntaskan Konsensus Lokal-Nasional(yang) Berkelanjutan: Membaca Ulang Rsionalisasi dan Idealisasi Pembangunan Model GBHN. *Journal Society 5 (1)*, 23-31.
- Santoso, P. (2013). Menjaga Martabat dalam Berdemokrasi. Draft Publikasi Paper Seminar Nasional.
- Sugiato, R. (2006). Menera Kota Menakar Peradaban (Narasi Atas Modernitas dan Pergulatan Hasrat Manusia. *Jurnal Balairung Edisi 076XX edisi 10 Tahun XX*.
- Profil Dea Beluluk Kabupaten Bangka Tengah 2017
- Profil Desa Kace Timur Kabupaten Bangka Induk 2017
- Profil Kelurahan Tuatunu Kota Pangkalpinang, 2017





Mendorong Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia

Sandy Pratama¹; Arief Hidayat²; Putri Aisyah¹

¹Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

²Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Gajah Mada

Email: sandy_djarib@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk memberikan telaah kritis terhadap reposisi pelembagaan oposisi di parlemen berikut penguatan fungsi kontrol terhadap parlemen itu sendiri oleh masyarakat sipil. Dinamika sistem politik pasca orde baru mendesak terciptanya tatanan mekanisme checks and balances yang mampu mengakomodir peliknya persoalan tata kelola kebijakan publik dalam sistem presidensial dengan parlemen multi partai. Tulisan ini dengan studi deskriptif analitis. Sumber data diperoleh dari referensi tentang partai politik dan pemilu serta relasi kuasa antar kekuatan politik. Tulisan ini mengambil setting celah parlemen yang membutuhkan kehadiran lembaga kontrol terhadap fungsi penyeimbang kekuasaan eksekutif sebagai konsekuensi dari pengejawantahan kewenangan yang cenderung dilematis. Penulis menyimpulkan bahwa jejaring masyarakat sipil dapat menjadi alternatif dominan untuk menjalankan peran pengawasan terhadap kinerja legislatif di parlemen. Ketika eksekutif secara konstitusional tak terlalu mampu mengimbangi fungsi pengawasan parlemen, maka reposisi organisasi masyarakat sipil yang dianggap sebagai representasi utuh dan ideal dari kepentingan masyarakat banyak, menjadi pilihan terbaik untuk meredakan menguatnya demokrasi kolusif. Sinkronisasi regulasi, niat baik dari partai politik, peran kontrol masyarakat civil, dan sinergisasi cara pandang terhadap konsekuensi sistem multipartai yang tumbuh menjadi dasar demokratisasi yang lebih maju.

Kata Kunci: oposisi; kontrol masyarakat sipil; multipartai; check and balances

Abstract

This paper aims to provide a critical review of the repositioning of the institutionalization of opposition in parliament and strengthening the function of control of parliament itself by civil society. The dynamics of the new post-order political system urges the creation of a system of checks and balances that is capable of accommodating the complicated issue of public policy governance in presidential systems with this multi-party parliament. This paper is a descriptive analytical study. Data sources were obtained from references about political parties and elections and power relations between political forces. This paper takes the setting of a parliamentary loophole that requires the presence of a control body on the balancing function of executive power as a consequence of the manifestation of authority that tends to be dilemmatic. The author concludes that the network of civil society can be the dominant alternative to carrying out a supervisory role on legislative performance in parliament. When executives are constitutionally unable to adequately compensate for the function of parliamentary oversight, repositioning of civil society organizations that are considered as a complete and ideal representation of the interests of many people is the best choice to reduce the strengthening of collusive democracy. Synchronization of regulations, good intentions of political parties, the role of control of civil society, and the synergy of the perspective on the consequences of multiparty systems that grow into the basis of more advanced democratization.

Keywords: *oposition; civil society controlling; multi-party; check and balances*

Dikirim: Jul 23, 2019
Diterima: Jul 24, 2019
Dipublikasi: Jul 31, 2019

To cite this article, please refer to:

Pratama, S., Hidayat, A., & Aisyah, P. (2019). MENDORONG Reformasi Parlemen Melalui Kekuatan Civil Society Di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 1(1), 50-62. <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.6>

PENDAHULUAN

Kebebasan yang muncul dalam sistem demokrasi menuntut hadirnya elemen di luar negara untuk berperan serta aktif dalam memunculkan isu-isu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Salah satu lembaga yang eksis dan menjadi pilar demokrasi adalah entitas parlemen. Dalam prakteknya parlemen yang merupakan representasi dari wakil rakyat, berubah menjadi seolah mewakili kelompok kepentingan atau bahkan partai tertentu. Kuatnya persoalan ini memunculkan kritik pedas bagi institusi parlemen yang jauh dari aspirasi rakyat (konstituennya). Oleh sebab itulah, komunitas masyarakat sipil (*civil society*) dituntut untuk dapat mengembalikan marwah parlemen ke jalan yang benar sesuai dengan fungsi asal dan juga cita-cita keberadaannya.

Dalam kacamata sejarah, entitas *civil society* memang tidak akan terlepas dari ide tentang demokrasi. Fenomena ini bahkan dapat dilacak sejak karya klasik Aristoteles berjudul *Politics*. Dalam buku ini, Aristoteles membahas mengenai *koinonia politike* sebagai konsep awal dari masyarakat warga. *Koinonia politike* dalam perjalanannya diterjemahkan sebagai *politica communicatio*, *communitas politica*, *civilis communitas*, *societas civilis* hingga akhirnya menjadi *civil society*.

Merujuk pada hasil terjemahan tokoh *renaissance* Italia, Leonardo Bruni, atas karya Aristoteles tersebut, *koikonoia politike* mengarah pada pengertian tentang : pemerintahan negara republik, komunitas hidup bersama, tatanan sosial, komunitas beradab, tata hidup beradab, atau nilai-nilai keadaban. Keberagaman makna inilah yang membentuk perkembangan makna masyarakat warga dalam sejarah selanjutnya (Sudibyo, 2010).

Pada abad ke-17 dan ke-18, peradaban barat dihadapkan pada kecenderungan semakin sulitnya

mengontrol kekuasaan negara. Perluasan kekuasaan negara salah satunya adalah karena konflik agama antara Katolik dan Protestan. Para raja dan bangsawan sebagaipemegang kekuasaan menyita kekayaan geraja dan pemuka agama sehingga smenghasilkan pemusatan sumber daya ekonomi dan politik yang sangat besar.

Dari sinilah tumbuh benih-benih kekuasaan yang absolut dan despotik. Dari sini pula muncul narasi sejarah yang menempatkan masyarakat sipil sebagai kekuatan untuk mengimbangi dan mengontrol negara guna menghindari kesewenang-wenangan dan penindasan. Narasi masyarakat warga bertransformasi dari antinomi “keberadaban versus barbarisme menuju antinomi “tatanan oleh hukum versus tatanan oleh koersi” (Sudibyo, 2010).

Pemikiran mengenai kekuatan *civil society* yang dapat menopang berlangsungnya kehidupan demokrasi memang menjadi diskursus yang terus bergulir. Semakin mekarnya konteks demokrasi elektoral liberal yang memberikan kebebasan pada individu dan juga *civil society* untuk bisa berpartisipasi dan mengontrol jalannya demokrasi semakin terbuka lebar.

Kondisi ini nyaris berkebalikan ketika Indonesia masih ada di Era Orde Baru, dimana kebebasan sipil menjadi sesuatu yang langka dan bahkan sangat mahal. Entitas *civil society*, sebagai satu kesatuan atau *part system* dari demokrasi tentu saja memberikan warna tersendiri. Hadirnya elemen dan kekuatan *civil society* mampu memberikan rona demokrasi era reformasi di Indonesia.

Kebebasan yang dimiliki oleh *civil society* ini tidak terlepas dari tumbangnyarezim Orde Baru yang memang mengekang kebebasan sipil untuk berserikat, berbicara, berkumpul apalagi mengkritik tindakan penguasa. Kemunculan wacana masyarakat sipil di



Indonesia sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari konteks interaksi antara perkembangan mutakhir di dunia internasional dan berbagai peristiwa di dalam negeri.

Awal mula munculnya wacana itu dilatari oleh pelbagai perubahan politik yang terjadi di benua Eropa, khususnya negeri-negeri Eropa Timur pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Ketika itu mereka tengah menjalani sebuah proses transformasi dari era politik otoritarian rezim komunis menuju era demokrasi. Dampaknya menyebar ke kawasan lain, terutama negeri-negeri di Amerika Latin, Asia dan Afrika yang sebagian besar masih berkuat ada persoalan transisi menuju demokrasi. Bahkan sebagian besar melukiskan bahwa keruntuhan negeri-negeri besar Eropa Timur merupakan akibat tak terelakkan dari kebangkitan masyarakat sipil (Dahrendorf, 1992).

Sisi domestik wacana masyarakat sipil mulai menderas Indonesia seiring dengan menguatnya tuntutan reformasi dan demokratisasi sistem politik Orde Baru sepanjang dasawarsa 1990-an. Semanjak itu wacana masyarakat sipil yang umumnya dikaitkan dengan pertumbuhan kelompok-kelompok masyarakat bersifat mandiri dan menarik jarak di luar struktur formal negara, mulai mewarnai dinamika politik Indonesia (Culla, 2006). Perkembangan selanjutnya adalah apakah organisasi sipil yang telah ada mampu memberikan warna dengan kemunculannya atau justru malah memberikan praktek demokrasi yang bising dikarenakan unsur non pemerintah identik dengan kontra atau ketidaksepahaman sehingga melahirkan konflik secara vertikal.

Mengupas pemikiran *civil society* tentu saja kita tidak akan melupakan konsep dasar yang dikemukakan oleh para pemikir politik seperti (Beetham, 1999)

menggagas pemikiran mengenai civil rights, political rights dan social rights, Alexis de Toqueville maupun Marshall. Setidaknya dalam paper ini penulis ingin mengelaborasi bagaimana konsep teori dan sekaligus praksis yang ada dalam konteks pemenuhan hak *civil rights* dalam bingkai *civil society*.

Kerapnya pergesekan, tumbuh dan sekaligus berkembangnya *civil society* merupakan hasil pemikiran panjang akan adanya jaminan hak asasi yang mengejewartah dalam hak politik. Hak politik ini tentu saja oleh pemikir selanjutnya (Marshall) harus dihubungkan dalam konteks apa seseorang memiliki hak politik kecuali yang bersangkutan adalah member dari suatu komunitas (negara) dan diakui eksistensinya dalam konsep citizen.

Dalam paper ini, penulis ingin mencoba untuk menghubungkan relasi antara *civil society* dengan adanya upaya kontrol terhadap parlemen di Indonesia. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan demokrasi, tentunya *civil society* memiliki kekuatan yang mampu untuk mendorong hadirnya reformasi di tubuh parlemen Indonesia (Situmorang, 2013).

Konsep hadirnya *civil society* ini juga berkorelasi dengan beberapa pemikir yang penulis sebutkan sebelumnya seperti Alexis de Tocqueville (Lipset, 2007) menyatakan tentang kecenderungan-kecenderungan dari masyarakat modern memunculkan sebuah perhatian serius tentang sistem politik pluralis- sebuah sistem politik di mana banyak kelompok berbeda diperbolehkan secara sah untuk mempengaruhi kebijakan publik. Konteks yang akan diangkat adalah *Pertama*, sejauh mana kekuatan *civil society* membawa perubahan warna parlemen pasca reformasi serta *Kedua*, bagaimana pula dinamisasi di internal parlemen



terjadi dalam konteks fragmentasi pihak oposisi dan pro terhadap pemerintah.

Dalam satu dasawarsa ini terdapat beberapa wacana kenegaraan yang semakin dinamis, khususnya berkaitan dengan penataan sistem ketatanegaraan; kelembagaan negara. Salah satu ide yang berkembang seiring dengan adanya aspirasi untuk lebih memberdayakan fungsi kelembagaan pemerintahan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* seiring dengan lahirnya gerakan reformasi dan juga pelaksanaan fungsi yang telah dimiliki, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh undang-undang. Salah satu lembaga yang diharapkan menerapkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik adalah parlemen (DPR RI).

Sejak terjadinya amandemen UUD 1945 yang dilakukan sekurangnya sebanyak 4 (empat) kali (Perubahan Pertama tahun 1999, Perubahan Kedua tahun 2000, Perubahan Ketiga tahun 2001 dan Perubahan Keempat tahun 2002) telah membawa implikasi politik yang sangat luas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ada perubahan struktur kelembagaan yang berubah dengan mencolok.

Salah satu yang menjadi fokus perhatian adalah upaya untuk memperkuat posisi presiden dan wakil presiden yang pada mulanya dipilih dan dilantik oleh parlemen (MPR RI), berubah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat. Perubahan ini secara politik dipandang sebagai salah satu upaya untuk mengembalikan kekuasaan eksekutif secara lebih luas dan kuat (*executive heavy*). Kondisi ini menyebabkan parlemen sebagai partner eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan menjadi seolah lebih terbatas, karena legitimasi presiden langsung berasal dari rakyat.

Peningkatan kewenangan presidensialisme yang menguat ini juga membawa konsekuensi politik, mengingat Indonesia menganut asas multi partai.

Secara langsung dapat dijabarkan adalah bahwa komposisi multi partai tersebut jika dikonversi kedalam perolehan suara kursi di parlemen, maka konsekuensinya tidak ada partai yang dianggap paling dominan atau mayoritas. Jadi, meskipun presiden memiliki legitimasi dari rakyat secara langsung, tidak serta merta dapat secara mulus melangsungkan program yang telah menjadi janji politiknya, karena harus melewati persetujuan parlemen yang multi *interest* ini.

Konsekuensi ini memunculkan sebuah pragmatisme baru, dimana kekuasaan eksekutif juga masih tergantung dari adanya kekuatan fraksi di parlemen. Tanpa dukungan parlemen, maka eksekutif dalam hal ini presiden, tidak dapat menjalankan kewenangannya secara maksimal. Secara struktural dapat dikatakan bahwa problem utama kelembagaan parlemen kita adalah minimnya kepedulian terhadap kepentingan publik, sesuai dengan prinsip *good governance* sehingga sangat sulit untuk mengembalikan fungsi parlemen sebagai penyambung kepentingan rakyat atau biasa disebut penyuar suara rakyat dalam perwakilan. Lemahnya kontrol konstituen terhadap parlemen ini menyebabkan pragmatisme dalam lembaga perwakilan terbelah antara yang mendukung pemerintah dengan yang oposan terhadapnya. Lalu dimanakah letak kekuatan *civil society*?

METODE PENULISAN

Kajian menjabarkan pentingnya reposisi struktur pengawasan dalam mekanisme check and balances ala demokrasi presidensialisme dengan wajah parlemen yang multi parpol. Karenanya memerlukan identifikasi dan pemahaman yang mendalam untuk melihat konteks penyeimbangan kekuasaan terutama pada dua badan utama pengelola kebijakan, yakni Legislatif dan eksekutif meliputi berbagai kompleksitas



permasalahan dan proses yang terjadi dalam dinamika tersebut. Oleh karenanya, pendekatan penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan studi literatur. Sebagaimana dikemukakan oleh Maxwell, penelitian kualitatif antara lain ditujukan untuk memahami makna, memahami konteks partikular, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terantisipasi, serta memahami proses (Maxwell, 1996). Kajian ini bertujuan mengidentifikasi persoalan yang muncul dalam konteks demokrasi yang semakin kolusif gegara saling silang dan sandera dalam wewenang pengawasan, mengidentifikasi peluang peran pengawasan yang dapat dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap parlemen yang dianggap mewakili kepentingan rakyat secara paripurna, serta upaya yang dapat dilakukan membangun konsensus untuk menjawab berbagai kepelikan dalam dilemma fungsi dan struktur politik Indonesia hari ini.

PEMBAHASAN

Dinamisasi Parlemen

Dalam kondisi politik yang cair, dengan pola multi partai sehingga tidak memunculkan partai politik dominan yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu, menyebabkan partai yang ada membentuk poros yang saling tarik menarik. Salah satu poros mendukung pemerintah, sebagai legitimasi suara parlemen dan sebagian lagi berposisi sebagai pengkritisi atau biasa disebut dengan oposisi.

Sebenarnya kerangka pro-pemerintah dan oposisi dalam parlemen tidak dikenal. Oposisi atau pro-pemerintah adalah buah atau konsekuensi adanya kebijakan internal partai yang kemudian mewujudkan menjadi kebijakan para wakilnya di parlemen (Kusman, 2017). Hal ini dapat secara sederhana dilihat dari

adanya sikap para wakil rakyat yang menjalankan pola perwakilan dengan bercorak *politico*, atau tunduk pada kehendak partai politik. Dengan kata lain, oposisi dianggap sebagai penyeimbang atau pihak yang mengkritisi kebijakan yang diambil oleh eksekutif.

Agar pemahaman mengenai oposisi ini benar secara konsep maka ada beberapa pengertian yang disampaikan, seperti oleh Madjid dalam bukunya, “Dialog Keterbukaan” menyebutkan bahwa dalam negara demokrasi yang sehat sangat dibutuhkan *check and balance* sebagai kekuatan pemantau atau pengimbang, sebab dalam pandangan yang agak filosofis manusia tidak selalu benar untuk menjalankan *check and balance* di parlemen adalah partai oposisi (Madjid, 1997).

Menurutnya juga oposisi tidak berarti *to oppose* (menentang) tapi dalam oposisi terdapat unsur *to support* (mendukung). Ini berbeda dengan oposionalisme yang menentang sekedar menentang, subjektif dan memiliki ititikad kurang baik. Oposisi dalam semangat loyal, loyal pada Negara, loyal kepada cita-cita bersama dan bahkan kepada pemerintah pun dalam hal yang jelas-jelas baik harus loyal. Dalam terminologi yang lain (Mcgill, 1996) menyatakan oposisi adalah golongan atau partai penentang politik pemerintahan yang sedang berjalan.

Dalam sistem demokrasi, oposisi merupakan sesuatu yang dianggap wajar. Kehadiran oposisi sebagai entitas yang tidak sepakat atau bersebrangan dengan pihak yang memegang legitimasi kekuasaan merupakan perwujudan dari hak berdemokrasi. Dalam konteks ini (Marland, 2013) mendeskripsikan bagaimana oposisi berkerja sampai dengan meraih kekuasaan dalam proses kontestasi pemilu yang dilakukan.



Perlu digaris bawahi bahwa konteks oposisi pada awalnya merupakan hal-hal yang dipertentangkan secara ideologis dan bukan merupakan bagian dari proses pemilu prosedural. Konteks pendekatan Marxis misal menyebutkan bahwa ideologi sebagai basis perbedaan kelas sangat kontras antara kaum pemodal dan pekerja, sehingga dapat dikatakan bahwa kaum buruh merupakan oposan dari kaum pemodal.

Dalam sistem kepartaian, perwujudan dari manifestasi ideologi ini diduplikasi oleh partai politik dan dijadikan sebagai penegas perjuangan partai sehingga konteks ideologi menjadi hidup sebagai sesuatu yang diperjuangkan. Sementara itu, dalam konteks pasca pemilu oposisi diperlukan sebagai penyeimbang pemerintah dalam membuat, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan. Konteks oposisi melembaga dalam fraksi yang ada diparlemen sekaligus menjalankan fungsinya (*controlling, budgeting, dan supervisory*).

Pada konteks koalisi, perjuangan dalam oposisi tidak sepenuhnya dilakukan, sebab watak dari kelompok kepentingan dan partai adalah mengakses sumber daya dan kekuasaan (Marland, 2013). Sehingga jika dikatakan bahwa ada oposisi yang benar-benar oposisi mungkin hanya ada dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem pemerintahan presidensial sangat kecil kemungkinan oposisi bekerja dalam ruang yang kosong. Oleh sebab itulah, akses terhadap kekuasaan terkadang membuat partai yang pada awalnya bertarung dalam pemilu kemudian menjalin komunikasi dan lobi politik untuk membentuk pemerintahan secara bersama-sama.

Sisi partai yang memiliki dukungan mayoritas suara dalam pemilu juga membutuhkan dukungan politik, khususnya dalam parlemen. Keharusan dalam mendulang suara parlemen ini

ditujukan untuk mengamankan kebijakan pemerintah dan mengakselerasi kekuasaan sehingga semakin mudah dalam pelaksanaannya. Oposisi sebagai *vis a vis* pemerintah memiliki kemampuan dalam menggalang simpati publik, misal jika pemerintah menerapkan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat secara luas, oposisi diharapkan menghadirkan kontrol atau kritik bahkan menolak atas kebijakan itu.

Kendali oposisi inilah yang sebenarnya diharapkan agar demokrasi menjadi sehat. Di sisi lain, pragmatisme dalam memburu kekuasaan juga menjadi keinginan yang menggoda partai oposan untuk berkoalisi. Namun, oposan yang sehat tidak selalu kontra terhadap kebijakan pemerintah. Oposan hanya bekerja dalam isu yang memunculkan debat publik; kontroversial dalam suatu isu tertentu.

Tabel 1
Konfigurasi Fraksi Pendukung dan Oposisi di Parlemen Era Pemerintahan SBY-Boediono

No	Pendukung	Oposisi
1	Demokrat	
2	Golkar	
3	PKS	PDIP
4	PAN	
5	PKB	
6	PPP	
7	Nasdem	Gerindra
8	Hanura	
Jumlah	8	2

Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Tabel 2
Konfigurasi Fraksi Pendukung dan Oposisi di Parlemen Era Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla

No	Pendukung	Oposisi	Netral
1	PDIP		
2	Golkar	Gerindra	
3	PAN		
4	PKB		Demokrat
5	PPP		
6	Nasdem	PKS	
7	Hanura		
Jumlah	7	2	1

Sumber : Diolah dari berbagai sumber



Dalam kondisi seperti ini maka oposisi adalah sebuah keniscayaan, mengingat seluruh komposisi partai memiliki platform dan juga cara yang berbeda dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks tersebut untuk mendorong lahirnya pola *check and balance* antara eksekutif dan legislatif memang idealnya dibutuhkan para pihak dalam parlemen yang bertindak sebagai oposisi (lihat Tabel 1). Tujuan dari adanya oposisi adalah memastikan kebijakan atau pendapat yang di keluarkan oleh pemerintah sesuai, sejalan serta patuh terhadap koridor aturan serta digunakan sebesar-besarnya demi mencapai tujuan nasional sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelembagaan oposisi di tingkat parlemen tentunya memiliki konsekuensi yang lebih konkret dibandingkan dengan aksi yang dilakukan oleh golongan *civil society*. Aksi oposisi oleh parlemen lebih menyederhanakan pola artikulasi kepentingan para oposan yang tidak setuju dengan gagasan atau kebijakan yang di tawarkan oleh pemerintah.

Sehingga, dalam konteks ini peran masyarakat sipil masih sangat minim, khususnya berkaitan dengan artikulasi kepentingan dan juga akomodasi kepentingan tersebut, terutama bagi para legislator. Berkaca pada beberapa kebijakan yang ada seperti koversi minyak tanah ke gas pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pencabutan subsidi listrik bagi golongan mampu pada era Presiden Joko Widodo serta bentuk jaminan kesehatan dan lain-lain, tentu membuat sebagian masyarakat perlu untuk menyuarakan aspirasinya dengan lebih cepat melalui para wakilnya di parlemen. Tujuannya adalah memastikan bahwa kebijakan ini tidak melanggar dan merugikan masyarakat, serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Artikulasi di parlemen melalui wakil oposisi

membuat para pengambil kebijakan di pihak eksekutif semakin berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan.

Ambang Batas Parlemen

Sesuai dengan tujuan untuk menata pola parlemen kita yang saat ini masih terpaut pada pola patron pada partai politik, maka beberapa aktivis pegiat pemilu juga melakukan uji materi khususnya terkait dengan ambang batas yang diberlakukan di parlemen. Ambang batas ini adalah salah satu syarat hadirnya keterwakilan partai politik dalam lembaga perwakilan¹. Dalam putusan sebelumnya yakni Putusan MK Nomor: 52/PUU-X/2012 dalam perkara yang diajukan oleh partai politik kecil, MK mengabulkan untuk sebagian dan menetapkan ambang batas parlemen (DPR RI) adalah sebesar 3,5 persen perolehan suara sah secara nasional.

Setelah keluarnya putusan MK ini tentu saja, beberapa pihak menganggap bahwa PT (Parlementary Treshold) 3,5 persen adalah syarat untuk membentuk fraksi secara mandiri², sehingga adanya penguatan mengenai syarat kenaikan ambang batas parlemen untuk membentuk

¹Lembaga Swadaya Masyarakat, Perludem, Yayasan Soegeng Sarjadi dkk, mengajukan gugatan uji materi pada Mahkamah Konstitusi (MK), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota MPR, DPR, DPD Dan DPRD, khususnya pasal 208, dimana mengatur mengenai ambang batas parlemen. MK menolak seluruh permohonan, karena sebelumnya telah keluar hasil uji materi dengan pokok perkara yang sama dengan putusan MK Nomor: 52/PUU-X/2012 yang diajukan oleh partai politik kecil. MK memutuskan ambang batas DPR RI adalah sebesar 3,5 persen dari jumlah perolehan suara nasional, sedangkan untuk parlemen daerah (DPRD provinsi dan kabupaten/kota) adalah sebesar 2,5 persen.

² lihat pasal 82 ayat 3, Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD; “fraksi dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR”.



fraksi akan bertentangan dengan putusan MK³. Secara yuridis, maka putusan MK menjadi salah satu landasan hukum bagi partai yang tidak ingin adanya penyederhanaan parlemen. Selain itu, pola multi partai tidak serta merta dapat dengan mudah melakukan penyederhanaan partai politik, sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru.

Tabel 3.
Jumlah Perolehan Kursi DPR RI dalam Pileg 2014

Nama Fraksi	Jumlah Kursi	Presentase
PDIP	109	19,46
Golkar	91	16,25
Gerindra	73	13,04
Demokrat	61	10,89
PAN	4	8,57
PKB	47	8,39
PKS	40	7,14
PPP	39	6,96
Nasdem	36	6,43
Hanura	16	2,86
Jumlah	560	100

Sumber : <http://dpr.go.id/tentang/fraksi>

Penyederhanaan pembentukan Fraksi tentu saja harus di dahului dengan adanya perubahan atas Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD. Sebab jikalau pun tujuan dalam membuat penyederhanaan komposisi parlemen dengan maksud untuk membentuk polarisasi keanggotaan fraksi menjadi oposan atau pendukung pemerintah tidak dengan mudah dapat dilakukan.

Ini adalah konsekuensi dari beberapa sebab, *Pertama*, kita menganut pola multi partai, sehingga partai yang lolos ambang batas dapat membentuk fraksi mandiri. Selain itu, perlu dilihat dari platform partai politik dan juga unsur

ketokohan yang kuat yang masih melingkupi dinamika perpolitikan kita. *Kedua*, pola koalisi dan peta politik yang cair selama pemilu presiden menyebabkan partai tidak selalu beroposisi. *Ketiga*, munculnya opsi partai dengan langkah “netral” seperti yang dilakukan oleh Fraksi Demokrat (lihat tabel 1)⁴. *Keempat*, tidak adanya pola koalisi yang solid dan permanen, artinya pergantian rezim dapat berimplikasi pada peta politik, sementara beroposisi dan dilain waktu dapat pula berkoalisi atau bahkan netral. Dengan pola yang ada tersebut nampaknya tanpa itikad politik yang kuat tentu akan sangat sulit untuk dapat membuat pola konfigurasi Fraksi yang sederhana.

Persoalan Partai Kartel

Kesulitan dalam dinamisasi parlemen guna mewujudkan demokrasi yang sehat juga terhambat dengan hadirnya politik kartel. Pola kartel ini sebenarnya menjadi fokus utama dalam membagi bagaimana para elitpartai mengkavling sumber-sumber anggaran yang berasal dari pos belanja negara. Meskipun pelaksanaan pola kartel ini telah berlangsung sejak jaman SBY, namun dalam pemerintahan Jokowi, kartel juga masuk dan menjadi persoalan yang serius. Banyaknya koalisi partai yang merepresentasikan kebijakan ketua dan elit partai untuk bergabung dalam gerbong pemerintah, membuktikan bahwa ada kalkulasi politik secara ekonomis.

Faksi pemerintah dalam hal ini PDI P meskipun telah meraup sebesar

³ Dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diputuskan bahwa Ambang Batas parlemen adalah sebesar 4 (empat) persen untuk DPR RI. Ambang batas ini naik 0,5 persen dibandingkan dengan pemilu tahun 2014. Jika dikonversi dalam kursi nilai 4 % adalah sejumlah 22 kursi. Sedangkan ambang Batas Presiden adalah sebesar 20% kursi parlemen atau 25 % suara sah secara nasional.

⁴ Dalam konsep propemerintah atau oposisi tidak dikenal “netral”. Partai demokrat dan Fraksinya di Parlemen sesungguhnya berada dalam lingkaran oposisi. Namun membuat episentrum sendiri dengan menolak bergabung dengan Fraksi Gerindra dan PKS yang secara terang-terangan menyatakan oposisi pada pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Siapapun pihak yang berlawanan atau tidak berada dilingkar pemerintah adalah oposan; Lihat Alex Marland dan Tom Flanagan (2013) tentang Konsep Oposisi.



19,4 persen suara parlemen tetap tidak akan mampu menggolkan kebijakan pemerintah jika tidak menguasai setidaknya 50%+1 suara parlemen. Pola pendekatan pun dilakukan oleh pemerintahan Jokowi untuk menghadirkan kekuatan dengan basis suara parlemen. Terbukti bahwa kebijakan-kebijakan yang diusulkan pemerintah hampir 100 persen lolos diparlemen. Mislanya tentang kenaikan harga BBM, Undang-Undang MD3, Perppu Ormas, pembentukan UKPIP dan penambahan Staf Khusus Presiden serta pengesahan Rencana Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015-2018.

Dukungan politik yang kuat dari parlemen menjadi sinyal hadirnya saling tukar (take and give) antara partai pro pemerintah sendiri. Corak inilah yang ditengarai bernuansa bagi-bagi kursi selain indikasi lain sebagai bagi-bagi kavling proyek atau anggaran.

Pada awalnya partai kartel terbentuk karena nihilnya representasi politik pada saat Orde Baru. Orde Baru mengatur secara penuh bagaimana sumber daya dikelola dalam lingkaran elit Soeharto dan kroninya (dengan melibatkan ABRI). Keterbatasan mengakses sumberdaya dan kuasa inilah yang menyebabkan hadirnya demokrasi delegatif pada saat reformasi. Dengan kata lain demokrasi delegatif adalah suatu bentuk demokrasi yang mampu menampung segenap aspirasi yang menjadi kepentingan atau representasi politik dari berbagai unsur.

Para pihak yang ditunjuk sebagai *delegate* atau perwakilan selayaknya menjadi corong yang dapat membawa aspirasi publik kearah positif. Namun sayangnya, hal ini tidak terjadi. Pola yang ada justru mengarah pada adanya praktek kolusi. Demokrasi Kolusif yang dipopulerkan oleh (Slater, 2004) merupakan sebuah bentuk watak politik

yang lebih mengutamakan kompromi dan membuat deal-deal politik, untuk selanjutnya bersama dalam satu gerbong politik. Tidak ada ruang untuk mengendalikan pola pemerintahan yang demokratis, karena pihak yang masuk dalam lingkaran kekuasaan sepenuhnya telah diberikan “jatah” sesuai dengan porsi kekuatan politik yang dimilikinya. Misalnya dari mulai komposisi dalam kabinet, jajaran pengurus perusahaan negara, maupun jabatan lainnya dalam lembaga sampiran negara. Pola ini sudah berlangsung pada era SBY sampai Jokowi.

Istilah demokrasi kolusif sebenarnya baru populer pada saat kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Istilah sebelumnya dipakai Dan Slater untuk menggambarkan perkembangan demokrasi Indonesia dan pemerintahan Presiden SBY sejak pasca-Pemilu dan Pilpres 2004. Demokrasi kolusif mengacu kepada perilaku politik Presiden SBY yang lebih memilih ‘ko-opsi’ dan konsensus daripada kompetisi politik secara fair.

Demokrasi kolusif terlihat jelas dalam pengaturan keseimbangan yang sangat hati-hati dalam kabinet, ketiadaan parpol oposisi (yang efektif) di parlemen, dan hubungan *promiscuous* (sering gonta ganti pasangan) di dalam aliansi-aliansi politik yang ada. Hasilnya, aliansi-aliansi politik itu sangat tidak stabil karena parpol-parpol terus membentuk aliansi, meninggalkan aliansi, dan membuat aliansi baru berdasarkan pertimbangan jangka pendek yang nyaris kosong dari komitmen ideologis dan kepentingan konstituen mereka.

Selain disebabkan karena sistem yang kolusif, kecenderungan partai yang mengadopsi ideologi *cacth all*⁵ dan juga

⁵*Cacth all party* merupakan kecenderungan partai yang mulai meninggalkan basis ideologi dalam perjuangannya. Partai semacam ini melebur dan



kartel turut menyumbang pembusukan parlemen dari dalam. Kedua jenis partai politik ini merupakan pihak yang masuk dan turut melahirkan pemerintahan kartel. Secara tipikal pada awalnya, dengan diterapkannya demokrasi liberal yang mengakui adanya istilah *one man, one vote* dan *one value* menyebabkan partai politik seluruhnya mengarahkan sumberdaya yang dimilikinya untuk meraih sebesar-besarnya dukungan publik, khususnya dalam meraih suara melalui pemilihan umum.

Dari sanalah *cacth all party* muncul untuk berperilaku inkusif, tidak membedakan berdasarkan ideologi, kelompok kepentingan dan lain sebagainya. Partai yang berideologi islam pun seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membuka diri dan ruang bagi para legislator yang berbeda agama. Selain itu, masih ada lagi PKB yang notabene identik dengan NU, PAN yang menjadi personifikasi Ormas Muhammadiyah dan seterusnya; Mereka merubah diri semakin inklusif bagi para kelompok yang ingin bergabung didalamnya. Bias kepentingan yang dibawa inilah yang kemudian menjadikan partai menjadi lebih bersifat populis, semata hanya mengejar aspek elektoral (kursi), sehingga tidak mampu mengagregasikan kepentingan pihak yang diwakilinya karena terlalu plural.

Dalam konteks lain *Cacth all party* akan menjadikan pola pemerintahan yang hanya berorientasi bagi-bagi kekuasaan. Para pihak yang memiliki kekuatan politik yang kuat dan lemah akan terukur dengan pemberian jumlah pos pemerintahan, yang biasa dikatakan “basah” dan “kering”.

Pos yang basah sesungguhnya terdiri dari departemen atau kementerian yang cukup besar mengelola dana negara, sedangkan pos yang kering cenderung memiliki lebih sedikit dana yang dikelola.

sama sekali tanpa ideologi, mengikuti arah trend pasar pemilih dan tidak memiliki *grassrot* yang kuat. (Mitzner, 2008).

Dalam partai kartel atau bahkan pemerintahan kartel, nyaris tidak terjadi kompetisi, karena yang ada adalah praktek distribusi sumber daya ekonomis sesuai dengan porsi masing-masing. Oposisi merupakan pihak yang juga mendapatkan kompensasi politik, sehingga para pihak yang mengontrol jalannya pemerintahan menjadi lumpuh.

Kontrol *Civil Society* Terhadap Parlemen

Melihat dari aspek konfigurasi parlemen dikaitkan dengan sistem pemerintahan kita yang Presidensial, maka terlihat sebenarnya meskipun presiden memiliki kewenangan yang relatif lebih besar, namun tetap saja jika tidak didukung oleh mayoritas kursi di parlemen hal itu akan menjadi sia-sia. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana kontrol masyarakat sipil dalam mengawal para wakilnya di parlemen.

Dalam konteks kontrol publik, tentu saja *civil society* memiliki korelasi. Dalam masyarakat modern yang memberlakukan prinsip demokrasi “kelayakan” untuk melakokan peran-peran politik dibangun lewat mekanisme pemilihan umum. Dalam pemaknaan ini representasi menjadi kriteria dasar menentukan kelayakan untuk menjadi elit politik, sementara lembaga-lembaga politik (legislatif dan parpol utamanya dan bukannya keluarga) menjadi ajang utama pelatihan elit politik. Politik pada masyarakat macam ini dijalankan oleh aneka kelompok yang berpengaruh lewat kerja “agen”, “juru bicara” atau “simbol kepercayaan” yang dipilih mereka. Kelompok-kelompok ini bisa hadir dalam raut sebagai sebuah area geografi, kelompok okupasi, etnik ataupun agama, bahkan lingkaran elit parpol (Lay, 2006).

Jejaring masyarakat sipil inilah yang sekiranya mampu mendorong reformasi kelembagaan parlemen. Melalui advokasi dalam penyusunan perundang-



undangan tentang pemilu, misal persyaratan pencalonan anggota dewan⁶, masa tugas, sistem pemilu⁷, distribusi kursi sampai pada ambang batas parlemen.

Kekuatan dalam *civil society* ini dapat menjadi representasi masyarakat secara mayoritas, karena institusi *civil society* masih dianggap sebagai pihak yang masih membela kepentingan rakyat secara murni. Meskipun dalam hal pelaksanaan kebijakan belum tentu aspirasi masyarakat sipil terakomodir, namun setidaknya pengumpulan opini dan desakan kepada pemangku kebijakan mampu merubah sikap dan pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR.

Korelasi antara kontrol terhadap parlemen dan pergerakan *civil society* yang kemudian dianggap sebagai sebuah manifestasi pasca Orde Baru seperti yang di sampaikan diatas akan membawa dampak yang dinamis bagi iklim demokrasi. Pembelahan yang terjadi di dalam parlemen antara pihak oposan dan pro eksekutif rasanya akan menafikkan peran kekuatan *civil society*, padahal menurut Toqueville, demokrasi yang sehat justru ketika sipil mampu mengontrol parlemen, bukan hanya dalam aspek rekrutmennya namun juga pada aspek sejauh mana legislator mampu mengantarkan atau memberikan jaminan

tersambungnyanya kepentingan rakyat. Corak perwakilan *politico*⁸ yang kemudian masuk dalam konteks pragmatisme politik atas kepentingan pembelahan lembaga legislatif tidak akan mampu memberikan ruang yang sehat untuk dinamisasi parlemen.

Beberapa organisasi sipil yang mewadahi dalam Lembaga Swadaya Masyarakat juga ikut mengkritisi pola kinerja parlemen yang terkesan pragmatis dan tidak memiliki semangat untuk memperjuangkan kepentingan publik. Misal dapat kita lihat dengan kehadiran Formappi (Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia)⁹, IPC (Indonesia Parliament Centre)¹⁰, Kemitraan¹¹ dan lain

⁸ Anggota dewan cenderung bersikap sebagai wali rakyat, sehingga merasa bebas menentukan sendiri apa yang dirasanya sebagai kepentingan rakyat dan tidak merasa perlu berkonsultasi dengan rakyat sebelum membuat keputusan. Mereka malah tidak merasa wajib berupaya memenuhi janji kampanye serta membuat pernyataan pertanggungjawaban kepada pemilih dan rakyat yang diwakilinya. Lebih jauh respons wakil rakyat untuk melayani kepentingan masyarakat lebih terfokus pada sebagian masyarakat atau cenderung menjadi simbolik terhadap seluruh rakyat. Dalam menentukan sasaran kebijakan yang dihasilkannya, anggota lebih melihat keseluruhan masyarakat dari pada golongan atau kelompok. Alokasi dana yang mereka setuju cenderung menuju kepada lapisan atas masyarakat. Kebijakan yang mereka hasilkan cenderung melayani kepentingan elit dan keperluan penguasa akan legitimasi, (Haris, 1995).

⁹ Dalam wesitenya www.parlemenindonesia.org Formappi didirikan untuk mengontrol kinerja parlemen DPR, DPD dan DPRD sekaligus sebagai saluran partisipasi aktif bagi warga dalam memberikan masukan untuk parlemen di Indonesia. Isu terbaru adalah mengenai penentangan Formappi terhadap rencana pembangunan apartemen DPR RI pada tahun 2017.

¹⁰ IPC adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dibidang penguatan parlemen, kontrol dan mendorong kapasitas parlemen agar lebih baik lagi. Organisasi ini banyak mengkader para pihak

⁶ Dalam isu yang hangat sekarang ini misalnya koalisi masyarakat sipil mendukung KPU RI melarang caleg mantan napi koruptor ikut dalam pemilu 2019. Lihat: <http://www.koran-jakarta.com/koalisi-masyarakat-sipil-dukung-larangan-koruptor-nyaleg/> diakses pada 30 Mei 2018

⁷ Dengan menggunakan sistem proporsional terbuka memungkinkan calon wakil rakyat yang dekat dengan konstituennya terpilih secara demokratis. Hal ini mengawali berakhirnya oligarki partai dalam menentukan calon terpilih dalam pemilu. <http://www.beritasatu.com/nasional/377307-10-alasan-sistem-proporsional-terbuka-lebih-baik-dipertahankan.html> diakses pada 30 Mei 2018

sebagainya. Kecenderungan para organisasi sipil ini menganggap bahwa kinerja parlemen sangat rendah dan perlu segera dilakukan pembenahan demi mempertahankan marwah lembaga.

Desakan dari organisasi masyarakat sipil ini setidaknya mendakan bahwa reformasi kelembagaan parlemen justru hadir dari luar lingkaran parlemen itu sendiri. Perubahan yang fundamental juga selayaknya terjadi dalam partai sebagai asal para legislator berasal. Meskipun partai tidak lagi memiliki kewenangan dalam memberikan keputusan keterpilihan calon, namun kuatnya kekuasaan partai dalam menentukan calon yang diusung dalam pencalonan kompetisi elektoral masih sangat kuat.

Besar kemungkinan mereka yang terpilih melalui basis pencalonan partai memiliki deal-deal tertentu yang sepenuhnya akan menguntungkan partai, baik secara elektoral maupun secara pragmatis dalam konteks akses terhadap sumber daya (finansial, jaringan, bisnis dan sebagainya). Pola jejaring inilah yang kemudian mampu menjadi cikal bakal kolusi ditubuh partai dan parlemen disebabkan adanya kepentingan ekonomis yang lebih dominan dibandingkan aspek ideologis.

SIMPULAN

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mereformasi parlemen menjadi lebih baik, diantaranya: *Pertama*, perlu adanya Sikronisasi Undang-undang MD3, Undang-Undang partai Politik dan Undang-Undang Pemilihan Umum.

yang memiliki konsentrasi terkait kinerja parlemen di Indonesia, lihat: www.ipc.or.id

¹¹ Kemitraan adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang advokasi, peningkatan kapasitas dan juga mengontrol kebijakan pemerintah eksekutif dan legislatif terkait dengan isu-isu sosial dan politik, lihat: <https://www.kemitraan.or.id/>

Dalam ketiga Undang-Undang tersebut harus mengakomodir adanya ambang batas parlemen yang ideal untuk lebih menjadikan partai semakin kompetitif. *Kedua*, perlu adanya *political will* dari para partai politik. *Ketiga*, peran masyarakat sipil dalam mengawal kinerja parlemen sangat dibutuhkan sebagai bentuk kontrol pertanggungjawaban politik atas kepercayaan yang telah diberikan pada saat pemilihan. *Keempat*, kita perlu menyadari bahwa konsekuensi multi partai dengan segala kekurangan dan kelebihan adalah bentuk mekarnya demokrasi, tinggal bagaimana mengelola agar demokrasi tersebut bukan hanya mekar namun juga tumbuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Beetham, D. (1999). *Democracy and Human Rights*. Cambridge UK: Polity Press.
- Culla, A. S. (2006). *Rekonstruksi Civil Society: Wacana dan Aksi Ornop di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Dahrendorf. (1992). *Kematian Sosialisme di Eropa: Refleksi Revolusi tahun 1989*. Jakarta: Tiara Wacana.
- Haris, S. d. (1995). *Menelaah Kembali Format Politik Orde Baru*. Jakarta: Gramedia.
- Kusman, A. P. (2017). Kuasa Oligarki dan Posisi Masyarakat Sipil: Relasi antara Intelektual dan Kekuasaan. *Jurnal Prisma*, 148-160.
- Lay, C. (2006). *Involusi Politik: Esai-esai Transisi Indonesia*. Yogyakarta: PLOD Fisipol UGM.
- Lipset, S. M. (2007). *Political Man*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



-
- Madjid, N. (1997). *Dialog Keterbukaan, Artikulasi Nilai Islam dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer*. Jakarta: Paramadina.
- Marland, A. d. (2013). From Opposition to Government: Party Merger as Step On The Road to Power. *Parliamentary Affairs*, 68, 272-290.
- Mc.gill, J. d. (1996). *Kamus Politik*. Jakarta: Aribu Matra Mandiri.
- Mitzner, M. (2008). Comparing Indonesia's Party Systems of the 1950s and the Post-Soeharto era: From Centrifugal to Centripetal inter-party Competition. *Journal of Southeast Asian Studies*, 39 (3), 431-453.
- Situmorang, A. W. (2013). *Gerakan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Slater, D. (2004). *Indonesia's Accountability Trap: Party Cartel and Presidential Power After Democratic Transition*. Jakarta: Research Library.
- Sudibyo, A. (2010). Masyarakat Warga dan Problem Keadaban. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14 (1), 23-46.





Peran Pemilih Pemula Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif

(Studi Kasus : Kelompok Agen Pengawasan Bawaslu Bangka Selatan)

Agam Primadi¹; David Efendi²; Sahirin³

¹Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

²Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

³Bawaslu Bangka Selatan

Email: Agamprimadi08@gmail.com

Abstrak

Undang Undang No. 7 tahun 2017 pasal 101 telah mengamanatkan Badan Pengawas Pemilu sebagai badan yang bertugas mengawasi proses demokrasi elektoral mulai dari Pemilihan Legislatif (PILEG), Pemilihan Kepada Daerah (PILKADA), dan Pemilihan Presiden (PILPRES). Sebagai badan yang diamanatkan secara konstitusional dalam hal pengawasan pemilu, sebuah inovasi dibutuhkan dalam meningkatkan nilai guna pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas. Paper ini akan menjelaskan praktik inovasi Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dalam pengawasan pemilu dan mendorong partisipasi publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatif tim penulis. Paper ini menyimpulkan bahwa inovasi diwujudkan melalui program kelas pengawasan pemilu dengan merumuskan agen pengawasan pemilu partisipatif di seluruh kecamatan sangat efektif meningkatkan partisipasi dan kesadaran politik pemilih khususnya pemilu pemula.

Kata Kunci: Pengawasan, Elektoral; Pendidikan Politik; Inovasi; Voluntir.

Abstract

Law Number 7 year 2017 verse 101 mandated Badan pengawasan pemilu (Bawaslu: Bureau of election monitoring) as an institution monitoring electoral democracy process ranging from legislative, regional to president election. Considering its duty on electoral agenda, the need for BAWASLU's innovation is one of the most significant factors to enhance the quality of general election. This paper is going to explain the innovation practice of BAWASLU in South Bangka in monitoring the general election and increasing the people participation. Descriptive analysis is the method of this research by using primary data obtaining from participatory activities of the researchers. Lastly, the paper concludes that the innovation is manifested through the existence of election-monitoring class by formulating the agent of participatory election monitoring in every district, and this method was effectively increased the political participation and consciousness of voters spesifically young voters.

Keywords: *Monitoring; Electoral; Political education; Innovation; Volunteer.*

Info Artikel:

Dikirim: Jul 23, 2019

Diterima: Jul 24, 2019

Dipublikasi: Jul 31, 2019

PENDAHULUAN

Sebagai suatu negara, Indonesia merupakan laboratorium raksasa yang sedang berevolusi. Sejak berdirinya Republik ini, Indonesia memilih untuk menerapkan sistem demokrasi. (Firmanzah, 2010). Dengan menerapkan sistem demokrasi, para pemimpin pasca kemerdekaan tidak pelak lagi harus memikirkan dilaksanakannya pemilu (pemilihan umum) sebagai sistem untuk mengatur peralihan kekuasaan. Setelah mengalami banyak kisruh politik, baru pada tahun 1955 pemilu pertama di Indonesia bisa diselenggarakan. Dinamika perpolitikan tanah air menjadi semakin memanas pasca Presiden Soeharto dijatuhkan dari kekuasaannya pada tanggal 21 Mei 1998.

Ciri paling mendasar dari sebuah negara demokrasi adalah keberadaan pemilihan umum (Pemilu) sebagai suksesi kekuasaan dan rekrutmen politik secara reguler. Penguatan masyarakat sipil juga menjadi isu penting di dalam pembangunan politik terutama di Negara-negara demokrasi baru seperti Indonesia. Walau demikian, pemilu sebagai upaya pelembagaan demokrasi bukan satu-satunya aspek dalam demokrasi, namun Pemilu merupakan satu bagian yang sangat penting, karena Pemilu berperan sebagai mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik dan/ atau mengenai sirkulasi elit secara periodik dan tertib (Surbakti, 2008). Selain pemilu, pelembagaan demokrasi juga dapat diperkuat dengan menerapkan apa yang disebut sebagai electoral governance dimana mekanisme ini membuka peluang lebar akan keterlibatan actor/ lembaga non Negara termasuk organisasi masyarakat sipil seperti lembaga pendidikan, akademisi, media, NGO, organisasi masyarakat, dan sebagainya.

Pasca reformasi di Indonesia, Pemilu dilaksanakan sebagai wujud dari demokrasi yang merupakan sarana dalam

mengagregasi aspirasi yang ada di masyarakat dan memilih/suksesi pejabat politik secara konstitusional. Dengan memandang pemilu merupakan kesempatan bagi rakyat untuk memilih pejabat politik, maka diperlukan pengawasan untuk memastikan jalannya pemilu secara jujur dan adil. Pilkada langsung yang merupakan hidupnya demokrasi lokal juga merupakan tahapan dalam proses desentralisasi. Pemilihan langsung juga telah membuka lebar untuk memelihara demokrasi lokal (Priyambudi, 2009).

Pengawasan pemilu baru muncul dalam pelaksanaan pemilu tahun 1982, namanya adalah Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilihan Umum (Panwaslak Pemilu). Pada saat sekarang, yaitu era reformasi, tuntutan untuk pemilu yang jujur dan adil semakin tinggi, dibuktikan dengan semakin kuatnya legal formal pembentukan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di tingkat Pusat, di tingkat Provinsi sampai Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten/ Kota yang awalnya *ad hoc* saja maka diusulkan agar menjadi permanen (Suswantoro, 2016).

Secara konstitusional, Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 secara kelembagaan, Bawaslu telah diperkuat menjadi lembaga yang mandiri bukan lagi menjadi lembaga sub ordinat dari KPU. Kedudukan Bawaslu menjadi sejajar dengan KPU, sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga merubah Panwaslu propinsi menjadi Bawaslu Propinsi, secara otomatis kelembagaan Panwaslu Provinsi yang dulunya adalah lembaga pengawasan yang bersifat *ad hoc*, sekarang menjadi lembaga yang bersifat permanen. Berikutnya secara



kelembagaan Bawaslu juga diberikan wewenang untuk membentuk Panwaslu Kabupaten/kota, Panwaslu kecamatan, dan Panwaslu Desa/Kelurahan kemudian disempurnakan melalui undang-undang No 7 tahun 2017. Secara otomatis menjadikan Bawaslu Kabupaten permanen.

Secara kelembagaan, Bawaslu juga telah dibekali struktur kelembagaan relatif lebih kuat, bahkan hingga tingkat paling bawah dengan regulasi yang memadai. Meski demikian, masih banyak pelanggaran pemilu yang terjadi. Pelanggaran pemilu tidak hanya mengganggu kerja penyelenggara, tetapi juga hak politik warga negara. Di Bangka Selatan, pelanggaran berupa kampanye hitam, selebaran gelap yang menjelek-jelekan lawan politik dan partai seakan-akan tidak bisa dihindarkan. Ini dibuktikan dari maraknya pelanggaran sistematis-terstruktur dan masif disetiap pelaksanaan pemilu di daerah (Laporan Bawaslu Basel 2017).

Pengalaman empiris beberapa periode pemilu di Indonesia yang melahirkan bentuk-bentuk pelanggaran sistematis-terstruktur dan massif, menjadi dasar empirik yang menjadikan penting pelibatan dan partisipasi masyarakat. Pelibatan dan partisipasi yang cukup tinggi diharapkan mampu meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran pemilu. Partisipasi ini diharapkan mampu meminimalisir dan mempersempit ruang gerak pelanggaran pemilu. Pelanggaran pemilu khususnya yang bersifat sistematis-terstruktur, dan masif tidak lagi bisa dilakukan secara leluasa, karena pemilih turut serta mengawasi, memantau, dan memastikan data pemilih sementara/tetap dan juga memonitoring situasi/proses pemilu.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pemilu serta untuk kepentingan mempersempit ruang gerak pelanggaran dan meminimalisir

kecurangan-kecurangan pelaksanaan pemilu, Bawaslu membentuk agen pengawasan yang melibatkan pemilih pemula sebagai agen atau relawan pelaksana kegiatan pengawasan terutama di dalam tahapan awal yang krusial (DPS/DPT) baik untuk persiapan pileg dan pilpres 2019. Signifikansinya, bahwa proses pengawasan partisipatif ini sangat besar yaitu secara kuantitas agen berada di setiap Kecamatan ada 50 orang agen, dengan jumlah 7 Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Maka agen pengawasan berjumlah 350 orang. Terobosan ini dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan pemilu yang bersih, jujur, sesuai dengan prinsip pemilu yang berintegritas.

Secara umum, paper ini menjelaskan secara analitis upaya Bawaslu Bangka Selatan dalam melibatkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu sebagai model partisipasi politik sekaligus edukasi politik bagi pemilih pemula sehingga kualitas dan integritas penyelenggara pemilu di tingkat daerah dapat diwujudkan.

LANDASAN TEORITIK

Demokrasi Elektoral

Dalam memahami demokrasi dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu empirik-minimalis dan normatif-maksimalis (Suyatno, 2008:38). Demokrasi empirik-minimalis berpijak pada gagasan Schumpeter, Schumpeter memaknai demokrasi sebagai sebuah sistem untuk membuat keputusan-keputusan politik dimana individu-individu mendapatkan kekuasaan untuk memutuskan melalui pertarungan kompetitif merebutkan suara rakyat (Diamond, 2003).

Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda.



Demokrasi tidak memiliki tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun. Berbagai studi mengenai demokrasi dalam ilmu politik dan sosiologi cenderung untuk menilainya dari sudut pandang berbeda-beda. Demokrasi tidak memiliki tolak ukuran pasti dalam pengukurannya karena membutuhkan konsensus baik dalam lingkup publik maupun akademik sekalipun.

Demokrasi sering dipertukarkan dengan kebebasan, sehingga dapat dipergunakan keduanya sekaligus. Demokrasi bisa dilihat sebagai satu perangkat praktek dan prinsip yang sudah dilembagakan dan selanjutnya melindungi kebebasan itu sendiri. Demokrasi semestinya melibatkan konsensus di dalamnya, namun secara minimal persyaratan demokrasi terdiri dari: pemerintahan yang dipilih dari suara mayoritas dan memerintah berdasarkan persetujuan masyarakat, keberadaan pemilihan umum yang bebas dan adil, proteksi terhadap kaum minoritas dan hak asasi dasar manusia, persamaan perlakuan di mata hukum, proses pengadilan dan pluralisme politik.. Artinya demokrasi tidak hanya sekedar melibatkan kebebasan masyarakat dalam sistem politik, akan tetapi lebih dari itu sampai dengan tata cara melibatkan rakyat dalam demokrasi.

Partisipasi politik diawali oleh adanya artikulasi kepentingan dimana seorang individu mampu mengontrol sumber daya politik seperti halnya seorang pemimpin partai politik atau seorang dictator militer. Peran mereka sebagai agregator politik (penggalang/penyatu dukungan) akan sangat menentukan bagi bentuk partisipasi politik selanjutnya (Almond, 1993).

Di Indonesia, partisipasi politik masyarakat masih terfokus pada penggunaan saluran penyaluran

aspirasi politik melalui pemilihan umum. Partai politik masih dipandang memberikan satu-satunya wadah penampungan aspirasi politik ketimbang sarana-sarana penyaluran lainnya. Sungguh pun demikian, masyarakat Indonesia telah belajar banyak dari proses demokrasi yang diperkenalkan sejak tahun 1999, yaitu pada periode transisi pasca runtuhnya Orde Baru. Upaya-upaya revitalisasi demokrasi dalam hal memperluas keterlibatan civil society menjadi sebuah keniscayaan sehingga dapat memastikan efek-efek negative demokratisasi yang meluas. Hal ini misalnya, bahwa proses penegakkan demokrasi di Indonesia ternyata membawa efek samping yang justru membahayakan kesatuan bangsa. Situasi ini terjadi karena masa transisi dari rezim tidak demokratis menjadi demokrasi yang sangat meluas yang bisa jadi mengarah demokrasi lain (Gaffar, 1999). Kebaruan mengeksperimentasikan Sistem demokrasi yang meluas dan konteks Indonesia sebagai 'negara demokrasi baru harus juga diapresiasi sebagai aspirasi bersama masyarakat Indonesia sekaligus sebagai agenda publik di dalam menata kembali kehidupan politik bangsa multikultural.

Sebagai catatan akhir bahwa inovasi tata kelola 'electoral governance' yang mendorong kerja inovatif untuk mengefektifkan kerja. Sebagai contohnya, bagaimana lembaga penyelenggara pemilu membentuk kelompok volunteer/agen, mempraktikkan etos integritas, profesional dan dengan demikian proses pemilu benar-benar mendekati publik dengan aspek demokratis (meluasnya partisipasi publik).

Tata Kelola Pemilu

Studi tentang penyelenggaraan pemilu, pemilu dilaksanakan dengan prinsip jujur, adil, dan bersih. Dalam kaitan tersebut maka perlu diciptakan tata kelola pemilu yang baik. Tata kelola



Pemilu yang baik dapat mengurangi kecurangan dalam Pemilu, malpraktik, dan manipulasi suara. Karena itu, Pemilu yang dilaksanakan dengan penuh kecurangan mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat sebagai pemilih terhadap demokrasi elektoral (Fortin-Ritterberger, 2017)

Oleh karena itu, menghasilkan Pemilu yang berintegritas dan Pemilu yang menerapkan prinsip tata kelola pemilu yang baik adalah keniscayaan. Proses ini sangat bergantung pada penyelenggara Pemilu yang independen dan mandiri, yaitu Badan Pengawasan Pemilu (BAWASLU). Profesionalisme Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu yang berintegritas itu dapat diidentifikasi dari pelaksanaan tahapan awal pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2019. Jika pada tahapan pendaftaran partai politik saja sudah menimbulkan ketidakpuasan dalam proses verifikasi, berarti ada persoalan yang belum selesai dengan pelaksanaan prinsip tata kelola Pemilu yang baik.

Praktik Pemilu di Indonesia sudah dimulai dari tahapan awal, yaitu pendaftaran partai politik peserta Pemilu. Untuk pendaftaran tersebut disyaratkan adanya verifikasi terhadap partai tersebut apakah memenuhi syarat sebagai partai politik. Dari pengamatan selama ini, hampir di setiap tahapan yang dilaksanakan menghasilkan sengketa administrasi. Peserta Pemilu biasanya tidak puas dengan kinerja penyelenggara yang dianggap kurang profesional sehingga merugikan partai mereka. Walaupun, persoalan gugatan terhadap Pasal 173 UU No.7/2017 ini masih diagendakan untuk disidangkan di Mahkamah Konstitusi, paling tidak sudah ada sengketa administrasi mengenai masalah ini. Persoalan lain dalam pelaksanaan tahapan Pemilu yang dikhawatirkan akan memunculkan masalah adalah pengajuan daftar calon

anggota legislatif daerah dan penetapannya.

Aspek lain dari verifikasi yang juga menjadi salah satu indikator mewujudkan Pemilu berintegritas ini adalah terbangunnya komitmen penyelenggaraan Pemilu di antara partai politik dengan Bawaslu dan stakeholder. Aspek lain yang juga perlu menjadi perhatian dalam mewujudkan Pemilu berintegritas ini adalah aspek aturan pemilu (*electoral law*).

Praktik pemilu dibedakan menjadi 4 tipologi. *Pertama, Elektoral Observation*. Pada bagian ini, stakeholder berupaya mengumpulkan informasi dalam pelaksanaan pemilu yang mencakup seluruh tahapan pemilu di nasional maupun lokal. *Kedua, Elektoral Monitoring*, pengawasan ini memiliki otoritas untuk melaksanakan pengamatan pemilu dan mengintervensi proses jika ada sesuatu yang menyimpang dan keluar dari norma norma pemilu. *Ketiga, Elektoral Supervisory*, ini merupakan lembaga yang dibentuk negara, dan memiliki tugas khusus mengawasi pemilu, lembaga ini juga memiliki kewenangan untuk menyatakan kesahan dan keabsahan dari tahapan pemilu, sejak proses persiapan sampai proses penetapan hasil. *Keempat, Elektoral Asistensi*, perbantuan dalam pengawasan monitoring yang melibatkan lembaga, kelompok, dan individu dalam pengawasan tahapan awal yang dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses ini disebut *agency* (Surbakti, 2008).

Konsep tentang individu yang dikatakan sebagai (*agency*) yang memiliki peran untuk memproduksi dan mereproduksi struktur dalam tatanan sosial yang mapan. Jadi agen mampu untuk merubah dan menghasilkan struktur-struktur baru jika tidak menemukan kepuasan dari struktur yang sudah ada sebelumnya. Teori strukturasi yang memusatkan perhatian pada praktik



sosial yang berulang itu pada dasarnya adalah sebuah teori yang menghubungkan antara agen dan struktur yang berkarakter beda atau 'dualitas'. Namun ia berpendirian bahwa tindakan agen itu dapat dilihat sebagai perulangan. Artinya aktivitas bukanlah dihasilkan sekali dan langsung jadi oleh aktor sosial, tetapi secara terus menerus mereka ciptakan ulang melalui suatu cara, dan dengan cara itu juga mereka menyatakan diri bahwa mereka sendiri adalah sebagai 'aktor'.

Struktur dinyatakan seperti hubungan pengharapan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi sosial dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksi sosial. Struktur memfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing tindakan mereka. Akan tetapi, tindakan mereka juga bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama. Teori strukturasi memandang, bahwa masyarakat manusia atau sistem-sistem sosial, terus terang tidak akan ada tanpa agensi manusia, namun bukan berarti aktor-aktorlah yang menciptakan sistem sosial, aktor-aktor mereproduksi atau mengubahnya dengan jalan menata kembali apa yang telah ada dalam kontinuitas praksis (Giddens, 2003).

Di dalam dan melalui aktivitas mereka, agen menciptakan kondisi yang memungkinkan aktivitas ini berlangsung. Dengan demikian, aktivitas tidak dihasilkan melalui kesadaran ataupun melalui konstruksional tentang sebuah realitas, dan tidak diciptakan pula oleh struktur sosial. Malahan dalam menyatakan diri mereka sendiri sebagai aktor, orang terlibat dalam praktik sosial itulah baik kesadaran maupun struktur itu diciptakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan memperhatikan kronologi aktifitas di setiap tahapan pemilu yang relevan

dengan subyek, selain itu penelitian ini dilakukan dengan mendayagunakan data primer yang juga didapatkan dari aktivitas partisipatoris dan dapat juga dikategorikan sebagai action research (McIntyre, 2008) di mana tim penulis terlibat mengupayakan pelibatan masyarakat di dalam pengawasan pemilu partisipatif ini. Prosedur riset partisipatoris ini dalam penelitian kualitatif dikenal juga prosedur observasi partisipatif atau participant observation di dalam pengumpulan dan perolehan data. Data-data yang berasal interaksi Bersama partisipan kegiatan (warga) yang merupakan data mentah (raw data) dianalisis dan diinterpretasikan. Untuk menjawab apakah hasil data mentah yang berasal dari interaksi tersebut sangat representative dan dapat dipercaya adalah dengan memberikan tambahan interview yang akurat untuk memberikan double check di dalam menjustifikasi kesimpulan yang akan dibuat.

Mengikuti prosedur analisis kualitatif yang berbeda dengan kuantitatif di dalam mekanisme interpretasi dapat dilakukan beberapa tahapan antara lain bahwa data yang mentah dan hasil transcript dapat secara manual diinterpretasikan. Begitu juga dengan data hasil wawancara. Untuk menghasilkan objektifitas di dalam Analisa data kualitatif juga dapat dilakukan dengan membangun consensus demi interpretasi yang lebih banyak disepakati orang. Hal ini juga berguna untuk menghindari bias di dalam membangun argument pokok (Marsh, 2002).

PEMBAHASAN

Peran Aktif Agen Pengawasan

Upaya peningkatan kualitas demokrasi, kerja pengawasan pemilu partisipatif penting dilakukan seluruh lembaga yang dibentuk melalui konstitusi dan undang-undang bahkan organ-organ masyarakat serta individu perlu mengambil bagian di dalam upaya ini. Hal ini



serius diupayakan di dalam mewujudkan ‘pesta’ demokrasi yang bersih, jujur, adil, dan demokratis (meluasnya partisipasi masyarakat). Untuk menghasilkan pemilihan umum yang demokratis maka tidak lepas dari inovasi dan strategi dalam pengawasan pada setiap proses penyelenggaraan pemilu. Strategi dan inovasi pengawasan yang diwujudkan oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan melalui terbentuknya Agen Pengawasan (agency) yang aktornya adalah pemilih pemula. Keterlibatan masyarakat sipil dalam monitoring pemilu merupakan manifestasi dari keterlibatan aktif warganegara, hal ini diungkapkan juga oleh ahli masyarakat sipil Larry Diamond:

“Kelompok-kelompok yang berusaha (secara non partisipan) memperbaiki sistem politik dan menjadikan demokratis (misalnya, bekerja untuk hak asasi manusia, pendidikan dan mobilisasi pemilih, monitoring pemilu, dan pengungkapan praktek-praktek korupsi dan penyalahgunaan lainnya)”.

Meluasnya keterlibatan masyarakat sipil juga ditopang oleh beragam pengal,an empirik di dalam penyelenggaraan pemilu sejak 1999, juga munculnya pengawas pemilu independen sebagai respon demokratisasi di Indonesia. Ada banyak kelompok masyarakat sipil membentuk lembaga pengawas pemilu dan pemerintah juga menganggap ini sebagai kerja pembangunan politik yang perlu mensinergikan berbagai lembaga, lintas institusi baik dari lembaga pendidikan, ormas dan sebagainya. Pengalaman Bangka selatan menjadi menarik diperbincangkan.

Terbentuknya Agen Pengawasan dimulai dari kegiatan kelas pengawasan pemilu diseluruh sekolah menengah atas (SMA) di Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan. Melalui kelas pemilu, agen pengawasan dibekali edukasi pendidikan politik, lebih spesifik membicarakan bentuk-bentuk pelanggaran pemilu, mensosialisasikan aturan aturan

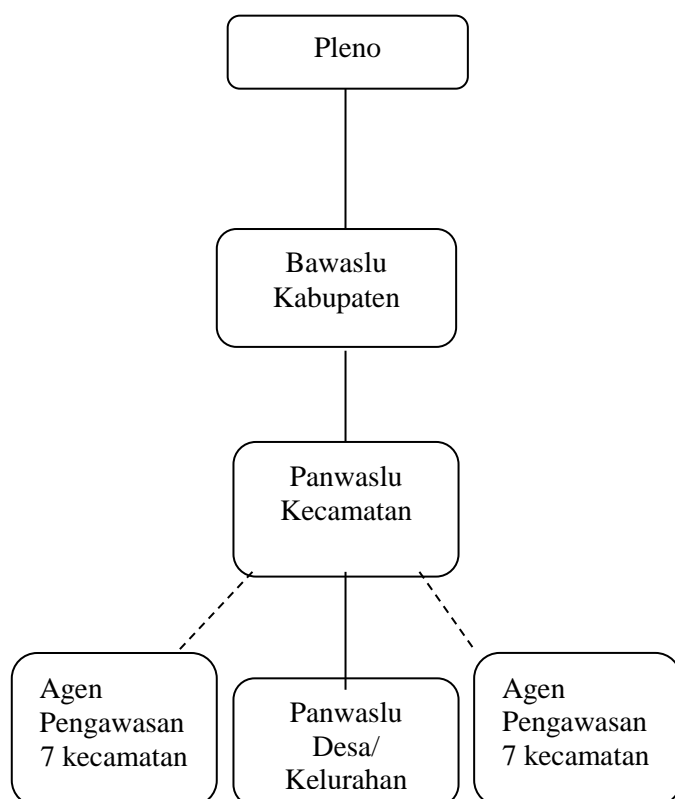
pengawasan, dan teknis pengawasan partisipatif. Agen Pengawasan merupakan bentuk gerakan pengawasan partisipatif pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan dan berkoordinasi langsung ke Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan. Dengan adanya agen pengawasan dapat meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengawasi proses penyelenggaraan pemilu, khususnya pemilih pemula yang terdaftar sebagai daftar pemilih tetap (DPT) di Kabupaten Bangka Selatan.

Agen Pengawasan partisipatif yang bentuk Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan berjumlah lima puluh orang permasing masing Kecamatan. Inisiator Bawaslu membentuk agen pengawasan mengingat keterbatasan Bawaslu yang tidak semua tahapan pemilu bisa diawasi dan dijangkau oleh Bawaslu. Bangka Selatan terkenal dengan Kabupaten yang didalamnya terdapat dua Kecamatan Kepulauan. Tentu tidak cukup jika hanya mengandalkan pengawas pemilu untuk mengawasi semua bentuk kecurangan dan pelanggaran. Selain luasnya wilayah yang harus diawasi, keterbatasan sumber daya pengawas, dan besarnya intensitas pelanggaran pemilu yang terjadi sejak dari tahapan awal sampai akhir, hal ini menegaskan diperlukannya kekuatan dan dukungan selain instrumen negara untuk mengawal proses pemilu berjalan dengan adil dan jujur. Di sinilah posisi masyarakat sipil atau warga negara menjadi urgen di mata penyelenggara pemilu baik KPUD maupun Bawaslu. Dukungan lain yang berasal dari berbagai pemantau pemilu dan pemilih secara keseluruhan yang ada di Bangka Selatan juga menjadi kontribusi yang penting.

Untuk mempermudah memahami skema kerja agen pengawasan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.



Gambar 1
Struktur Agen Pengawasan



Sumber : Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, 2018.

Struktur ini bersifat fleksibel dalam beberapa hal, adanya skema kerja atau koordinasi ini bersifat fungsional. Pleno menempati posisi di atas karena Pleno yang mengesahkan pembentukan agen di dalam pelibatan masyarakat. Dalam kesempatan ini pihak bawaslu mengundang elemen masyarakat sipil untuk mewujudkan pemilu partisipatif yang berkelanjutan. Pelaksanaan ini dimulai sejak April 2018 dilakukan dengan melibatkan paswacam dan kepala-kepala sekolah. Sekolah menjadi penting untuk upaya pendidikan politik generasi muda/pemilih muda. Legalitas pelibatan masyarakat ditopang oleh keberadaan regulasi dalam UU No.7 Tahun 2017 Bab 17 448:1 yaitu mengenai perlunya Partisipasi masyarakat. Salah satu mekanisme normatifnya adalah sosialisasi politik. Pasca sosialisasi ternyata banyak sekali pelajar-pelajar yang statusnya

pemilih pemula yang berdatangan ke panwascam untuk menjadi agen pengawasan.

Inovasi pengawasan partisipatif dikembangkan oleh Bawaslu Bangka Selatan tersebut cukup efektif untuk dapat melakukan pengawasan maksimal termasuk melaporkan kepada panwaslu Kecamatan berbagai macam pelanggaran tahapan pemilu. Pengawasan pemilu sebagai kegiatan memeriksa, dapat diartikan pula sebagai kegiatan “melihat, mencermati, dan memperoleh” laporan atau bukti-bukti yang menjadi indikasi awal dugaan pelanggaran pemilu. Pola kerja partisipatif di Bangka Selatan di pemilu sebelumnya juga menjadi fondasi bagaimana keberhasilan penyelenggara pemilu di tingkat lokal mampu merebut perhatian dan kesadaran public akan pentingnya menyelematkan pemilu sebagai perwujudan dari peran warga negara.

Beberapa tahapan di dalam keterlibatan masyarakat pemilih pemula di Bangka Selatan dapat secara sederhana ditunjukkan di dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Partisipasi Agen Pengawasan

No	Tahapan	Sub Tahapan	Partisipasi Agen Pengawas Pemilu
1	Pemutahiran data pemilih	a) Pencocokan dan Penelitian	Pra tahapan: Penguatan Kapasitas Agen Pengawas - Memastikan apakah rumah agen dan tetangga agen sudah di cokolit belum, dengan melaporkan kepada panwascam - Melakukan monitoring dan ppl terkait kinerja pantarlilh spt: apakah tiap-tiap rumah warga



	yang sudah di coklit ditemplei stiker
	-Melakukan monitoring bersama panwascam terkait pengumuman DPT
b) Pengumuman DPS	-Melakukan pencermatan DPS bersama panwascam, terkait pemilih ganda, tms dll. Melakukan pendataan pemilih pemula di tiap-tiap sekolah yang bulan april 2019 nanti sudah memenuhi syarat sebagai pemilih dengan mendata dan mengumpulkan KK pelajar dan diserahkan ke panwascam untuk di sampaikan ke PPK.
c) Pengumuman DPT	-Pra tahapan: Penguatan Kapasitas untuk agen terkait aturan main dalam kampanye
Kampanye	-Rumah agen dijadikan tempat acara forum warga
	-Sebagai informasi awal terkait pelanggaran pemilu yang akan disampaikan ke panwascam
III Pungut hitung	Melekat bersama panwascam

Dari catatan tabel ini sesungguhnya formulasi peran agen pengawasan sudah cukup maksimal terlebih juga dalam pengalaman pelaksanaan sebelumnya. Untuk agenda 2019, agen-agen pemilih pemula ini cukup siap untuk membentuk forum warga di dalam sosialisasi pemilu yang berkualitas baik untuk pencegahan maupun upaya membentuk upaya pemberdayaan masyarakat. Agen pengawasan ini juga telah mendiskusikan upaya membentuk pengawasan berbasis keluarga dan juga dimulai dari upaya membangun pendidikan politik di lingkungan sekolah (pendidikan politik sebaya). Di sini menariknya, ada upaya kerja volunteer dari agen pengawasan ini di dalam peran pengawasan tahap awal pemilu yang juga mungkin akan dilanjutkan dalam tahapan berikutnya sebagaimana formulasi peran di tabel di atas.

Antusias agen pengawasan yang terlibat dalam pengawasan partisipatif terlihat dari banyaknya laporan dugaan pelanggaran yang masuk ke Panwaslu Kecamatan. Sebagai tindak lanjut dari, agen pengawasan memperoleh hasil pengawasan, berupa: informasi awal potensi pelanggaran dan/atau temuan dugaan pelanggaran; serta laporan masyarakat yang disampaikan secara tidak langsung (dimana laporan ini dikategorikan sebagai informasi awal untuk pengawas pemilu). Pengawasan partisipatif Agen Pengawasan dikembangkan untuk dikemudian diterapkan pada Pileg dan Pilpres 2019.

Menurut hasil wawancara dengan Azhari selaku komisioner Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan mengatakan cara kerja agen adalah mereka membantu mengawasi setiap tahapan pemilu yang sudah maupun sedang berjalan saat ini seperti, *pertama*, pencoklitan, agen-agen ini melakukan pengawasan di Kelurahan dan Desa se-Kecamatan Toboali, dari hasil temuan mereka di minggu pertama pencoklitan masih banyak petugas

Sumber : Bawaslu Bangka Selatan, 2018.



Doi: <https://doi.org/10.33019/jpi.v1i1.7>

Copyright (c) 2019 Agam Primadi, David Efendi, Sahirin Sahirin

E-ISSN: 2685-7766

pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang belum melakukan pemuktahiran data seperti di tempat pemungutan suara (TPS) 2 dan 4 desa Rindik belum melakukan pemuktahiran data sama sekali sama seperti di TPS 4 dan TPS 9 desa Serdang. *Kedua*, pengumuman daftar pemilih sementara (DPS), dari hasil pengawasan yang dilakukan agen pengawasan ada beberapa TPS yang mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah lewat dari tanggal yang di tetapkan seperti di beberapa TPS di Kelurahan Teladan. (wawancara, 2 september 2018).

Tabel II
Temuan Pengawasan Agen Dalam Tahapan
PILEG 2019

Tahapan	Temuan Diterima	Laporan Diterima	Lanjutkan Bawaslu	Tindak Lanjut Bawaslu
Pemutakhiran Data pemilih	761	661	661	661
Verifikasi data parpol	-	-	-	-
Verifikasi bacaleg	-	-	-	-

Sumber: Bawaslu Kabupaten Bangka Selatan, 2018.

Data diatas menunjukkan bahwa pelanggaran pemilu dalam tahapan pilkada selalu ada. Kinerja agen tergambar dalam tabel diatas, meskipun demikian, tidak semua tahapan dapat diawasi, karena mereka hanya sebagai *elektoral asistenship*. Sebagai asistenship, tidak semua tahapan pemilu yang diawasi oleh agen pengawasan. Secara lokus, agen hanya dilibatkan dalam tahapan pemutakhiran data pemilih, tahapan kampanye, dan tahapan penghitungan. Karena tahapan lain diikat dengan aturan aturan Bawaslu yang tidak memungkinkan melibatkan masyarakat sipil.

Ketiga, ikut serta mensosialisasikan serta mendata pemilih pemula khususnya pelajar SMA se-Kecamatan Toboali, berkenan dengan yang belum memiliki e-KTP dan yang belum terdaftar sebagai pemilih. *Keempat*, ikut serta mensosialisasikan kepada masyarakat

umum tentang pelanggaran-pelanggaran pemilu serta bagaimana menjadi pemilih cerdas dalam rangkaian acara karnaval peringatan HUT RI di Kabupaten Bangka Selatan.

SIMPULAN

Pemilu yang berkualitas dan memiliki integritas kuat yang ditunjukkan dengan pelaksanaan pemilu yang bersih, adil, jujur dapat terwujud dalam proses pelaksanaan pemilu yang didukung oleh kerja-kerja pemantauan partisipatif, keterlibatan elemen masyarakat sipil di dalam mengawasi agar dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan menekan peluang angka kecurangan sejak di tahap awal. Pemantauan pemilu yang melibatkan ratusan pemilih pemula yang berbasis kerelawanan dan edukasi merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat (*active citizenship*). Terobosan atau inovasi Bawaslu Bangka Selatan membentuk agen pengawasan di setiap Kecamatan di Kabupaten Bangka Selatan terbukti sangat efektif dalam beberapa hal. Pertama, edukasi bagi pemilih pemula dimana pelaku sendiri merupakan bagian dari agen yang mendapatkan Pendidikan politik secara langsung. Kedua, kesadaran akan pentingnya kualitas penyelenggara pemilu di daerah semakin menunjukkan peningkatan. Ketiga, peluang-peluang dan upaya mengantisipasi adanya kecurangan pemilu yang dapat mencederai proses demokrasi di Indonesia dapat ditekan sedemikian rupa sehingga upaya ini benar-benar dapat berkontribusi di dalam pembangunan demokrasi berbasis kewargaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, G. (1993). The Study of Political Culture. In D. A. Berg-Schlosse, *Political Culture in Germany* (p. 15). New York: St. Martin's Press.



- Diamond, L. a. (2003). *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. London: Kumarian Press.
- Firmanzah. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik*. Jakarta: Erlangga.
- Fortin-Ritterberger, J. e. (2017). The Cost of Electoral Fraud: Establishing the Link Between Electoral Integrity, Winning an Election, and Satisfaction with Democracy. *Journal of Elections Public Opinion and Parties* 27 (3), 350-368.
- Gaffar, A. (1999). *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Giddens, A. (2003). *The Constitution of Society: Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Marsh, D. a. (2002). *Theory and Methods in Political Science*. New York: Palgrave MacMillan.
- McIntyre, A. (2008). *Participatory Action Research: Qualitative Research Methods Series 52*. New York: Sage University Press.
- Priyambudi, S. (2009). *Deepening Democracy In Indonesia? Direct Elections for Local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Surbakti, R. d. (2008). *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*. Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Suswantoro, G. (2016). *Pengawasan Pemilu Partisipatif*. Jakarta: Erlangga.





JPI: JOURNAL OF POLITICAL ISSUES

Universitas Bangka Belitung
Jurusan Ilmu Politik

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang,
Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka
Belitung, 33172
editor@jpi.ubb.ac.id